



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN ESELON I
KEMENTERIAN ENEGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 6 Juni 2023
Waktu : Pukul 11.30 WIB s.d. 18.22 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F-Nasdem/ Ketua Komisi VII DPR RI).
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos./Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Progres pelaksanaan kegiatan TA 2023,
2. Pembahasan RKA-K/L dan RKP Tahun 2024,
3. Lain-lain.
Hadir : 28 orang anggota hadir dari 50 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/ Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

10 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.

2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Adian Yunus Yusak Napitupulu
6. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
7. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
8. Ribka Tjiptaning Ploretariyati
9. Bambang DH.
10. Herman Hery

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M.
2. Drs. Mukhtarudin
3. Bambang Hermanto, S.E.
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.
5. Bambang Patijaya, S.E, M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. Dr. Ramson Siagian

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 4 anggota:

1. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc, M. Sosio.
2. Hj. Ratna Juwita, S.E, M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Muhammad Nasir
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.
4. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Drs. H. Anwar Idris/F-PPP

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Dadan Kusdiana (Plt. Sekjen Kementerian ESDM RI)
2. Dirjen Migas (Tutuka Ariadji)
3. Jisman P. Hutajulu (Dirjen Ketenagalistrikan)
4. Prahoro Nurtjahyo (Kepala BPSDM)
5. Djoko Siswanto (Sekjen DEN)
6. Erika Retnowati (Kepala BPH Migas)
7. Sugeng Mujiyanto (Kepala Badan Geologi)
8. M. Wafid A.N (Plt Dirjen Minerba)
9. Teuku Mohamad Faisal (Kepala BPM Aceh)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian mari kita mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Eselon 1 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Hadir di sini Bapak Sekjen, Bapak Irjen, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirjen Minerba, Kepala Badan Geologi, Kepala BPH Migas, Kepala BPSDM, Kepala BPMA dan Sekjen DEN, saya kira lengkap.

Mohon maaf agak sedikit terlambat ya karena biasa Pak, tahun-tahun politik ini agak mulai menyibukkan semua. Tapi *nggak*, kami sudah diskusi panjang lebar dengan Bapak, ini Plt lagi ya di kementerian, **karena** Pak Rida sudah pensiun per tanggal 1 Juni.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, ini *on the way* ini nanti akan bergabung Pak Bambang, Pak Eddy, dan juga Pak Maman dan juga Pak Oekon.

Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, dan juga Yang kami hormati seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian ESDM Republik Indonesia, dan juga Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pasti kita semuanya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semuanya dikaruniai nikmat sehat *wal'afiat*. Meskipun ternyata Covid masih ada ya. *Nah* mohon maaf orang rumah ini kena Covid juga, *maid* kita ada 2 kena Covid. Maka kita juga agak harus hati-hati kita semuanya.

Tapi namun demikian kita semuanya bersyukur kita hari-hari ini sehat *wal'afiat*, sehingga kita dapat menyelenggarakan rapat dengan pendapat hari ini yang ini memang penting *nih* hari-hari sangat penting untuk kita bersama nanti mencermati segala sesuatunya, sehingga juga merumuskan kebijakan-kebijakan dengan cermat khususnya adalah dalam penyusunan RAPBN atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bapak-Ibu sekalian.

Pada kesempatan ini sesuai undangan yang telah disampaikan berdasarkan jadwal Rapat Komisi VII DPR dari pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan memulai melaksanakan rangkaian dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian ESDM dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, dengan agenda sebagai berikut:

1. Progres pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023,
2. Pembahasan Rencana Kerja Anggaran untuk Kementerian atau Lembaga Tahun 2024.

Bapak-Ibu sekalian.

Berdasarkan data sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 18 anggota, terdiri dari 8 komisi. Dengan demikian sebagaimana Peraturan DPR RI, fraksi, 8 traksi maaf, ini sudah mulai *nggak* fokus gara-gara Mbak Ratna pakai jas, jaket yang keren, jadi 8 fraksi maksudnya.

Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 281 ayat (1) kuorum telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan bersifat terbuka, apakah disetujui Bapak-Ibu sekalian?

Baiklah Bapak Ibu sekalian, atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan demikian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.30 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**



Sebelum kita melanjutkan rapat ini kita bersepakat Bapak-Ibu sekalian bahwa Rapat ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam dan sejak dimulai rapat ini dan apabila nanti diperlukan bisa diperpanjang, setuju Bapak-Ibu sekalian ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Dalam rangka persiapan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2024 Komisi VII DPR RI akan mendalami terlebih dahulu realisasi RKA kementerian/lembaga, Kementerian ESDM Republik Indonesia pada tahun anggaran 2023. Dengan total anggaran Kementerian ESDM RI waktu itu adalah sebesar Rp5,5 triliun, dari total APBN Kementerian Tahun 2023 sebesar Rp1,86 triliun anggaran dialokasikan untuk masyarakat.

Komisi VII DPR RI memandang penting agar realisasi anggaran tahun 2023 dapat berjalan lebih cepat dan tidak mengorbankan kegiatan yang langsung berdampak kepada masyarakat jika terjadi pengetatan *budget*, seperti *automatic adjustment* yang memang beberapa waktu lalu mungkin sampai hari ini juga masih berlaku. Program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus terus dikawal dan diperkuat agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, pada agenda hari ini Komisi VII DPR RI juga akan mendalami anggaran Kementerian ESDM Republik Indonesia tahun 2024 berdasarkan pengantar dari Menteri ESDM sebesar Rp6.776.152.351.000,-, bahkan sebagaimana juga sudah disampaikan secara langsung maupun tidak langsung pada dasarnya Kementerian ESDM akan juga minta penambahan anggaran.

Mengingat beberapa infrastruktur dasar sangat penting bagi, baik itu energi, baik itu untuk gas maupun juga untuk energi listrik. Dan ini nanti akan kita bahas dan akan kita tidak lanjut, sudah barang tentu melalui mekanisme-mekanisme yang sebagaimana penyusunan anggaran.

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, untuk efektifnya waktu kami persilakan PLT Sekjen Kementerian ESDM Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya dan dilanjutkan oleh masing-masing Eselon 1 lainnya.

Kami persilakan Bapak Plt Sekjen ESDM Republik Indonesia.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Terima kasih.

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalammu'alaikum warahmatllahi wabarakatuh,
Selamat siang,*



Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, Sekjen DEN, BPH Migas, BPMA, Bapak-Ibu sekalian.

Pertama lapor Pak Ketua bahwa kami hadir lengkap Pak, tidak ada yang diwakilkan untuk hari ini, jadi hadir lengkap. Kami mewakili mengawali nanti akan menyampaikan, mohon maaf barangkali mengulang sedikit apa yang disampaikan Pak Menteri kemarin sebagai pengantar untuk pembahasan di masing-masing unit, Pak Pimpinan.

Jadi pertama kami akan menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2023 dan kemudian nanti kami akan lanjutkan dengan RKAKL dan RKP untuk tahun anggaran 2024.

Izinkan kami menyampaikan capaian kinerja sektor ESDM sampai dengan akhir Mei 2023, antara lain sebagai berikut; yang pertama, untuk PNBP, ini Pak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati. Angka yang 32,9 ini sebetulnya angka per Maret 2023, jadi di angka triwulan pertama ya. Jadi kalau angka sekarang ini sektor ESDM ini sudah memberikan kontribusi terhadap APBN sebesar 125,9 triliun sampai akhir Mei dari targetnya 219,58 triliun.

Kemudian anggaran belanja 21,15% dari pagu 6,55 triliun. Kemudian investasi 5,67 miliar dari target 33,58 miliar. *Lifting* minyak bumi 605.000 barel oil per day dari target 660. Kemudian *lifting* gas bumi 946.000 BOPD dari target 1.100. Kemudian rasio elektrifikasi, pemerintah sudah menargetkan 100% sejak 2 tahun yang lalu Pak dan sekarang di angka kami adalah 99,67 dengan target optimis di tahun ini adalah 99,91. Kemudian kapasitas pembangkit EBT mencapai 12,6 cukup besar dalam arti kumulatif, tapi kalau dari sisi tambahan di tahun ini baru bertambah 53,6 megawatt dari target 368 megawatt. Kemudian produksi batubara 293,5 juta ton dan kami terus menjaga DMO batubara sesuai dengan keperluan dan aturan.

Penyerapan anggaran belanja KESDM mencapai 21,15 dari pagu 6,55 dengan target di tahun 2023 adalah sebesar 98,66%, Pak. Jadi masih sesuai dengan rencana, masih sesuai dengan target dan berikutnya nanti kami sampaikan bahwa masih terdapat blokir anggaran yang cukup besar pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sudah kami sampaikan juga sebelumnya. Khususnya untuk kegiatan *clean cooking* untuk rumah tangga dan juga di Ditjen EBTKE untuk kegiatan PJUTS.

Blokir pada Ditjen Migas untuk kegiatan konkrit nelayan dan petani telah selesai dibuka per tanggal 2 Juni 2023 dan proses buka blokir untuk yang di Ditjen EBTKE sudah berjalan, sekarang sedang di-*review* oleh tim dari Inspektorat Jenderal. Blokir dan *automatic adjustment* ini akan dibuka seluruhnya sehingga seluruh kegiatan bisa dilaksanakan.



Dari 349 paket kegiatan strategis 102 paket dilaksanakan dengan mekanisme tender dan 247 paket nontender. Sebanyak 220 paket atau 65,04% telah berkontrak, artinya telah berjalan pelaksanaannya yaitu 58 paket tender dan 169 paket nontender.

Kami sebagaimana Pak Menteri kemarin sampaikan tetap berkomitmen untuk segera menyelesaikan seluruh kegiatan yang belum tender dan yang belum berkontrak. Sebanyak 46,45% anggaran dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur dan survei sumber daya alam, antara lain pipa Cisem tahap pertama Semarang-Batang, kemudian konkrit nelayan dan konkrit petani, PJ UTS, alat penyalur daya listrik atau biasanya disingkat dengan Apdal. Kemudian pembangunan PLTMH, PLTS terpadu, kemudian bantuan pasar baru listrik BPBL, revitalisasi dari pembangkit-pembangkit EBT skala kecil yang sebelumnya dibangun oleh ESDM dan insentif pengembangan konversi kendaraan listrik.

Mohon izin Pak Pimpinan, kami sampaikan untuk bagian yang kedua, pagu indikatif Kementerian ESDM untuk tahun anggaran 2024. Kementerian ESDM mengusulkan anggaran tahun 2024 sebesar 15,81 triliun, ini sudah dibahas bersama secara bilateral juga dengan Bappenas dan mendapatkan alokasi pagu indikatif tahun 2024 sebesar 6,78 triliun, yang bersumber dari:

- Dana rupiah murni sebesar 3,45 triliun atau sekitar 60%,
- Kemudian PNBP sebesar 2,8 triliun dan juga
- Pendapatan dari Badan Layanan Umum sebesar 457,17 miliar.

Adapun pengalokasian pagu indikatif tahun 2024 mempertimbangkan anggaran yang bersifat wajib, seperti gaji dan operasional kantor, PNBP dan BLU untuk unit dan kegiatan tertentu sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan alokasi anggaran fungsi pendidikan, dan juga untuk kegiatan prioritas nasional. Sehingga distribusi pagu per unit organisasi atau unit eselon 1 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Sekretariat Jenderal sebesar 545,86 miliar, kemudian untuk
- b. Untuk Inspektorat Jenderal sebesar 206,08 miliar,
- c. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebesar 1 triliun 774,34 milyar, kemudian
- d. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar 360,59 miliar,
- e. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar 1 triliun 243,34 milyar
- f. Dewan Energi Nasional besar 56,8 miliar sama dengan anggaran di tahun 2023,
- g. Kemudian untuk BPSDM ESDM sebesar 565 miliar, termasuk anggaran fungsi pendidikan sebesar 119,452 miliar.
- h. Kemudian untuk Badan Geologi, kami mengusulkan ada kenaikan untuk hal ini menjadi sebesar 1 triliun 265 miliar,
- i. BPH Migas sebesar 231,16 miliar dan
- j. Untuk Direktur Jenderal EBTKE sebesar 448,28 miliar, termasuk usulan untuk pembangunan PLTMH tahun jamak,
- k. Kemudian untuk BPM Aceh sebesar 78,93 miliar sama dengan APBN 2023.

Sebesar 35,02% atau 2,37 triliun pagu indikatif 2024 dialokasikan untuk infrastruktur dan survei sumber daya alam, antara lain untuk:

- Pipa Cisem tahap 2 dari Batang, Cirebon dan Kandanghaur Timur,
- Kemudian konkrit nelayan dan konkrit petani,
- BPBL,
- Pembangunan PLTMH dan PLTM,
- Pembangunan PLTS terpadu,
- Revitalisasi PLT EBT dan juga untuk pengeboran *slim hole* panas bumi.

Pagu indikatif 2024 ini masih belum mengakomodir beberapa kegiatan prioritas, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan yang dalam perhitungan kami sebesar 6,97 triliun, antara lain:

Pertama adalah untuk kekurangan pendanaan pembangunan pipa gas bumi Cisem tahap 2 untuk ruas Batang-Cirebon sampai dengan Kandanghaur. Kami juga mengusulkan untuk pembangunan pipa gas bumi Dumai Sei Mangkei, kemudian konversi mitan ke CNG, jaringan transmisi 500 kv khususnya adalah untuk di Sumatera Selatan, kemudian melanjutkan program *clean cooking* untuk rumah tangga, PJUTS, PLTS atap dan juga insentif konversi BBM ke motor listrik, yang sebetulnya ini telah dibahas dalam *trilateral meeting* antara kami Kementerian ESDM, Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Demikian penjelasan awal dari kami mengenai topik yang diagendakan pada tingkat Kementerian ESDM. Selanjutnya apabila diperlukan kami akan menyampaikan secara satu-satu Pak Pimpinan dari masing-masing unit Eselon 1. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah terima kasih Pak Pelaksana Tugas Sekjen ESDM Republik Indonesia.

Tadi telah disampaikan tentang beberapa kegiatan sebagaimana berkaitan dengan APBN tahun 2023 dan juga pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024.

Marilah Bapak-Ibu sekalian kita dalam utamanya adalah bagaimana pelaksanaan di tahun 2023, dengan demikian kita bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan baik apa yang kita rencanakan apakah juga dilaksanakan sebagaimana dalam rencana itu dan kalau *toh* ada hambatan, hambatannya apa dan seterusnya seterusnya.

Dan selanjutnya nanti kita masuk juga di pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2024 sebagaimana dipaparkan sebetulnya Menteri ESDM mengajukan anggaran kurang lebih 15 triliun, tetapi untuk sementara pagu indikatif adalah hanya 6,78 triliun.

Saya lihat tadi di Dirjen Migas utama yang besar sekali, dari 5 triliun sekian hanya direalisasi kurang lebih 1 koma sekian triliun. *Nah* nanti ini kita alami, tapi terlebih dulu kita membahas apa yang telah kita tetapkan di tahun anggaran tahun 2023 sejumlah 5,5 triliun, dengan tadi uraian yang sudah disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekjen.

Baiklah, dipersilakan yang terhormat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pak Willy Midel yang terhormat.

Dipersilakan.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pertama, saya mengucapkan selamat dulu untuk Plh ya, Plt ya, mudah-mudahan cepat terisi di Kementerian ESDM ini karena kita lihat ada beberapa jabatan-jabatan penting strategi, apalagi dalam pembahasan APBN ini ya tentu diharapkan agar para pejabat pemangku kepentingan ini sudah bisa fokus untuk bersama-sama membahas anggaran 2024 ya.

Kemudian dari apa yang tadi paparkan oleh Plt. Sekjen, saya masih belum bisa apa namanya memberikan tanggapan yang jelas ya atau yang fokus dalam hal ini, tetapi dari apa yang telah disampaikan karena kita melihat realisasi sampai dengan saat ini. Walaupun angka yang ditayangkan itu tidak *update* sampai dengan Bulan Mei mungkin seperti itu ya atau Bulan Juni.

Maka oleh karena itu saya hanya ingin nanti kita akan lebih jauh mungkin langsung ke pejabat Eselon 1 di semua kesekjenan dan kedirjenan mungkin lebih fokus ya dan ini globalnya saja. Maka oleh karena itu saya menyarankan kepada pimpinan kita langsung masuk ke yang fokusnya kesekjenan dan kedirjenan mungkin seperti itu ya yang mungkin lebih cepat ya, mengingat kita juga akan membahas untuk 2024 untuk evaluasi.

Mungkin itu masukan dari kami, dari Fraksi PDI Perjuangan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Willy dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ada masukan bahwa kita bahas tentang langsung menukik ke masing-masing kedirjenan lebih detail begitu ya, setuju begitu Bapak-Ibu sekalian?



Kalau begitu kita mulai saja sampaikan dari ya kembali lagi kesekjenan, lantas nanti dilanjutkan oleh dirjen-dirjen yang lain, nanti sesuai kebutuhan dipersilakan Pak Dirjen nanti yang mengatur, Pak Sekjen yang mengurutkan setelah Pak Sekjen atau PLT Sekjen ini menyampaikan kesekjenan. Lantas apa mungkin Dirjen Migas atau Irjen, atau apa silakan.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya.

F-NASDEM (RICO SIA):

Satu saja Pimpinan. Terima kasih Pimpinan.

Untuk Bapak Plt. Bapak Sekjen Pak Dadan, ada satu yang menggelitik saya *nih* terkait dengan pemaparan tadi yang sudah sangat komprehensif, sangat bagus terkait dengan PJUTS yang 494,9 miliar ini yang diblokir ini. Diblokir ada itu maksudnya gimana *sih* Pak Dirjen, mohon penjelasan lebih detail sedikit.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya nanti akan dijelaskan sekaligus karena nanti ini kita *review kan* tadi bahwa kita akan sampaikan melalui dirjen yang bertanggung jawab, termasuk pertanyaan Pak.

Sekarang dipersilakan Pak.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Baik, terima kasih Pak Pimpinan.

Kami izin pertama dari sekjen, kemudian dari irjen, berikutnya saya ngikutin daftar di sini ya. Ini kami di dalam Dirjen Migas, kemudian Ketenagalistrikan, kemudian ada Batubara, Dewan Energi Nasional, BPSDM, Badan Geologi, BPH, Dirjen EBTKE dan BPMA. Ada 11 Pak nanti, ada 11 unit ya nanti Pak yang kami sampaikan.

Pertama dari Kesekjenan Pak, dari Sekjen ESDM, kami pertama menyampaikan dari realisasi pelaksanaan kegiatan di 2023. Kami di sini *output* utama atau indikator kinerja utama dari Sekjen ESDM adalah pertama indeks

reformasi birokrasi, dari skala 100 dengan target indeks dari tahun sebesar 90 sampai saat ini setjen telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target tersebut, yaitu penyesuaian pelaksanaan reformasi birokrasi seperti sosialisasi, praktik baik reformasi birokrasi dan penajaman *roadmap* kepada seluruh unit.

Kemudian untuk hal yang lain misalkan untuk nilai SAKIP ESDM ini dari target 82 sekarang nilainya 78, kemudian untuk indikator kinerja pelaksanaan anggaran targetnya 90,75 dan sekarang 87,46. Nilai IKPA unit sekjen sampai Bulan April sebesar 87 dan akan dihitung, setiap dihitung pada Bulan Juli.

Kemudian angka yang lainnya Pak Pimpinan, Bapak sekalian opini BPK RI atas laporan keuangan ESDM mendapat predikat WTP. Kemudian persentase penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM sebesar 24,5% melalui capaian, antara lain 4 Permen telah diundangkan dari 24 rancangan Permen dan 6 Kepmen telah selesai dari 27 rancangan Kepmen.

Kami juga menangani permasalahan hukum di sektor ESDM yang sampai saat ini sebesar 62,67%, di mana sampai dengan saat ini telah menyelesaikan 38 dari 109 kasus hukum yang masuk dan menyelesaikan 278 dari 307 pertimbangan hukum yang masuk.

Kemudian untuk beberapa yang lain mungkin saya tidak akan menyampaikan satu persatu, untuk nilai hasil pengawasan kearsipan KESDM dengan target nilai A sampai saat ini setjen telah menyelesaikan kegiatan sebesar 45%.

Persentase penyelesaian usulan pengelolaan BMN karena ini juga termasuk strategis di kami dengan realisasi sebesar 98,02% dari target 92,5%. Kemudian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dengan target indeks sebesar 4,2 di mana sampai saat ini terus melaksanakan percepatan digitalisasi untuk meningkatkan layanan KESDM kepada masyarakat.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Setjen KESDM tahun 2023 mendapat alokasi sebesar Rp454,81 miliar dari pagu awal APBN sebesar 330,29 miliar dan dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan di 9 biro dan pusat. Adapun penyerapan anggaran sampai dengan 31 Mei 2023 adalah sebesar 134,5 miliar atau hampir 30% dengan *prognosa* di akhir tahun sebesar 99,34%.

Selanjutnya kami sampaikan target kinerja Setjen KESDM untuk tahun 2024, jadi mengulangkan yang disampaikan di awal untuk realisasi 2023:

- Indeks reformasi birokrasi 95,5
- Kemudian nilai SAKIP targetnya sebesar 80,5
- Nilai IKPA target sebesar 96,55%
- Opini BPK RI adalah tetap dengan predikat WTP,

- Kemudian penyelesaian penyusunan perundang-undangan targetnya 77,5%,
- Penanganan masalah hukum targetnya 80%, kemudian
- Kualitas perencanaan 84, dan
- Pemerintahan positif pada media sebesar 93%,
- Kemudian untuk indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik naik dari target, dari target tahun 2023 4,2 menjadi 4,3 di 2024.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa Setjen KESDM mendapatkan pagu indikatif tahun 2024 sebesar 545,9 miliar, dengan rincian rencana kerja adalah untuk:

1. Dukungan kesekretariatan, dukungan manajemen sebesar 214 kegiatan dengan pagu sebesar 198,8 miliar, kemudian
2. Pembayaran gaji dan tunjangan untuk 608 pegawai dengan pagu sebesar 97,8 miliar,
3. Operasi dan pemeliharaan kantor selama 1 tahun dengan pagu 83,6 miliar,
4. Layanan prasarana internal dengan pagu sebesar 6,3 miliar, dan terakhir adalah
5. Pelayanan data dan teknologi informasi dengan pagu sebesar 159,4 miliar.

Keseluruhannya kami distribusikan kepada 9 biro dan pusat di Setjen ESDM, dengan rincian:

- Untuk Biro Perencanaan sebesar 13,5 miliar,
- Biro Sumber Daya Manusia 115,7 miliar, ini termasuk didalamnya adalah gaji dan tunjangan,
- Biro Organisasi dan Tata Laksana sebesar 14,1 miliar,
- Biro Keuangan sebesar 18,3 miliar,
- Biro Hukum 13,3 miliar,
- Biro Umum 122,0 miliar,
- Kemudian Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama sebesar 28,1 miliar,
- Kemudian Pusat Data dan Teknologi Informasi sebesar 205,1 miliar,
- Kemudian untuk Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sebesar 15,7 miliar.

Demikian Pak Pimpinan penjelasan untuk progres pelaksanaan kegiatan 2023 sampai akhir Mei dan juga usulan RKAKL tahun 2024 dari Setjen KESDM.

Terima kasih, mohon izin apakah kami langsung atau.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Langsung dulu ya atau mau didalami, saya minta persetujuan forum *nih* kita dalam per apa atau langsung biar disampaikan semua baru kita dalam, semua dulu ya, semua dulu.



Silakan.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Berikutnya adalah dari Inspektorat Jenderal KESDM.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ESDM RI:

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi VII DPR RI,
Para pejabat di lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan para hadirin Bapak-Ibu sekalian.

Kami ingin menjelaskan pertama adalah postur anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2023.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Untuk agenda yang pertama berikut kami sampaikan progres penyerapan anggaran tahun 2023, secara total realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Mei 2023 adalah sebesar 28,67% melebihi target yang sudah ditetapkan.

Hanya saja masih terdapat kegiatan yang memerlukan percepatan yaitu pengawasan terpadu, ini pengawasan lapangan. Hal ini disebabkan pelaksanaan pengawasan terpadu baru terlaksana tahap 1 pada bulan Maret 2023 dan tahap berikutnya akan segera kami laksanakan.

Rencana pelaksanaan pengawasan terpadu tahap berikutnya akan dilaksanakan di beberapa provinsi, antara lain di Aceh, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua. Pada pelaksanaannya lokasi pengawasan dapat didiskusikan lebih lanjut.

Berikut kami sampaikan progres pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal:

- a. Layanan audit dengan 222 kegiatan telah terlaksana 35,49%,
- b. Gaji dan tunjangan pegawai telah terlaksana 50%,
- c. Operasional dan pemeliharaan kantor dengan progres 30%,
- d. Layanan perencanaan dan penganggaran dengan progres 45%,
- e. Layanan sumber daya manusia dengan progres 58%,
- f. Layanan keuangan dengan progres 60%,

- g. Layanan umum dengan progres 46,59%,
- h. Layanan hukum dengan progres 62,63%,
- i. Layanan humas dengan progres 40,81%,
- j. Layanan organisasi dan tata laksana dengan progres 42,37%,
- k. Layanan data dan informasi dengan progres 72,74%,
- l. Layanan pemantauan informasi dengan progres 66,39%,
- m. Layanan sarana dan prasarana internal dengan progres 23,47%.

Selanjutnya kami sampaikan progres kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja sampai dengan bulan Mei 2023:

- Tingkat maturitas SPIP KESDM indeks skala 5 dengan target 3,8 telah berprogres sebesar 45%.
- Pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang berkualitas, indeks skala 5 dengan target 5 telah berprogres 50%,
- Indeks tata laksana pengawasan indeks skala 5 dengan target 3, telah berprogres 45%,
- Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal dengan target 81,50 telah berprogres sebesar 50%,
- Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal dengan target sebesar 90, dengan progres 25% dan telah melakukan penyesuaian pelaksanaan RB sesuai dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 dan penilaian akan dilakukan Juli 2023.
- Indeks kepuasan layanan Itjen dengan target 3,35 realisasi sampai dengan Mei sebesar 3,41, survei ini dilaksanakan triwulanan.
- Level internal audit *capability* model dengan target 83, penilaian akan dilakukan Juli 2023.
- Nilai evaluasi kelembagaan Itjen dengan target nilai 74, realisasi sebesar 90,55% penilaian dilaksanakan 3 tahun sekali.
- Indeks profesionalitas ASN Itjen target sebesar 78, capaian hingga Bulan Mei sebesar 59,35% dengan melibatkan seluruh pegawai untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi diklat.
- Nilai IKPA Itjen target sebesar 90,75 per Bulan Mei nilai IKPA Itjen sebesar 93,64.
- Pelaksanaan review LK yang berkualitas, indeks skala 5 dengan target 5, progres sebesar 75%.

Sebagai aktif di lingkungan Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang untuk memastikan tercapainya, memastikan program berjalan sesuai dengan target, memastikan kebermanfaatan program untuk masyarakat. Dengan jangkauan pengawasan:

1. Janji Presiden RI, antara lain: pembangunan *smelter*, transisi energi, DME, pemanfaatan EBT dan regulasi EBT,
2. Sasaran strategis Kementerian ESDM,
3. 3 program prioritas nasional sektor ESDM antara lain: tingkat implementasi peningkatan P3DN dan peningkatan TKDN, pembangunan Cisem,
4. Program strategis nasional sektor ESDM, pembangunan Jargas, pembangunan Cisem,
5. Manajemen *concern*,
6. *Mandatory* program kegiatan kementerian lainnya.



Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya tentang jangkauan pengawasan intern, selanjutnya akan kami sampaikan apa saja yang menjadi fokus pengawasan Inspektorat Jenderal, *review* kinerja organisasi dan reformasi birokrasi:

- a. *Review* optimalisasi pengelolaan penerimaan bukan pajak (PNBP)
- b. *Review* optimalisasi subsidi tepat sasaran
- c. *Review* kinerja pengelolaan anggaran
- d. *Review* kinerja pembangunan infrastruktur ESDM yang bermanfaat
- e. *Review* kinerja BLU.

3, rencana Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2024, kami ingin menyampaikan rencana tahun 2024.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Sesuai dengan agenda selanjutnya akan kami sampaikan rencana kerja tahun 2024, bahwa untuk tahun anggaran 2024 Inspektorat Jenderal mendapatkan pagu indikatif sebesar 206,8 miliar, yang terdiri:

1. Belanja pegawai sebesar 32,41 miliar atau sekitar 15,73% dari total pagu anggaran.
2. Belanja modal sebesar 5,67 miliar atau sekitar 6,75% dari total pagu anggaran.
3. Belanja barang sebesar 168 miliar atau sekitar 81,52% dari total pagu anggaran, ini kebanyakan perjalanan dinas pengawasan lapangan.

Perlu kami informasikan pada kesempatan ini bahwa untuk tahun 2024 ini pagu indikatif mengalami kenaikan, hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran yang bersumber dari PNBP sebesar 146,64 miliar. Untuk anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar 59,44 miliar, sehingga total menjadi 206,08 miliar.

Dari penambahan anggaran tersebut nantinya akan kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung dengan optimalisasi penerimaan PNBP sektor ESDM. Kegiatan tersebut, antara lain:

- Pengawasan sebesar 109,7 miliar,
- Dukungan manajemen sebesar 5,89 miliar,
- Pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan dan kepatuhan internal sebesar 35,71 miliar dan
- Operasional kantor sebesar 17,03 miliar.

Selanjutnya kami sampaikan target kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2024, yaitu:

1. Tingkat maturitas sistem pengendalian internal pemerintah SPIP dengan target 3,72 indeks skala 5.
2. Pelaksanaan evaluasi mandiri sistem akuntabilitas kinerja pemerintah SAKIP yang berkualitas dengan total target 5, indeks skala 5.
3. Indeks tata laksana pengawasan dengan target 3, indeks skala 5.



4. Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah SAKIP dengan target 82.
5. Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal dengan target 95,5%.
6. Indeks kepuasan layanan Inspektorat Jenderal dengan target 3,4 dari skala 4.
7. Level Internal Audit Capability Model IACM dengan target 4 level.
8. Nilai evaluasi kelembagaan Inspektorat Jenderal dengan target 75.
9. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara Inspektorat Jenderal dengan target 82.
10. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA Inspektorat Jenderal dengan target 91.
11. Pelaksanaan *review* laporan keuangan yang berkualitas dengan target 5, dari indeks skala 5.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Demikian penjelasan singkat kami terkait topik yang diagendakan pada pagi hari ini, yaitu progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 dan pembahasan RKAKL dan RKP tahun 2024.

Demikian selanjutnya kami kembalikan pada Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya dilanjutkan ke dirjen yang lain, dipersilakan.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.
Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.
Seluruh hadirin yang berbahagia.

Selamat siang,
Salam sejahtera,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami dari Dirjen Migas akan menyampaikan agenda terkait yaitu progres, satu, progres pelaksanaan kegiatan TA 2023 dan pembahasan RKAKL dan RKP TA 2024.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan postur anggaran Ditjen Migas tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam *slide* sebesar 1,525 triliun, termasuk pagu paling besar pengujian migas hulu migas, terdiri dari:

- a. Belanja pegawai sebesar 104 miliar,



- b. Belanja barang sebesar 811,54 miliar,
- c. Belanja modal sebesar 609,66 miliar.

Berdasarkan sumber dana pagu Ditjen Migas tahun anggaran 2023, terdiri dari:

- Rupiah murni sebesar 1.293,35 miliar atau 1,293 triliun.
- PNBP Migas sebesar 17,86 miliar,
- PNBP Minerba sebesar 63,99 miliar dan
- BLU sebesar 150 miliar.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat.

Pagu Ditjen Migas tahun anggaran 2023 berdasarkan penerima manfaat untuk infrastruktur dan survei sumber daya alam sebesar 71,02% atau sekitar 1,08 triliun, di mana di dalamnya sudah mencakup pembangunan pipa Cisem, *monitoring* infrastruktur migas, pembagian konkit untuk nelayan dan petani.

Untuk publik nonfisik sebesar 15,36% atau sekitar 234,2 miliar, adapun untuk pelayanan internal yang mencakup gaji, tunjangan, operasional, penguatan kapasitas SDM sebesar 207,7 miliar atau hanya sekitar 13,62%.

Pagu untuk kegiatan manajemen kesehatan sebagai fungsi pendukung mengalami kenaikan di tahun anggaran 2023 karena adanya tambahan komponen gaji dan operasional kantor dengan bergabungnya Balai Besar Lemigas.

Kenaikan secara lebih mendasar, kenaikan secara lebih besar terdapat pada kegiatan pengelolaan Migas yang menunjukkan bahwa adanya fokus yang lebih besar pada pelaksanaan tugas dan fungsi teknis Ditjen Migas dalam dengan program kegiatan yang strategis seperti pelaksanaan penawaran tenaga kerja, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan hulu dan hilir migas, penyusunan alokasi dan harga gas, serta pengawasan kebijakan harga dan subsidi komoditas migas.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat.

Realisasi anggaran tahun 2023 Ditjen Migas termasuk Satker Migas pada per 31 Mei 2023, yaitu sebesar 22,4% atau 341,63 miliar dari total pagu anggaran 1.525 miliar atau 1,525 triliun dengan demikian mencapai target.

Dapat kami laporkan pula rekap untuk pengadaan barang dan jasa Ditjen Migas Tahun Anggaran 2023, dari total 328 paket yang sudah tender sebanyak 320 paket di mana 4 di antaranya masih proses tender dan 316 paket sudah selesai tendernya.

Untuk 8 paket yang belum tender sejumlah 435,6 miliar, diantaranya terdiri dari atas pemasangan pagar pengaman aset, pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, konkit nelayan dan konkit petani, untuk konkit petani akan segera dapat

dilaksanakan tendernya dalam waktu 1-2 bulan mendatang. Kemudian manajemen *service* aplikasi, pelayanan publik Ditjen Migas.

Selanjutnya kinerja Ditjen Migas pada tahun anggaran 2023, secara umum diupayakan untuk terus mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik yang diwakili oleh beberapa indikator kinerja. Beberapa target kinerja strategis, antara lain adalah:

- Jumlah wilayah kerja yang ditawarkan sejumlah 10 WK,
- Pemanfaatan gas domestik sebesar 67,8% realisasinya adalah 68,15%,
- SLA perijinan migas selama 8 hari realisasinya 6 hari,
- Penerimaan SDA Migas sebesar 131,2 triliun realisasinya 40,9 triliun sampai saat ini,
- Penerimaan BLU Migas sebesar 150 miliar, realisasinya 37,1 miliar atau 24,72%,
- Investasi Migas sebesar targetnya 17,4 miliar, saat ini baru mencapai 2,9 miliar,
- Kemudian pendistribusian konkit nelayan dan petani, pembangunan ruang pipa gas Semarang-Batang yang dilanjutkan sampai ke Cirebon dan Kandanghaur Timur, serta penyaluran BBM dan LPG.

Selanjutnya terkait dengan sebaran pendistribusian program konversi BBM ke BBG untuk nelayan dan petani sasaran masing-masing jumlah 13.000 paket dan 39.000 paket. Adapun sebaran lokasi untuk konkit nelayan sebanyak 48 kabupaten kota dan 78 kabupaten kota untuk konkit petani dapat kita lihat bersama pada *slide* yang ditayangkan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Selanjutnya adalah rincian pagu Ditjen Migas tahun anggaran 2023 sesuai penerima manfaat, sebagai berikut:

Belanja publik fisik infrastruktur, terdiri atas:

1. Pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang tahap 1 ruas Semarang-Batang dengan jumlah anggaran 602,94 miliar.
2. Konversi BBM ke BBG untuk nelayan, sasaran sebanyak 300.000 paket dengan sasaran 126,27 miliar.
3. Konversi BBM ke BBG untuk petani, sasaran sebanyak 309.000 paket dengan anggaran 324,23 miliar, serta
4. Perencanaan dan *monitoring* evaluasi infrastruktur.

Adapun pelayanan untuk pelayanan publik nonfisik Eselon 2 Ditjen Migas dan program dukungan manajemen adalah sebagaimana di *slide* terakhir. Kegiatan ini diantaranya meliputi kegiatan keteknikan dan keselamatan lingkungan migas, penyiapan dan **...(suara tidak jelas 49.28)** Migas, PNPB BLU hulu Migas, penyusunan forfasi harga minyak mentah, serta penyediaan LPG 3 kilo gram tepat sasaran.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Izinkan kami melanjutkan agenda kita yang kedua, yaitu pembahasan RKAKL dan RKP Ditjen Migas tahun anggaran 2024. Usulan postur anggaran Ditjen Migas tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,774 triliun. Adapun rincian porsi untuk infrastruktur dan survei sumber daya alam masih di jaga tetap tinggi yaitu sebesar 73,95%. Sedangkan untuk publik fisik, publik nonfisik 8,98% dan sisanya untuk pelayanan internal sejumlah 17,07%.

Selanjutnya tentang postur anggaran berdasarkan jenis belanja yang terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar 106,3 miliar,
- Belanja barang sebesar 675,3 miliar,
- Belanja modal sebesar 992,7 miliar.

Berdasarkan sumber dana pagu Ditjen Migas tahun anggaran 2024, terdiri dari:

- Rupiah murni sebesar 1,504 triliun,
- PNBPN sebesar 119,2 miliar,
- BLU sebesar 151 miliar.

Anggaran Ditjen Migas tahun anggaran 2024 sudah termasuk balai besar Lemigas sebesar 218,62 miliar.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Dapat kami dilaporkan bahwa kegiatan prioritas nasional tahun 2024 Ditjen Migas yang mendukung RKP tahun 2024 dan RPJMN tahun 2020-2024, terdiri atas 8 kegiatan dengan besaran 1,3 triliun yang detailnya dapat kita simak pada *slide-slide* berikut.

Rencana pembagian *converter kit* untuk tahun anggaran 2024 di 16 provinsi sejumlah 15.000 paket, dengan pagu anggaran sebesar 156,75 miliar. Sedangkan untuk pembagian *converter kit* untuk petani diusulkan sejumlah 19.000 paket tersebar di 16 provinsi, dengan pagu usulan sebesar 168,65 miliar.

Dapat kami laporkan juga untuk program pembangunan transmisi pipa gas bumi Cisem tahap 2 Batang-Cirebon-Kandanghaur Timur di tahun 2024 ditargetkan sebesar di pagu indikatif sebesar 973,7 miliar. Kegiatan prioritas lainnya mencakup fasilitas Jargas non-APBN, wilayah, LPG 3 kilogram tepat sasaran, fasilitas kilang dan penyusunan RUU Migas.

Adapun untuk pelayanan publik nonfisik setiap unit Eselon 2 terlampir dalam *slide* yang cukup detail, untuk itu kami akan sampaikan untuk dalam rangka dalam kegiatan pendalaman nanti.

Selanjutnya Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat. Demikian penjelasan dan laporan kami mengenai topik yang ditanyakan, selanjutnya kami mengharapkan masukan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang terhormat.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Dirjen Migas.

Dilanjutkan dengan Dirjen Ketenagalistrikan.

DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ESDM RI (JISMAN P. HUTAJULU):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, Bapak Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM dan Bapak-Ibu pejabat madya di lingkungan KESDM, Hadirin yang berbahagia.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi, Selamat siang.

Sebagai pembuka, izinkan kami menyampaikan realisasi indikator kinerja tahun 2023 pada sub sektor ketenagalistrikan di triwulan pertama tahun 2023, setidaknya terdapat 4 program yang dari prioritas yang termasuk dalam program pembangunan berkelanjutan pada sub sektor ketenagalistrikan, yaitu rasio elektrifikasi dengan capaian sebesar 99,67%, subsidi listrik tepat sasaran telah terealisasi sebesar 15,29 triliun, peningkatan nyala 24 jam per hari saat ini sebanyak 121 sistem atau lokasi telah menyala sejak tahun 2019 dan capaian konsumsi listrik saat ini sudah mencapai 1.173 kwh per kapita.

Kemudian indikator lainnya terkait infrastruktur pasokan energi masih berproses di lapangan, target pembangunan pembangkit transmisi dan gardu induk masih mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang berbasis pada RUPTLN yang lama yaitu tahun 2019-2028.

Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terkait perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar untuk pertumbuhan listrik. Adapun target saat ini dan prognosis infrastruktur, sebagai berikut:

- Pembangkit target di 2023 sebesar 5,5 gigawatt, realisasinya 4,53 megawatt dengan *outlook* di 2023 sebesar 4,6 gigawatt.
- Kemudian di transmisi target 2023 di 3.519 kilometer sirkuit, kemudian realisasinya 208 kilometer sirkuit dengan *outlook* 1.540 kilometer sirkuit.

- Pengembangan transmisi mengikuti penambahan kapasitas pembangkit yang akan di evakuasi.
- Gardu induk dengan target 2023 3.900 MVA, realisasi 403 MVA dengan *outlook* nanti di akhir 2023 sebesar 3.890 MVA.

Beberapa indikator kinerja tahun 2023 terkait peningkatan akses perlindungan sosial, teknik dan lingkungan memiliki progres yang masih sesuai dengan target, yaitu jumlah pelanggan listrik dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi, penurunan emisi CO₂, infrastruktur *charging station* untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik dan pencapaian TKDN di pembangkitan tenaga listrik.

Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait pagu anggaran yang dialokasikan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2023. Pagu Ditjen ketenagalistrikan di 2023 sebesar 709,4 miliar, sebesar 76,4% dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk belanja infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat melalui program bantuan pasang baru listrik sebanyak 125.000 rumah tangga dan program *clean cooking* untuk rumah tangga sebanyak 474.660 rumah tangga.

Sampai dengan 31 Mei 2023 realisasi penyerapan anggaran sebesar 6,8% sedikit di atas target sebesar 6,16%, sebagai catatan Bapak-Ibu sekalian realisasi sampai dengan Bulan Mei masih 6,8% dikarenakan 76,4% anggaran Ditjen Ketenagalistrikan diperuntukkan kegiatan fisik yang memerlukan waktu untuk proses pengadaannya.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Dapat kami sampaikan program bantuan pasang baru listrik tahun 2023 terjadi penambahan volume penerimaan BPBL, yang semula 83.000 rumah tangga menjadi 125.000 rumah tangga dengan total anggaran 304,3 miliar. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi menuju 100%.

Mengingat usulan untuk calon penerima program BPBL yang telah kami terima saat ini sekitar 400.000 rumah tangga. Progres pelaksanaan kegiatan BPBL tahun 2023 berjalan dengan baik dan semua regulasi pendukung telah disiapkan, data penerima BPBL tahap pertama sudah ditetapkan sehingga Bapak-Ibu sekalian, kami optimis program BPBL dapat menyala sebagian pada tanggal 17 Agustus 2023.

Mengingat anggaran Ditjen Ketenagalistrikan sebagian besar untuk kegiatan fisik BPBL, kami *me-monitoring* kegiatan BPBL dari bulan ke bulan secara ketat dengan kurva S pelaksanaan kegiatan 1 Juni 2023 seperti yang ditampilkan. Kami targetkan pada bulan Juli 2023 seluruh calon penerima BPBL selesai diverifikasi lapangan untuk segera kami tetapkan.

Program fisik kedua yang ada di Ditjen Ketenagalistrikan adalah program *clean cooking* untuk rumah tangga, pada tahun 2023 direncanakan sebanyak 474.660 rumah tangga tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Hampir 50% program *clean cooking* direncanakan tersebar di Pulau Jawa,



yang hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan *over capacity* pada sistem Jamali.

Namun untuk provinsi lain di luar Pulau Jawa kuota program *clean cooking* sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem tenaga listrik setempat. Dapat kami sampaikan pula untuk alokasi kuota Papua dan Papua Barat sudah mengakomodir pemekaran provinsi di Papua.

Bapak-Ibu yang terhormat.

Kami laporkan bahwa saat ini program *clean cooking* belum bisa dieksekusi dikarenakan Bappenas menginginkan adanya surat tertulis dari DPR RI yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas bahwa KESDM memiliki program *clean cooking* di tahun anggaran 2023 atau dalam kesimpulan rapat hari ini dan kesimpulan raker minggu depan dimasukkan adanya program *clean cooking*, sehingga kami bisa segera nanti mengeksekusi program tersebut.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan pembahasan RKAKL dan RKP tahun 2024 di Ditjen Ketenagalistrikan. Perlu kami sampaikan bahwa target indikator tahun 2024 masih mengacu pada RPJMN dan Renstra Kementerian ESDM tahun 2020 sampai dengan 2024 atau sama dengan indikator kinerja pada tahun 2023.

Berdasarkan target indikator kinerja yang ada, selanjutnya kami menyusun program kerja yang tertuang pada RKAKL Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2024. Di mana kami mengelola pagu indikatif sebesar 360,6 miliar, yang bersumber dari pendanaan rupiah murni atau APBN sebesar 289,7 miliar atau 80,4% dan dari pemanfaatan izin penggunaan penerimaan negara bukan pajak atau IPPNBP Minerba sebesar 70,8 miliar atau 19,6% seperti yang terlihat pada *chart* kanan di atas.

Bapak-Ibu.

Dapat kami sampaikan anggaran 2024 mengalami penurunan alokasi dari tahun 2023, namun kami tetap berkomitmen memfokuskan pengalokasian untuk belanja infrastruktur melalui program BPBL dengan porsi 57% dengan target 80.000 rumah tangga.

Terkait dengan program BPBL tahun 2024 bahwa secara teknis tidak berubah seperti tahun 2023 dan mempertimbangkan bahwa pada tahun 2023 ini usulan sudah kami terima sekitar 400 ribuan rumah tangga. Maka kami berharap program BPBL tetap dilanjutkan setelah tahun 2024. Untuk *clean cooking* 2024 belum mendapatkan alokasi anggaran yang diperkirakan sebesar 340 miliar atau untuk 680.000 rumah tangga.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.



Demikian yang dapat kami sampaikan terkait pembahasan RKAKL Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2024, atas perhatian Ibu-Bapak kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Beberapa catatan telah disampaikan.

Dilanjutkan Dirjen Minerba.

Plt Pak ya?

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

Siap Pak.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI,
Para pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Seluruh hadirin yang berbahagia.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Izinkan kami menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan Ditjen Minerba tahun anggaran 2023 dan usulan pagu RKAKL tahun 2024.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Pagu anggaran Ditjen Minerba tahun anggaran 2023 sebesar 678,6 miliar, dengan komposisi:

- Belanja pegawai sebesar 183,5 miliar atau 27%,
- Belanja barang sebesar 449,6 miliar atau 66%, dan
- Belanja modal sebesar 45,5 miliar atau 7%.

Sedangkan berdasarkan sumber dana anggaran tahun 2023 bersumber dari:

1. Rupiah murni sebesar 266,7 miliar, dan
2. PNBPN sebesar 380,1 miliar, selain itu terdapat sumber dana berasal dari balai besar pengujian minerba tekamira sebagai satker BLU sebesar 31,8 miliar.

Realisasi anggaran tahun 2023, dari realisasi penyerapan anggaran Ditjen Minerba sampai dengan 31 Mei 2023 adalah sebesar 153,29 miliar atau

22,59%. Realisasi ini masih di bawah target akhir Mei 2023 sebesar 27,87%, sehingga terdapat deviasi negatif sebesar 5,28%. Realisasi tersebut terdiri dari:

- a. Realisasi belanja pegawai sebesar 66,29 miliar atau 36,13%,
- b. Realisasi belanja barang sebesar 85,20 miliar atau 18,95% dan
- c. Realisasi belanja modal sebesar 1,8 miliar atau 3,95%.

Selanjutnya kami sampaikan capaian kinerja triwulan 1 tahun 2023, beberapa capaian kinerja strategis Ditjen Minerba dapat kami sampaikan, antara lain:

1. Pemanfaatan batubara dalam negeri (DMO) pada triwulan 1 telah mencapai 34 juta ton dari target 176 juta ton atau realisasi sebesar 19%,
2. Produksi batubara pada triwulan 1 telah mencapai 167 juta ton dari target 694 juta ton atau realisasi sebesar 24%,
3. *Smelter* pada tahun 2023 ditargetkan dapat terbangun secara kumulatif sejumlah 17 *smelter*, kemudian reklamasi lahan bekas tambang pada triwulan 1 telah mencapai 2.294 hektar dari target 7.075 hektar atau realisasi sebesar 32%.

Selanjutnya adalah PNBP Minerba pada triwulan 1 telah tercapai 54,95 triliun dari target 85,24 triliun atau realisasi sebesar 64%. Investasi subsektor minerba pada triwulan 1 telah tercapai 1.583 US dolar, ulangi 1.583 juta US dolar dari target 7.702 juta US dolar atau realisasi sebesar 20%.

Selanjutnya produksi mineral utama triwulan 1 telah tercapai, antara lain:

- Emas 19,1 ton,
- Perak 81,8 ton,
- Timah 9,5 ribu ton,
- Veronikel 106,2 ribu ton,
- Nikel 21 ribu ton.

Sedangkan BLU balai besar Tekmira triwulan 1 telah tercapai 9,99 miliar rupiah dari target 31,76 miliar rupiah atau realisasi sebesar 31%.

Selanjutnya terkait dengan program sosialisasi dan Binwas tahun 2023, kami sampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan Binwas pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan melibatkan *stakeholder* di 22 provinsi, mulai bulan Juni hingga November.

Kami mengharapkan Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII yang terhormat, dapat terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dalam rangka pengelolaan pertambangan minerba yang lebih baik dan manfaat dari pertambangan minerba ini dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan pagu indikatif Ditjen Minerba Tahun Anggaran 2024, bahwa pagu anggaran Ditjen Minerba tahun anggaran 2023 sebesar 678,6 miliar, sedangkan pagu indikatif tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,24 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 2 kali lipat dari tahun 2023 yang berdasarkan jenis belanja, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja pegawai relatif sama yaitu Rp183,7 miliar,

2. Belanja barang naik dari Rp449,6 miliar menjadi Rp1 triliun atau naik 120%, hal ini karena terdapat kenaikan izin penggunaan PNBP dan akan digunakan dalam rangka optimalisasi kegiatan pembinaan dan pengawasan, serta optimalisasi PNBP Minerba.
3. Belanja modal naik dari Rp45,5 miliar menjadi Rp52,6 miliar atau naik 15%, kenaikan antara lain dalam rangka pemenuhan modernisasi dan revitalisasi laboratorium pengujian minerba.

Sedangkan berdasarkan dana sumber dana rupiah murni pada anggaran 2023 sebesar Rp266,7 miliar dan pada pagu indikatif tahun anggaran 2024 menjadi sebesar Rp271,4 miliar. Untuk dari sumber dana PNBP dari 380,1 miliar menjadi Rp939,2 miliar atau naik 149%, kenaikan ini karena terdapat kenaikan target PNBP tahun 2024 dari royalti sehingga izin penggunaan PNBP di Minerba menjadi naik pula. Sedangkan sumber dana BLU berasal dari Balai Besar Pengujian Minerba Tekmira sebagai Satker BLU sebesar Rp32,8 miliar.

Berdasarkan Surat Sekjen KESDM dan pagu indikatif Ditjen Minerba Rp1,2 triliun dapat dirincikan, sebagai berikut:

- a. Direktorat Pembinaan Program sebesar Rp21,7 miliar, kemudian
- b. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba tahun 2024 Rp370 miliar,
- c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara sebesar Rp36,7 miliar,
- d. Direktorat Pembinaan Pengusaha Mineral sebesar Rp46,1 miliar,
- e. Direktorat Penerimaan Minerba sebesar Rp23,2 miliar, dan
- f. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar Rp652 miliar,
- g. Balai Besar Pengujian Mineral Minerba Tekmira sebesar Rp93,4 miliar.

Kami sampaikan selanjutnya terkait dengan program-program yang ada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2024. Adapun kegiatan dari program pertambangan, antara lain di Direktorat Pembinaan Program Minerba berupa:

- Evaluasi kewilayahan subsektor mineral dan batubara terdapat 15 draf keputusan menteri terkait dengan penyiapan WUP, WUPK mineral logam dan batubara dan 5 draf Kepmen penyiapan WPR dan WPN dengan pagu Rp4,23 miliar.
- Selanjutnya layanan penyusunan program sub sektor mineral dan batubara terdapat 8 kegiatan kebijakan mineral sebesar 88,3 miliar dan 3 kegiatan evaluasi isu strategis minerba sebesar 3,2 miliar.
- Kemudian layanan koordinasi dan kerjasama sub sektor Minerba, 2 kegiatan kerjasama minerba sebesar 3,2 miliar,
- Rencana produksi dan kebutuhan dalam negeri mineral logam dan batubara 2 kegiatan,
- Rencana produksi mineral logam batubara dan DMO batubara sebesar 1,25 miliar,
- Kemudian percepatan peningkatan nilai tambah batubara dan 2 kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara sebesar Rp1,35 miliar.

Sedangkan kegiatan yang ada di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara:

1. Layanan pengelolaan data dan informasi pertambangan batubara, ada 5 kegiatan sebanyak Rp6,55 miliar, kemudian
2. Layanan kebijakan perusahaan pertambangan batubara, ada 12 kegiatan Rp14,589 miliar,
3. Pengendalian produksi batubara, terdapat 3 kegiatan sebesar Rp8 miliar,
4. Pemenuhan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik, 1 rekomendasi sebesar 3,8 miliar,
5. Layanan fasilitas perselisihan PKP2B dan IUP PMA batubara pada masyarakat, 5 badan usaha pendampingan badan usaha 1,5 miliar, dan
6. Tingkat implementasi P3DN dan peningkatan TKDN pertambangan batubara, 1 kegiatan pembinaan dan pengawasan sebanyak 2 miliar.

Selanjutnya terkait dengan kegiatan program pertambangan yang ada di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral:

- a. Layanan pengelolaan data dan informasi pertambangan mineral, ada 27 kegiatan 8 kegiatan pembinaan dan pengawasan sebesar Rp19,9 miliar, 3 kegiatan verifikasi 8,47 miliar, 4 kegiatan evaluasi 10,65 miliar, kemudian
- b. Layanan kebijakan perusahaan pertambangan mineral, ada 2 kegiatan sebanyak 2,58 miliar,
- c. Layanan fasilitas perselisihan KK dan IUPK pada masyarakat, 5 badan usaha, laporan pengaduan 1,3 miliar, kemudian
- d. *Monitoring* pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri pada 17 *smelter* sebanyak 3,62 miliar,
- e. Tingkat implementasi P3DN dan peningkatan TKDN pertambangan mineral, 1 kegiatan pembinaan dan pengawasan sebanyak 3,45 miliar.

Dan selanjutnya di Direktorat Kegiatan Teknik dan Lingkungan Minerba, ada beberapa kegiatan. Yang pertama evaluasi, verifikasi dan bimbingan teknis aspek teknik dan lingkungan mineral dan batubara, ada 5 kegiatan evaluasi teknis sebesar 6,34 miliar, 4 kegiatan verifikasi sebesar Rp17,27 miliar dan 3 kegiatan Bimtek sebesar Rp2,14 miliar.

Selanjutnya adalah NSPK di bidang standarisasi dan usaha jasa pertambangan, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan dan konservasi minerba sebanyak 17 NSPK sebesar Rp4,06 miliar. Selanjutnya adalah Pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan pertambangan minerba 3.300 badan usaha di seluruh Indonesia sebesar 338,19 miliar. Pengawasan dan penilaian reklamasi dan pasca tambang berbasis teknologi penginderaan jauh 7.100 hektar sebesar Rp2,05 miliar.

Selanjutnya untuk kegiatan di Direktorat Penerimaan Negara Minerba, optimalisasi PNBP subsektor mineral dan batubara sebesar Rp111,6 triliun, kegiatan verifikasi kewajiban dan piutang PNBP Rp7,94 miliar, 2 kegiatan rekonsiliasi dan piutang PNBP 4,56 miliar, 3 kegiatan *monitoring* dan evaluasi PNBP Rp5,53 miliar dan 1 kegiatan pemeriksaan PNBP Rp3,59 miliar, serta 1 kegiatan bimbingan teknis PNBP sebesar Rp1,57 miliar.

Sedangkan yang terakhir dari Satker Balai Besar Tekmira adalah melakukan layanan jasa mineral dan batubara, ada 34 kegiatan layanan kepada badan usaha dan 20 kegiatan verifikasi badan usaha, total ada Rp37,64 miliar.

Selanjutnya program dukungan dan manajemen terdapat 2 kegiatan yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba. Yang pertama adalah terkait dengan gaji dan tunjangan, kemudian operasional dan pembelian kantor Inspektorat Tambang sebesar 46,12 miliar dan operasional kantor mineral dan batubara sebesar 49,14 miliar.

Kemudian selanjutnya layanan perencanaan dan penganggaran 4 kegiatan sebesar 3,58 miliar, selanjutnya adalah layanan organisasi dan tata kelola internal ada 6 kegiatan dengan anggaran 12,02 miliar. Kemudian pelayanan humas dan komunikasi publik ada 2 kegiatan sebesar 4,57 miliar. Layanan umum, layanan ketatausahaan pengelolaan BMN serta pengelolaan arsip seluruhnya ada anggaran sebesar 11 miliar.

Kemudian selanjutnya adalah layanan protokoler 1 layanan sebesar 8 miliar, layanan pemantauan dan evaluasi 4 layanan 4,13 miliar, layanan manajemen keuangan ada 11 kegiatan 12,9 miliar dan layanan hukum sebesar, sebanyak 4 layanan ada 8,39 miliar.

Layanan data dan informasi ada 5 kegiatan 5 miliar, kemudian 12 sistem penguatan digitalisasi minerba ada 8,96 miliar. Selanjutnya layanan manajemen SDM internal untuk meningkatkan potensi kompetensi 1.082 pegawai sebanyak 12,6 miliar, serta layanan Diklat 4,1 miliar.

Selanjutnya adalah kegiatan administratif di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Tekmira ada gaji dan tunjangan 129 pegawai sebanyak 20 miliar, operasional dan pemeliharaan kantor 5 lokasi sebesar 27,5 miliar, kemudian layanan perencanaan penganggaran sebesar 0,25 miliar, layanan manajemen keuangan sebesar 0,51 miliar, layanan data dan informasi 2 kegiatan 1,05 miliar, layanan manajemen SDM internal untuk pengembangan kompetensi 129 pegawai Tekmira sebesar 0,8 miliar.

Layanan umum, antara lain: operasional 4 laboratorium di 3 lokasi, untuk layanan BLU sebesar 2,3 miliar, layanan pemantauan dan evaluasi sebesar Rp0,3 miliar. Dan terakhir layanan sarana dan prasarana internal untuk pemberian 1 unit peralatan dan mesin sebesar Rp0,35 miliar dan 1 paket renovasi gedung Rp2,1 miliar.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.



Demikian penjelasan kami mengenai seluruh topik yang telah diagendakan, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya Pak Plt. Sekjen kepada siapa?

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Tadi urutan kami Pak Pimpinan ke Dewan Energi Nasional.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya Dewan Energi Nasional dipersilakan Pak Joksis.

SEKJEN DEWAN ENERGI NASIONAL (DJOKO SISWANTO):

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR, Pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ESDM, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bisa *slide* selanjutnya, untuk tahun 2023 realisasi penyerapan sampai 31 Mei 2023 itu sebesar 21,97 triliun atau 38,65% melebihi 1,63% dari target di bulan Mei.

Next slide, adapun realisasi kinerja sampai dengan 31 Mei kami telah melakukan FGD tentang isu-isu strategis menuju net-zero emisi, kemudian pembahasan pembaharuan PP Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang nanti pada ujungnya juga dibahas oleh Komisi VII DPR RI.

Kemudian persidangan DEN sudah dilakukan 2 kali Sidang Anggota DEN, kemudian Perpres tentang Nepio ini tentang nuklir sudah disampaikan kepada Kemenpan RB dan dalam waktu 45 hari Kemenpan-RB sudah harus memprosesnya dan menanggapi.

Kemudian Perpres cadangan tenaga energi sudah di Kemen hukum dan HAM, sedang dibahas untuk selanjutnya disampaikan ke setneg.

Kemudian dari 34 provinsi kami sudah selesai memfasilitasi 30 provinsi mempunyai Perda Ruwet, 4 provinsi masih dalam pembahasan dengan DPRD yaitu DKI, Kepri, Papua dan Papua Barat. Sedangkan 4 provinsi pemekaran di daerah otonom baru belum disusun Perdanya.

Kemudian evaluasi bauran energi nasional dan daerah telah tercapai realisasi 12,30% EBT di tahun 2022, adapun targetnya adalah 23% di 2025.

Slide selanjutnya tentang pengawasan kami berkoordinasi dengan para Kementerian Anggota DEN diantaranya adalah KLHK, Bappenas itu menggunakan aplikasi Sisanter. Kemudian kami juga membuat buku tentang *outlook* energi dan neraca energi.

Kemudian sosialisasi sesuai dengan Perpres yang ada kami wajib melakukan sosialisasi segala peraturan regulasi yang terbit dari pemerintah, yaitu Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisdaren ini kami mengundang beberapa Anggota DPR Komisi VII dalam sosialisasinya.

Kemudian penilaian ketahanan energi, *alhamdulillah* kita sudah di angka indeks 6,61 dikategori tahan, namun memang belum tahan.

Selanjutnya untuk program 2024, anggaran kami sebagaimana Bapak Menteri sampaikan kemarin adalah sama dengan tahun 2023. Namun demikian untuk tahun 2024 saat ini Bapak Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN telah menyampaikan draf Perpres tentang Penyelesaian Gaji atau Honorarium dari APKDN yang terdiri ada 8 menteri Anggota DEN dari pemerintah dan 8 Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan.

Itu penyesuaian gaji melalui Perpres sudah selesai pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan saat ini sedang dalam proses pembahasan dengan Sekneg, yang informasinya dalam waktu 40 hari, 45 hari Pak Sekneg harus sudah memproses untuk penandatanganan Bapak Presiden. Sehingga kami yakin tahun ini Perpres ini akan terbit yaitu untuk penyesuaian gaji APK DEN dan Anggota DEN dari pemerintah, serta tambahan pegawai dengan perjanjian kerja yaitu sebesar 15 miliar, namun ini masih di bintang menunggu Perpresnya terbit dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Sedangkan untuk kegiatan lainnya sama dengan kegiatan tahun 2023 sebesar 56,8 miliar, tambahan 15 miliar nanti setelah Perpres-nya terbit.

Untuk kegiatan 2024 *next slide*, kita sedang merumuskan rekomendasi penyiapan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor berupa Perpres, kemudian pendampingan Perda Ruwet ini bersama dengan Anggota Komisi VII di dapil-dapilnya yaitu tadi ada 4 provinsi di DKI, Kepri, Papua dan Papua Barat serta *review* Perda Ruwet untuk 30 frekuensi yang sudah mempunyai Perda Ruwet bersama para Anggota DPR di dapil masing-masing.

Kemudian Perpres tentang Cadangan Tenaga Energi apabila tahun ini belum selesai, maka dilanjutkan pembahasannya untuk tahun 2024. Kemudian rumusan rekomendasi peningkatan ketahanan energi nasional, mudah-mudahan tahun 2024 meningkat lagi indeks ketahanan energi kita dari 6,61 menjadi lebih besar lagi, sehingga menuju ke kategori sangat tahan.

Kemudian juga persidangan Anggota DEN sebagaimana peraturan perundangan kita wajib melakukan Sidang Paripura dipimpin Bapak Presiden 2 kali setahun dan sidang Anggota 6 kali dalam waktu setahun. Kemudian komunikasi kehumasan dan peliputan dan publikasi kegiatan DEN. Kami tiap tahun juga membuat buku *outlook* energi dan neraca energi.

Slide berikutnya, kemudian penetapan langkah-langkah penanggulangan Krisdaren kita mengidentifikasi dan melakukan pemantauan tentang kondisi penyediaan dan kebutuhan energi, baik BBM, LPG, tenaga listrik dan gas bumi. Kemudian melakukan simulasi yang cukupantisipasi dan mitigasi kondisi Krisdaren dan berkoordinasi dalam menganalisis tingkat kerawanan gangguan pasokan energi listrik strategis dan kajian terhadap alternatif tindakan penanggulangan kondisi kekurangan pasokan energi.

Kemudian kami melakukan evaluasi bauran energi nasional dan menyusun rumusan rekomendasi atas evaluasi pencapaian bauran energi nasional, menyusun rumusan rekomendasi atas evaluasi pencapaian bauran energi daerah untuk 30 provinsi yang telah mempunyai Perda Ruwet.

Kemudian melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan energi lintas sektor, ini berdasarkan Perpres juga yang masih dalam proses untuk 13 Kementerian/lembaga yang tertuang didalam Perpres Ruwet. Kemudian menyusun *roadmap* keenergian dan keemisian net-zero emisi di 2060 atau lebih cepat bersama kementerian dan lembaga terkait.

Selanjutnya adapun rincian anggaran beserta kegiatannya adalah untuk:

1. Gaji dan tunjangan ada 1 layanan atau sebesar pagunya 36,04 miliar, ini apabila Perpres tentang Penyelesaian Gaji Anggota DEN, baik dari pemerintah maupun APK DEN dan tambahan pegawai dengan kontrak kerja itu terealisasi di tahun 2024.
2. Kemudian operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 11,4 miliar,
3. Layanan perencanaan dan penganggaran 2,94 miliar,
4. Layanan SDM 0,51 miliar, layanan Ortala 0,66 miliar,
5. Layanan manajemen keuangan 0,89 miliar,
6. Layanan hukum 0,68 miliar,
7. Layanan manajemen internal dan kearsipan 7,5 miliar,
8. Layanan kerja sama 0,42 miliar,
9. Layanan data dan teknologi informasi 0,37 miliar dan
10. Layanan pemantauan evaluasi kinerja sebesar 1,34 miliar.

Demikian yang kami dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dewan Energi Nasional merumuskan kebijakan-kebijakan tentang energi dan termasuk masukan-masukan terhadap kebijakan energi.

Dilanjutkan dengan Kepala BPSDM, dipersilakan.

KEPALA BPSDM KEMENTERIAN ESDM RI (PRAHORO NURTJAHYO):

Baik.

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sehat,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pada kesempatan siang ini untuk BPSDM akan mempresentasikan 2 hal Pak, terkait masalah progres pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024. Untuk tahun 2023 ada 2 hal yang ingin kita sampaikan, yang pertama terkait dengan serapan, kemudian yang kedua terkait dengan kinerja. Kemudian untuk rencana kerja tahun 2024, yang pertama terkait dengan postur anggaran, kemudian terkait juga dengan target kinerja kita di tahun 2024.

Slide 4, realisasi anggaran BPSDM sampai dengan 31 Mei tahun 2023 pagu anggarannya ini totalnya 545 miliar, 41,5%-nya ini dari BLU, sisanya 58,5% dari RM, per tanggal 31 Mei 2023 kita sudah bisa merealisasikan 39% dari total anggaran yang ada pada kami. Jadi ini *slide* ini memberikan gambaran pada kita semuanya, terutama 8 Satker yang ada di BPSDM dengan segala kontribusinya yang semuanya sudah mencapai atau kurang lebih sama seperti yang ditargetkan.

Kemudian terkait dengan kinerja di program tahun 2023, ada 3 hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan diklat masyarakat, kemudian pelatihan dan sertifikasi industri, kemudian terkait juga dengan pendidikan vokasi.

Untuk sebaran peserta diklat masyarakat, diklat masyarakat sendiri ini diberikan kepada masyarakat di daerah penghasil atau mereka yang memiliki potensi di sektor ESDM, kemudian daerah terpencil, terdepan, terluar dan juga rawan bencana.

Target yang diharapkan di tahun 2023 ini ada 2.200 per tanggal 31 Mei ini yang sudah terealisasi 1.621, dengan subsektor migas ada sekitar 877 orang, kemudian sektor *...(suara tidak jelas 1.32.04)...* 284 orang, sementara

sektor geo minerba ada 460 orang, sisanya 579 orang yang peserta diklat akan kita lakukan di bulan Juni sampai akhir tahun ini.

Beberapa contoh diklat yang telah kami lakukan di tahun 2023 berkaitan dengan diklat konversi motor BBM menjadi motor listrik kemudian juga terkait dengan diklat operator tambang bawah tanah, diklat keselamatan dan kesehatan kerja, juga diklat operator pesawat angkat, angkut dan juri ikat beban unit untuk(suara tidak jelas 1.32.38)..

Kinerja program pengembangan ESDM untuk pelatihan dan sertifikasi industri, ini untuk BLU ini kalau kita melihat trennya dari 2 grafik ini yang pertama diklat industri sebelah kiri kemudian sertifikasi kompetensi sebelah kanan. Trennya dari tahun ke tahun naik dan sampai dengan 31 Mei 2023 kita mencapai 10.373 untuk diklat industri dan 10.429 untuk sertifikasi kompetensi. Harapannya pada akhir tahun ini kita bisa mencapai sesuai dengan target yang sudah kita punya.

Kemudian kinerja program untuk pendidikan vokasi per tanggal 31 Mei 2023, Kementerian ESDM mempunyai 2 politeknik, yang pertama Politeknik Energi dan Mineral Akamigas yang ada di Cepu, kemudian juga ada Politeknik Energi dan Pertambangan yang ada di Bandung. Total mahasiswa yang saat ini berada di politeknik BPSDM ESDM totalnya 1.259 dan targetnya akan kita rencanakan juga untuk tahun 2024.

Beberapa prestasi yang sudah dicapai oleh adik-adik kita yang ada di mahasiswa di PEM Akamigas salah satunya menjuarai untuk medali emas dan perunggu untuk Malaysia Technology Award untuk tahun 2023 ini.

Kemudian kinerja program untuk pengembangan di pendidikan vokasi, terkait dengan masalah serapan kelulusan. Slide ini adalah gambaran terkait lulusan yang dikeluarkan oleh teman-teman di PEM Akamigas tahun 2022 kemarin di wisuda Juli tahun 2022 dari 188 mahasiswa yang lulus, 102 udah langsung bisa diterima kerja, kemudian 8 lagi masuk kuliah lanjutan atau magang kemudian sisanya yang saat ini belum terdeteksi dan kami masukkan dalam kategori belum bekerja.

Serapan lulusannya masuk ke beberapa industri khususnya industri hulu, hilir juga industri penunjang. Di hulunya beberapa contoh case-nya ada di Exxon Mobil, di PT Pertamina, kemudian industri hilirnya ada Pertamina Kilang, ada Patra Niaga, kemudian industri penunjang migasnya ada Sucofindo, kemudian ada PT Paswindo,(suara tidak jelas 1.34.58).... Indonesia dan lain-lain.

Kemudian untuk politeknik Bandung, pendidikan vokasi tahun 2022 kemarin diwisuda Agustus tahun 2022 dari 77 orang yang lulus, 57 orang sudah langsung bekerja, kemudian yang langsung melanjutkan kuliah ada sekitar 8 orang dan sisanya saat ini masih belum bekerja dan masih terus aktif untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan untuk lapangan-lapangan pekerjaan.

Kemudian *slide* berikutnya kinerja program pengembangan SDM untuk pengembangan kompetensi ASN, target kita di tahun 2023 ini memperoleh IP ASN senilai 81,15. Saat ini kita masih 76,79 dan ini kita masih ada waktu untuk selama hampir 7 bulan ke depan untuk mengejar ketertinggalan ini dan beberapa program yang saat ini kami siapkan juga.

Kemudian untuk postur anggaran tahun 2024, dibandingkan dengan pagu tahun 2023 komposisi yang ada tahun 2023 totalnya 545,88 miliar, kemudian di tahun 2024 ini 565,23 miliar. Melihat komposisinya di BPSDM ini selain dari RM kalau kita anggap RM yang *men-support* untuk kegiatan operasional yang ada di BPSDM 57,52% dari RM, sementara sisanya 42,4% ini di *support* dari BLU. Kemudian PNBPN-nya sejumlah 270 juta atau sekitar 5% dari total anggaran di tahun 2024 nanti.

Kemudian kalau kita melihat juga komposisi dari jenis belanja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dari 565,23, 38,48 miliar atau 6,81% ini fokusnya akan ke belanja modal dan *most likely* ini akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan untuk revitalisasi peralatan, terutama untuk mengejar perkembangan teknologi yang ada di sektor kita. Dan total anggaran ini, total anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar 119,45 miliar ini sama seperti tahun anggaran tahun 2023.

Next slide, pagu indikatif BPSDM ESDM tahun 2024 totalnya 565 m, dengan komposisi:

- Sekretariat sejumlah 41,2M,
- PPSDM Migas Pusat Pengembangan ESDM Migas ini 177,2M, di mana 119-nya berasal dari BLU,
- PPSDM Geo Minerba totalnya 84,7M, 45M nya berasal dari BLU.
- PPSDM EBTKE totalnya 48,7, 20M-nya berasal dari BLU,
- PPSDM Aparatur 73M, kemudian
- PEM Akamigas 97,3M, di mana 55 miliarnya dari BLU, kemudian
- Balai Diklat Bawah Tanah sejumlah sebesar 21M, kemudian
- Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung 22,15M.

Target kinerja tahun 2024 seperti kita lihat pada *slide* ini diklat masyarakat yang kita *propose* di tahun 2024 dengan total peserta sekitar 2.202 peserta, di mana ini terbagi menjadi 3 subsektor bidang, bidang Migas 1.200, bidang geo minerbanya 742, sementara bidang EBTKE-nya 260 peserta.

Kemudian berkaitan dengan layanan publik nonfisik BPSDM tahun 2024 mentargetkan untuk diklat industri tahun 2024 ada 25.200 peserta, kemudian target sertifikasi industri tahun 2024 targetnya 21.650 peserta, ini terbagi *supporting* dari 3 sub bidang dan migas dan EBTKE, geologi dan mineral batubara.

Kemudian layanan publik nonfisik untuk Politeknik bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga berkaitan ini ada di PEM Akamigas dan PP Bandung. Target untuk tahun 2024 jumlah mahasiswa yang ada 1.040 untuk PEM Akamigas, kemudian untuk PP Bandung tahun 2024 targetnya adalah 300 mahasiswa.

Slide yang terakhir terkait dengan pengembangan SDM ASN Kementerian ESDM tahun anggaran 2024, target kita tahun 2024 IP ASN-nya meningkat jadi 81,15 target tahun 2023 harapannya pada akhir tahun 2024 kita bisa mencapai 83,45.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ternyata banyak sekali *nih* kegiatan BPSDM ini, kalau kita nanti bisa lebih ini misalnya ini ada yang penting sekali diklat konversi motor BBM menjadi motor listrik. Inikan kalau kita setiap anggota nanti bisa menyelenggarakan diklat *kan* sekaligus sosialisasi massal bagi konversi motor BBM menjadi motor listrik.

Coba diutak-atik kalau memang perlu anggaran tapi terkhusus untuk diklat-diklat yang bisa juga dengan masyarakat yang apa, karena memang ada yang spesifik-spesifik ya sifatnya tentang diklat operator apa pesawat angkut, juru ikat beban dan sebagainya saya kira memang itu sangat spesifik. Tapi kalau diklat-diklat yang bersifat umum jadi kita bisa melibatkan masyarakat umum, saya kira nanti kita layak untuk kita cermati bersama.

Selanjutnya dari Kepala Badan Geologi ini, kebetulan namanya Sugeng juga *loh*, kenapa banyak amat nama Sugeng, *kok* kebetulan bentuknya kurang lebih sama-sama juga agak kecil-kecil *gitu loh*, tapi kecil orangnya tapi besar tekadnya *kan gitu*.

KEPALA BADAN GEOLOGI (SUGENG MUJIYANTO):

Baik, terima kasih.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, Kolega kami di Kementerian ESDM, Hadirin sekalian.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua.

Sesuai dengan agenda rapat hari ini mohon kami dapat menyampaikan 3 hal, yang pertama realisasi 2023, kemudian usulan kegiatan 2024 dan yang terakhir adalah penutup, sebelum nanti ditutup oleh kawan kita.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang kami hormati.



Anggaran Badan Geologi sebesar, 2023 sebesar 840 miliar dan ini realisasinya per 31 Mei telah mencapai 23,15%, dengan rincian untuk anggaran:

- Belanja pegawai sebesar 33,27%,
- Belanja barang 29,01% dan
- Belanja modal 8,20%.
-

Secara umum ini masih *on the right track* karena belanja modal ini kita sedang proses pengadaan.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang kami hormati.

Perlu kami sampaikan bahwa capaian penyerapan yang tadi *on the right track*, untuk nanti di akhir tahun target kami sebesar 98,23%. Nah untuk tender paket strategis Badan Geologi berjumlah 33 paket ini sebesar 75,24 miliar ke semuanya telah tayang di Sirup, sampai dengan 31 Mei 2023 sudah terlaksana 18 paket dengan nilai kontrak sebesar 20,67 miliar, 9 paket dalam proses penandatanganan kontrak dan 6 paket masih dalam proses tayang *e-proc*. Sesuai jadwal kami harapkan pada akhir bulan Juni ini sudah selesai semua proses *e-procurement*-nya.

Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota dan hadirin yang kami hormati.

Sesuai dengan misi kami Badan Geologi bertujuan untuk 2 hal, yakni perlindungan *protection* dan juga kesejahteraan masyarakat atau *prosperity* dengan sasaran program strategis, antara lain:

- a. Meningkatnya pelayanan mitigasi kebencanaan geologi, kami mengembangkan sistem mitigasi bencana geologi ini sampai dengan 2023 Bulan Mei ini sudah terealisasi 37 unit dari 157 unit yang kami rencanakan, kemudian
- b. Pembangunan pos pengamatan, pengembangan pos pengamatan di 7 pos pengamatan gunung api masih *on progress* tender, kemudian juga
- c. Pemetaan kawasan bencana geologi dan peta zona kerentanan likuifaksi kami sudah selesaikan 2 dari 21 peta yang kami rencanakan, kemudian
- d. Program strategi untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan lingkungan dan penataan ruang berbasis geologi, kami melakukan pengelolaan lingkungan dan penataan ruang berbasis geologi sebanyak 4 rekomendasi dari 14 rekomendasi yang kami canangkan,
- e. Pemantauan geologi penurunan tanah di kawasan pesisir pantai utara Pantura Jawa dan Jakarta dari total 7 rekomendasi dan 150 titik ini sudah lebih dari 50% apa yang kami canangkan,
- f. Kemudian juga konservasi hidrologi dan pendayagunaan air tanah 8 rekomendasi dari total 27 rekomendasi,
- g. Kemudian rekomendasi ataupun pelayanan izin pengusahaan air tanah mencapai 870 rekomendasi dari target 2.500 rekomendasi yang kami canangkan.



Selanjutnya kegiatan prioritas Badan Geologi tahun anggaran 2023 dengan sasaran, meningkatnya pelayanan data, informasi dan rekomendasi Sumber Daya Mineral batubara dan panas bumi, meliputi survei keprospekan Sumber Daya Mineral sudah mencapai 7 rekomendasi dari 19 rekomendasi yang kami canangkan.

Fokus kegiatan eksplorasi mineral untuk mineral kritis dan LTJ logam tanah jarang yang dapat menjadi bahan baku untuk telepon seluler, komputer, layar monitor dan lain-lain ini banyak aplikasinya untuk *high tech* lainnya. Survei keprospekan sumber daya batubara, gambut dan metana, batubara, gas metan batubara GMB mencapai 3 rekomendasi dari 6 rekomendasi dengan fokus target eksplorasi batubara kalori tinggi dan batubara metalurgi.

Juga survei keprospekan sumber daya dan cadangan panas bumi mencapai 3 rekomendasi dari 6 rekomendasi, dengan fokus penyiapan rekomendasi wilayah kerja dan penyiapan lokasi pengeboran eksplorasi nanti di tahun 2024.

Kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung mendukung portofolio sektor ESDM melalui Direktur Jenderal Minerba, EBTKE maupun Direktorat Jenderal Migas. Kegiatan survei potensi mineral batubara dan panas bumi juga sebagai dasar untuk melengkapi usulan wilayah kerja dan wilayah izin usaha, serta menambah data neraca sumber daya dan cadangan.

Kegiatan prioritas Badan Geologi yang lainnya dengan sasaran meningkatnya pelayanan data sumber daya migas geo sains, warisan geologi dan pusat informasi geologi. Rekomendasi usulan wilayah kerja migas kami berkolaborasi dengan unit-gini di KESDM melalui gugus tugas percepatan penemuan cadangan Migas dan SKK Migas dengan target 8 rekomendasi WK. Kegiatan ini masih berlangsung untuk survei lapangan maupun juga untuk mengolah data.

Untuk penetapan warisan geologi dan pusat informasi geologi yang merupakan amanah dari Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi sampai saat ini sudah terbit 3 penetapan warisan geologi, yakni di Natuna, Wonosobo Banjarnegara dan Tulungagung. Ini sangat penting bagi pengembangan Geopark di berbagai daerah dan pengembangan 10 destinasi prioritas nasional.

Tahun ini juga akan dibangun Pusat Informasi Geologi yang masih dalam proses tender di 3 lokasi, yakni Geopark Nasional Ijen-Jawa Timur, kemudian Geopark Nasional Raja Ampat di Papua dan Geopark Nasional Tambora.

Kegiatan lainnya yang surveinya masih berlangsung yaitu pemetaan bersistem dan bertema, antara lain untuk pemetaan geologis skala 1 banding 50.000 dan pemetaan patahan aktif, serta pemetaan geologi kelautan.

Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota dan hadirin yang kami hormati.



Berikut adalah kegiatan sosialisasi penyebaran informasi terkait kegeologian. Kami merasa sangat berbahagia dan terhormat apabila Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII dapat turut berpartisipasi dan mendukung dalam acara-acara tersebut, sehingga data dan informasi geologi juga terus dapat semakin dekat dan bermanfaat untuk masyarakat.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Kami menginformasikan bahwa baru-baru ini *alhamdulillah* UNESCO telah menetapkan 4 Geopark Nasional menjadi Geopark Global UNESCO, yaitu Geopark Ijen, Maros Pangkep, Merangin Jambi dan Raja Ampat. Ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia yang pada saat ini berarti telah terdapat 10 UNESCO Global Geopark di Indonesia terbanyak di kawasan ASEAN.

Selaras dengan itu hal ini menjadi kegiatan prioritas nasional yang diamanahkan dalam RPJMN. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi VII yang telah memberikan dukungannya selama ini. Itu sementara laporan kami terkait dengan kegiatan 2023.

Berikutnya kami sampaikan usulan anggaran dan kegiatan Badan Geologi tahun 2024, pagu indikatif Badan Geologi berdasarkan pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2024 sebesar 1,265 triliun, dengan rincian sumber pendanaan:

- Rupiah murni sebesar 345 miliar, dan
- PNBPN sebesar 903 miliar, dan
- BLU sebesar 17 miliar.

Berikut adalah besaran usulan pagu indikatif pada tiap Satker di lingkungan Badan Geologi, terlihat 2 yang paling besar di sini adalah Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi ini digunakan untuk pengeboran *slim hole* panas bumi di 2 lokasi, yakni di Kabupaten Solok-Sumatera Barat dan juga Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku. Selain itu untuk PSDMBP ini juga akan melakukan kegiatan survei di Greenville.

Yang kedua, di pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi ini terutama untuk modernisasi mitigasi bencana geologi, sehingga diharapkan nanti untuk bencana yang terkait dengan kegeologian ini bisa seminimal mungkin terjadi korban.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Secara rincian anggaran per jenis belanja dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai sebesar 168 atau sebesar 13,3%,
- b. Belanja barang sebesar 762 miliar atau 60,2%,
- c. Kemudian belanja modal yang sebagian digunakan untuk modernisasi peralatan mitigasi dan pemantauan air tanah, serta renovasi pos pengamatan gunung api serta modernisasi peralatan survei sebesar 334,43 miliar atau 26,5%.

Selain itu Badan Geologi juga memiliki pagu yang bersumber dari belanja PNBK, yang hasilnya masih kecil sekali sekitar 17 miliar. Namun ini akan seiring waktu akan diharapkan akan semakin membesar dan ini juga dari BLU BPSPDL serta 324 juta berupa jasa teknis dari PSDMBK dan PSG.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Sebagai penutup kami sampaikan *summary* usulan rencana kerja 2024 bahwa peningkatan anggaran 2023 ke 2024 ini untuk modernisasi peralatan mitigasi bencana dan pelayanan perizinan perusahaan air tanah, serta *slim hole* dan juga untuk eksplorasi mineral, maupun juga batubara serta panas bumi.

Fokus rencana kerja dan anggaran Badan Geologi adalah untuk peningkatan pelayanan mitigasi bencana geologi, peningkatan eksplorasi mineral, migas, panas bumi serta konservasi lingkungan. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk kegiatan yang terkait masyarakat, penyebarluasan informasi dan pemanfaatan hasil penyelidikan geologi, Badan Geologi selalu siap untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Komisi VII DPR RI.

Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wabillahittaufig wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Geologi ini saya kira kita semuanya mendukung bahwa sumber daya alam kita ini harus terus-menerus di *update* ya sebagai *proven reserve*-nya, P1, P2, P3 saya kira sangat tergantung juga dari salah satunya adalah bagaimana Geologi melakukan eksplorasi dan penelitian survei-survei, tapi memang tadi diajak saya beberapa waktu lalu berkunjung ke ternyata jauh sekali ini, kadang-kadang secara fisik kerja-kerja Geologi ini di daerah-daerah gunung dan sebagainya, sebagainya. Saya kira nanti ada program-program yang bisa disosialisasikan bersama dengan masyarakat dengan melibatkan Komisi VII.

Selanjutnya setelah Geologi apa ini, BPH ya, BPH menyangkut tentang solar ya bagaimana pengawasan dan seterusnya, seterusnya, solar subsidi, tidak subsidi, BBM subsidi dan sebagainya.

Dipersilakan yang terhormat.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Baik, terima kasih Pimpinan.



Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang saya hormati Bapak-Ibu pejabat di lingkungan Kementerian ESDM,
Hadirin sekalian.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Sesuai agenda RDP pada hari ini kami akan menyampaikan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 dan RKAKL tahun 2024. Pertama-tama saya sampaikan postur anggaran BPH Migas tahun 2023, total anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp211,22 miliar yang seluruhnya bersumber dari PNBP. Pagu ini turun sebesar 17,53% dari tahun 2022 sebesar Rp256,14 miliar.

Adapun postur anggaran per jenis belanja adalah alokasi untuk:

- Belanja pegawai sebesar Rp42,09 miliar,
- Belanja barang sebesar Rp164,82 miliar dan
- Belanja modal sebesar Rp4,31 miliar.

Berdasarkan pemanfaatannya, anggaran BPH Migas tahun 2023 dibagi menjadi 2 kategori, yaitu.

Untuk publik nonfisik dengan total anggaran Rp107,78 miliar, yang meliputi pengaturan, penetapan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp38,97 miliar. Pengaturan, penetapan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui pipa sebesar Rp19,31 miliar. Pelayanan publik kepada badan usaha Rp5,87 miliar dan rekonsiliasi iuran badan usaha, pelayanan kehumasan, pertimbangan hukum, data dan informasi sebesar Rp43,61 miliar.

Kategori pemanfaatannya kedua yaitu pelayanan internal dengan total anggaran Rp103,44 miliar, meliputi gaji dan tunjangan sebesar Rp42,09 miliar, operasional dan pemeliharaan kantor Rp41,23 miliar, penguatan kapasitas SDM internal Rp2,13 miliar dan layanan dukungan manajemen internal sebesar Rp17,98 miliar.

Bapak-Ibu sekalian.

Adapun realisasi anggaran BPH Migas sampai bulan Mei 2023 adalah sebesar Rp63,67 miliar atau 30,14% dari pagu anggaran tahun 2023. Realisasi ini telah melampaui target yang telah ditetapkan untuk bulan Mei yaitu sebesar Rp58,76 miliar atau 27,82% dari pagu anggaran.

Untuk kegiatan publik nonfisik pada BPH Migas terbagi dalam 3 bidang yaitu BBM, gas bumi dan dukungan pelaksanaan tugas fungsi. Adapun realisasi untuk status 31 Mei, sebagai berikut:

- a. Untuk bidang BBM: layanan pengaturan BBM mencapai 19,83%, layanan pengawasan BBM realisasi 27,42%, layanan pemantauan cadangan dan pengelolaan informasi BBM realisasi sebesar 13,55%.

- b. Kemudian untuk bidang gas bumi, untuk layanan pengaturan pemanfaatan fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa mencapai 29,49%, untuk layanan pengaturan akun tarif dan harga gas bumi melalui pipa realisasi 26,48%, layanan pengawasan dan pengelolaan informasi gas bumi melalui pipa realisasi 24,06%.
- c. Untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi layanan iuran realisasi 39,95%, layanan publik kepada badan usaha realisasi 14,70%, layanan data dan informasi realisasi 49,30%, layanan hukum dan humas termasuk sinergitas dan sosialisasi bersama Komisi VII DPR RI realisasi sebesar 38%.

Untuk kegiatan pelayanan internal atau program dukungan manajemen BPH Migas, realisasi meliputi:

1. Layanan sarana dan prasarana, layanan sarana internal dengan pagu anggaran Rp4,30 miliar, saat ini masih dalam tahap pengadaan jasa konsultan untuk perencanaan *re-design* lantai 3 gedung BPH Migas.
2. Untuk layanan manajemen SDM internal telah terealisasi sebesar 15,05%. Kemudian layanan manajemen kinerja, layanan perencanaan dan penganggaran dengan pagu anggaran 2,71 miliar telah terealisasi 41,93 miliar.
3. Untuk layanan pemantauan dan evaluasi telah terealisasi 29,66 miliar.
4. Untuk layanan dukungan manajemen kinerja, layanan organisasi dan tata kelola internal telah terealisasi 61,23%, layanan kerumahtanggaan terealisasi 21,30% dan layanan perkantoran 31,85%.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Sesuai dengan tugas fungsi sebagai badan pengatur BPH Migas memiliki beberapa program yang berdampak langsung kepada masyarakat, salah satunya yaitu kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan Komisi VII. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mengenalkan BPH Migas kepada masyarakat dan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat terkait kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM maupun pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.

Adapun program berdampak langsung kepada masyarakat di tahun 2023, meliputi:

- Sinergitas BPH Migas dengan DPR RI yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah,
- Kemudian sosialisasi pada konsumen pengguna BBM juga dilaksanakan di berbagai wilayah,
- Kemudian BPH Migas *goes to campus* ini akan dilaksanakan di Kalimantan Barat dan Jawa Tengah, kemudian supervisi progres pembangunan penyalur BBM satu harga tahun 2023 di 89 lokasi. Pengawasan pelaksanaan BBM satu harga yang dilaksanakan di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, NTT, NTB, Papua, Papua Barat serta beberapa wilayah lain.



- Kemudian untuk pengaturan dan penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dilaksanakan di Jawa Barat, khususnya di kota Bogor, Bekasi dan Cirebon.
- Kemudian bimbingan teknis atau *workshop* sistem instrumentasi pada fasilitas *custody transfer* dilaksanakan di Jawa Barat, khususnya di Kota Cirebon dan di Kota Surabaya.
- Kemudian layanan umum masyarakat melalui Diklat dan sertifikasi operator dan pengawas SPBU, dilaksanakan di Provinsi Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR yang kami hormati.

Untuk progres kinerja BPH Migas sampai dengan bulan Mei 2023, sebagai berikut; untuk PNPB BPH Migas sebesar Rp558,14 miliar atau mencapai 64,57% dari target sebesar Rp864,42 triliun. BBM 1 harga kumulatif telah terbangun 443 penyalur, pada tahun 2023 telah beroperasi 20 penyalur dari target 89 penyalur dan selebihnya masih dalam proses.

Minyak solar yang telah tersalurkan 6,96 juta KL atau 40,92% dari kuota 17 juta KL. Minyak tanah telah tersalurkan 0,204 juta KL atau 40,94% dari kuota 0,50 juta KL. Pertalite telah tersalurkan sebanyak 12,35 juta KL atau 37,94% dari kuota 32,56 juta KL.

Untuk tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa secara kumulatif telah ditetapkan sebanyak 75 ruas dan pada tahun 2023 telah ditetapkan target tarif untuk 2 ruas pengangkutan gas bumi dan telah terealisasi 2 ruas. Penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil secara kumulatif sebanyak 67 kabupaten kota dan 1 provinsi dan pada tahun 2023 telah dilakukan penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di 4 kabupaten kota.

Untuk infrastruktur gas bumi melalui pipa telah tercatat sepanjang 21.425,60 kilometer dari target 21.900 kilometer, yang terdiri dari pipa transmisi sepanjang 5.299,36 kilometer, pipa distribusi 6.169,48 kilometer dan pipa Jargas sepanjang 9.956,76 kilometer.

Demikian untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan berikutnya akan kami sampaikan usulan anggaran untuk tahun 2024. Pagu indikatif BPH Migas pada tahun 2024 adalah sebesar Rp231,16 miliar, yang terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp44,39 miliar,
- Belanja barang Rp183,60 miliar, dan
- Belanja modal sebesar Rp3,17 miliar.

Pagu anggaran ini naik sebesar 9,44% dari pagu anggaran tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp211,22 miliar. Kenaikan pagu anggaran tahun 2024 dibandingkan 2023, diantaranya adalah penambahan PPPK pegawai dengan perjanjian kerja pada belanja pegawai, kemudian adanya penambahan rincian *output* atau belanja barang dan adanya pengembangan organisasi dan peningkatan kegiatan advokasi hukum dalam rangka pengawasan.

Adapun postur anggaran BPH Migas berdasarkan jenis belanja:

- a. Belanja pegawai pagu 44,39 miliar atau 19%,
- b. Kemudian belanja barang dengan pagu 183,59 miliar atau 80%,
- c. Kemudian belanja modal dengan pagu Rp3,17 miliar atau 1%.

Sedangkan anggaran BPH Migas berdasarkan program, terdiri dari:

1. Program energi dan ketenagalistrikan dengan pagu Rp62,01 miliar atau 27%, yang tersebar pada Direktorat BBM dan Direktorat Gas Bumi.
2. Kemudian dukungan manajemen dengan pagu Rp169,15 miliar atau 73% dialokasikan untuk Sekretariat BPH Migas, Direktorat BBM dan Direktorat Gas Bumi.

Berdasarkan penggunaan anggaran, maka anggaran BPH Migas 2024 digunakan untuk:

- Belanja gaji pegawai dengan pagu Rp44,39 miliar,
- Kemudian belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan pagu Rp47,69 miliar,
- Kemudian belanja non-operasional atau pelayanan organisasi dan pelayanan publik dengan pagu Rp139,07 miliar, tersebar pada Sekretariat Direktorat BBM dan Direktorat Gas Bumi.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Program prioritas nasional BPH Migas tahun 2024, terdiri dari kegiatan layanan pengawasan pelaksanaan BBM satu harga dengan target 512 penyalur yang telah terbangun secara kumulatif dengan anggaran Rp4,01 miliar, serta kegiatan layanan supervisi pembangunan penyalur BBM satu harga dengan target 71 penyalur dan anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

Target kinerja utama BPH Migas tahun 2024, terdiri daripada:

- a. Bidang BBM yaitu jumlah kumulatif penyalur BBM satu harga di daerah 3T dengan target total kumulatif 583 penyalur, kemudian presentasi penyaluran JBT dan JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha dengan target 100%.
- b. Bidang gas bumi, pelayanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi kumulatif target 21.950 kilometer, volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan target 1,50 miliar mmscfd, tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa dengan target penetapan untuk 2 ruas, penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan target penetapan 4 kabupaten kota serta target PNBK BPH Migas sebesar Rp925,75 miliar.

Adapun program yang berdampak langsung kepada masyarakat pada tahun 2024 dialokasikan dengan anggaran Rp28,39 miliar, dengan kegiatan yang kurang lebih sama dengan di 2023 yaitu sinergitas BPH Migas dengan stakeholder atau dengan Komisi VII, kemudian seminar umum kebijakan hilir Migas, kemudian BPH Migas *goes to campus*, kemudian supervisi program pembangunan penyalur BBM satu harga dan pengawasan pelaksanaan BBM

satu harga di beberapa wilayah, serta pengaturan dan penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di beberapa kabupaten.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Demikian yang kami usulkan untuk anggaran di tahun 2024.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BPH Migas ini yang mengawasi di sektor hilir. Selanjutnya.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, sedikit.

Ini BPH Migas anggarannya terlalu kecil ini, padahal pekerjaannya luas mengawasi distribusi BBM, khususnya bersubsidi.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya makanya itu nanti selanjutnya kita bahas, kita naikkan, semuanya nanti kita naikkan nanti betul.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Perlu dinaikkan soalnya Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Ramson.

Selanjutnya bahkan tadi merencanakan naik gaji *kan* kita lihat, ini harus naik juga.

F-GOLKAR(DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan, dinaikkan dengan catatan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Dengan catatan, betul.

Kepala BPM Aceh dipersilakan.

WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII (MAMAN ABDURRAHMAN,S.T./F-PG):

Sebentar, izin Pimpinan, interupsi sedikit.

Sebelum tadi menyambut yang disampaikan oleh Pak Ramson, saya ini dalam setiap presentasi RKAKL bisa *nggak* Pak nanti sambil disiapkan oleh tim Sekretariat ESDM, PNBK Kementerian ESDM. Jadi tolong coba dibuatin, tampilkan di kita, karena begini, misalnya *nih* kita mau respon mau ikut mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ramson, BPH Migas naik, DEN naik, Bageol tergantung, becanda Pak, mau naik tapi duitnya dari mana *kan* begitu Pak.

Kalau berdasarkan presentasi pemaparan yang disampaikan oleh teman-teman ESDM kan kita *nggak* mendapatkan gambaran itu, *nah* maksud saya ini *nggak* apa-apa rapat kita lanjut tapi tolong minta tolong timnya dari ESDM dibuatin aja komparasi pendapatan PNBK kita selama 3 tahun terakhir itu berapa *gitu loh*.

Nah dari situ *kan* enak kita justifikasinya, kita bisa teriak-teriak ngomong ke mana-mana. Ini kenapa ESDM ngasih sumbangan PNBK sekian tapi anggaran cuman sekian, memang bedanya apa ESDM dengan Kementerian Keuangan *kan* begitu. Kementerian Keuangan sampai 30 triliun lebih, ESDM cuma 6 triliun tapi juga ikut menyumbang pendapatan negara.

Artinya maksud saya, saya minta tolong itu aja Pimpinan. Jadi ini biar saja **sambil** ini berjalan tapi tolong nanti **disiapin** nanti dikasih ke kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak Maman.

Luar biasa memang Pak Maman kalau datang dengan inspirasi-inspirasi baru dan memang betul *kan toh* memang cara kelembagaan PNBK itu disumbang terbesar dari Kementerian ESDM, dari tahap pertambangan, migas dan seterusnya.

Jadi betul nanti masing-masing kedirjenan menyampaikan juga PNBK yang disumbangkan bagi negara, sehingga ada *reasoning*-nya kalau kita menambah anggaran misalnya. Saya lihat misalnya Dirjen Migas minta 5 triliun

lebih *kan* begitu, nanti *kan* bisa dikemukakan bahwa PNBPN dari Dirjen Migas sekian triliun dan seterusnya-seterusnya, saya kira betul.

Dilanjutkan kepala BPMA.

KEPALA BPM ACEH (TEUKU MOHAMAD FAISAL) :

Terima kasih, Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak-Ibu Ketua, serta Anggota Komisi VII DPR RI, Yang kami hormati Bapak Sekjen ESDM dan Bapak Pimpinan Eselon 1, sekaligus Eselon 2 di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, serta para hadirin sekalian.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas kesempatan yang Bapak-Ibu berikan kepada kami BPMA untuk menyampaikan paparan dalam rapat dengar pendapat pada hari berbahagia ini. Hari ini sore izinkan kami menyampaikan progres kinerja tahun berjalan dan rencana kerja anggaran tahun 2024.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Pada kesempatan ini poin pertama yang akan kami paparkan terkait *update* progres pelaksanaan dari kegiatan anggaran tahun anggaran 2023 selanjutnya rencana kerja dan anggaran dari BPMA tahun anggaran tahun 2024. Selanjutnya kinerja hulu Migas Aceh di tahun 2023, Bapak-Ibu Pimpinan, Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Kinerja produksi migas di Aceh hingga akhir Mei tahun 2023 ini sebesar 96% dari target yang sudah diamanahkan kepada kami BPMA yang disebabkan oleh tidak tercapainya 100% hingga Mei 2023 ini karena ada operasional *unplanned shutdown* yang menjadi *concern* sebesar di wilayah kami Aceh karena fasilitas sudah berumur. Sehingga menyebabkan menurunnya integritas dari fasilitas di Kilang Arun di poin B di Lhokseumawe Aceh Utara.

Selanjutnya dari sisi kontribusi penerimaan negara sebesar 38% ini masih berproses dan masih *on the track*, kami berkomitmen pada semester 1 ini dapat meningkatkan capaian *lifting* yang ber-*impact* pada penerimaan negara.

Selanjutnya terkait *lifting cost*, dari target 17 juta US dolar barel oil ekuivalen capaian hingga awal Juni ini sebesar 127%. Ini berbanding lurus dengan investasi yang besar di wilayah kerja B yang saat ini dioperatori oleh PT Timah Global Energi.

Selanjutnya terkait komitmen TKDN di wilayah Aceh meningkat sebesar 107%, di mana capaian ini merupakan 65,14% dari target sebesar 61% yang dicanangkan di tahun 2023 dengan total pengadaan 10,91 juta US dolar.



Berikutnya investasi eksplorasi dan eksploitasi, dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Komisi VII bahwa terdapat 4 kontraktor kerjasama eksploitasi dengan nilai investasi sebesar 19,85 juta US dolar, serta kontraktor eksplorasi tersebut **...(suara tidak jelas 2.17.16)...** yang mempunyai investasi sebesar 1 juta US dolar dan 2 kontraktor kerjasama lainnya, yaitu Onwa Pte Limited dan Oswa Pte Limited, yang baru saja kita dapatkan kontraknya untuk wilayah Aceh per Januari 2023.

Selanjutnya Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati. Tahun 2023 ini terkait realisasi anggaran BPMA sebesar 78,9 miliar yang bersumber dari rupiah murni dan mendapatkan tambahan dari PNBP Migas sebesar Rp805 juta, di mana hal tersebut terdiri dari 71% belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Seperti yang di dalam kami perhatikan di pagu anggaran BPMA tahun anggaran 2023 grafik tersebut di atas merupakan capaian belanja kami hingga akhir bulan Mei tahun 2023, dengan deviasi kurang dari 2,15%. Kami optimis bahwa beberapa bulan ke depan realisasi serapan anggaran dapat kami maksimalkan.

Perlu juga kami sampaikan bahwa dalam pagu anggaran BPMA tahun 2023 terdapat 7 buah paket tender dan *alhamdulillah* seluruh ke-7-nya telah selesai dilakukan penandatanganan kontrak.

Selanjutnya rencana kerja untuk tahun 2024.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Target daripada produksi minyak gas bumi di Aceh tahun 2024 kami proyeksikan sebesar 17.405 barel oil ekuivalen per hari. Target tersebut sejalan dengan hasil pembahasan rencana kerja dengan kontrak kerjasama di Aceh melalui **...(suara tidak jelas 2.19.04)...** Prognosa dari penerimaan negara di tahun 2024 sebesar 18,56 juta US dolar, hal yang sama juga terkait TKDN di tahun 2024 sebesar 17,14 US dolar per barel oil ekuivalen.

Selanjutnya rencana kerja BPMA tahun 2024, untuk *insident rate* di mana kecelakaan kerja pada sektor hulu migas sebesar 1,5 fraksi seiring dengan meningkatnya aktivitas kontraktor selama di Aceh. Hal tersebut juga berdampak pada nilai SAKIP dan IKMA BPMA yaitu masing-masing dengan nilai skor 75 dan 94.

Selanjutnya pagu indikatif di tahun 2024.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Pada tahun 2024 BPMA seperti disampaikan oleh Pak Menteri kemarin untuk pagu indikatif BPMA itu sama dengan anggaran tahun 2023, yaitu sebesar 78.927.564.000 milyar.



Yang kami hormati Bapak-Ibu Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota Komisi VII DPR RI.

Demikian pemaparan kami dari Badan Pengelola Migas Aceh, dukungan dan masukan dari Bapak-Ibu yang terhormat sangat kami harapkan, sehingga kami tetap terus meningkatkan pendapatan negara di sektor hulu migas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Aceh.

*Hadanallah waiyyakum ajma'in,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi BPH Migas mencatat kemajuan-kemajuan yang luar biasa, baik penerimaan negara, tingkat kandungan dalam negeri mencapai 59%, saya kira *appreciate*. Dan saya lihat semuanya Kementerian ESDM ini kalau kita lihat dan bagaimana pelaksanaan di tahun 2023, meskipun hari ini belum habis tahun anggarannya tapi saya cukup membahagiakanlah, Dirjen Minerba juga demikian karena komoditas-komoditas itulah yang sekarang menjadi penyangga utama bagi sektor ekonomi kita.

Demikian juga sektor migas, meskipun kalau kita lihat dari target *lifting* dan sebagainya terus turun, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama karena apapun nanti ujung dari ujung dalam penyusunan anggaran, kami-kami ini nanti akan berhadapan dengan, *lah* kalau *lifting* turun *kok* mau naik *gitu kan* istilahnya, APBN-nya misalnya di *cost recovery* dan ini mohon menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kinerja ini menjadi penting bagaimana realisasi di tahun 2023 sekaligus menjadi barometer bagi nanti APBN di tahun 2024.

Saya kira cukup kita mau skor dulu atau kita, *oh iya* Ditjen EBTKE ya ini karena merangkap saya *kok* lihat tadi gajinya juga dirangkap-rangkap Pak, ini penting juga kita tahu.

Dipersilakan Pak Dirjen EBTKE, saya kira EBTKE punya pekerjaan rumah bersama ya kita, dari Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan.

Dipersilakan Pak.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Ibu Pimpinan, Anggota yang kami hormati.



Saya lanjutkan paparannya untuk yang terkait dengan pelaksanaan kinerja 2023 dan rencana kerja 2024 dari Direktorat Jenderal EBTKE, yang pertama yang ingin kami *highlight* di sini adalah terkait PNB. Tadi Pak Maman menyampaikan untuk yang ESDM sebetulnya cari panas bumi pun sudah menghasilkan Pak Ketua, jadi dari panas bumi pun tahu lalu kita menyeter 2,3 triliun untuk PNB, tahun ini targetnya 2,1 dan realisasi sudah 405 miliar.

Kemudian target-target yang lain adalah penurunan intensitas *final* ini kaitannya dengan penghematan energi, kemudian yang berikutnya adalah penurunan emisi gas rumah kaca termasuk tentunya bagaimana meningkatkan investasi EBT. Untuk penurunan emisi gas rumah kaca sampai saat ini kami masih *on track* untuk menuju penurunan emisi 31,9% di tahun 2030 dibandingkan dengan *business as usual*. Jadi tahun ini targetnya adalah terjadi penurunan 116 juta ton emisi CO₂.

Kemudian capaian kinerja yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, jadi ada berapa yang berapa kegiatan yang sedang sekarang berjalan, misalkan untuk kegiatan PJUTS, proses pengadaan untuk 20.607 unit sudah selesai, sekarang dalam proses sudah berkontrak dalam persiapan untuk dimobilisasi ke lapangan. Kami masih menyelesaikan untuk sisanya sekitar 11.000 yang sekarang masih dalam proses pembukaan blokirnya.

Kemudian kegiatan Apdal, inipun pengadaannya sudah selesai. Ini khusus dilakukan di wilayah-wilayah yang cukup sulit di Papua, sehingga dalam proses pelaksanaannya kami bekerja sama dengan pihak TNI bersama dukungan dari PLN. Kemudian PLTS terpadu, ini merupakan usulan dari Komisi VII untuk menggeser anggaran PLTS atap di 2023 ini menjadi PLTS terpadu dan kami lakukan di 10 lokasi dan sekarang sudah selesai pengadaannya.

Kemudian PLTMA dibangun di satu lokasi sekarang di 2023 dan juga kami melakukan konversi motor listrik, ada dua kelompok yang kami lakukan. Pertama adalah yang memang pendanaan dari APBN *full* targetnya 350 motor, kemudian juga ada yang sifatnya insentif atau bantuan pemerintah untuk konversi motor listrik untuk 50.000 unit dan sampai sekarang baru ada 318 peserta yang mendaftar.

Kemudian terkait dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Mei, dari target 11,64% kami telah merealisasikan 12,09% baik itu di belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Kemudian terkait dengan proses pengadaan di kami di Ditjen EBTKE ada 23 paket Pak Pimpinan dengan nilai total 854 miliar dan sekarang sudah berkontrak 13 paket, dalam proses tender ada 2 paket dan sudah berkontrak tapi melalui proses tender ini 8 paket dengan total 588,57 miliar.

Terkait dengan usulan 2024 jadi kami ingin sampaikan di sini kira-kira perbandingan dari anggaran yang dalam 2 tahun terakhir di Ditjen EBTKE 2022 ada 781 miliar, 2023 Rp1,3 triliun Pak Pimpinan dan di 2024 sebetulnya angkanya itu kalau melihat realisasi yang sebelumnya kira-kira angkanya itu

barangkali di angka 862, tapi yang ada dalam pagu indikatif kami adalah 448 miliar.

Sehingga kalau berdasarkan dari penerima manfaat, dari 448 miliar tersebut 54,1% atau 242 miliar itu akan dipergunakan untuk kegiatan publik fisik. Kemudian 16% untuk publik nonfisik dan sisanya adalah untuk aparatur.

Apabila dilihat dari unit Eselon 2:

1. Sekretariat Ditjen sebesar 109,3 miliar,
2. Kemudian Direktorat Bio Energi 11,5 miliar,
3. Direktorat Aneka Energi Baru Energi Terbarukan 10,16 miliar,
4. Direktorat Konservasi Energi 14,86 miliar,
5. Direktorat Panas Bumi 17,5 miliar,
6. Direktorat Rembang Infrastruktur ini yang melakukan pembangunan infrastruktur 242,63 miliar dan
7. Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE, termasuk juga anggaran yang sumbernya dari BLU 42,6 miliar.

Jadi apabila dilihat di sini perbandingan antara 2022 dan 2023, kemudian juga 2024 memang terjadi penurunan untuk yang ada di pagu indikatif 2024. Terkait dengan rencana pelayanan publik fisik EBTKE tahun anggaran 2024, kami merencanakan untuk membangun PLTS terpadu di daerah 3 T sebanyak 11 unit, dengan total anggaran 114,5 miliar, kemudian PLTMH 5 unit 63,9 miliar berlokasi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku Utara dan Papua.

Kemudian membangun PLT hydro yang sedikit agak besar berlokasi di Papua dan kami mengusulkan ini sebagai *multiyears* atau tahun jamak. Kami juga akan melakukan revitalisasi memperbaiki beberapa unit yang ada kerusakan di lapangan, ada 5 lokasi yang kami targetkan dengan total anggaran hampir 20 miliar.

Adapun usulan kegiatan yang belum teranggarkan, yang pertama adalah insentif konversi motor BBM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, jadi tahun 2024 ditetapkan 150.000 unit untuk konversi. Jadi kalau per sekarang insentifnya adalah 7 juta per kendaraan, sehingga diperlukan 1,05 triliun untuk 2024. Kami pun mengusulkan PLTS Atap sebanyak 148 unit dengan total anggaran 98 miliar, termasuk juga untuk anggaran PJUTS yang untuk di 2024 belum dianggarkan.

Saya kira demikian Pak Pimpinan dari Dirjen EBTKE.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Nah tadi ada konversi motor listrik, mobil listrik, saya kira nanti perlu anggarannya diperjelas supaya tidak terjadi *dispute* di masyarakat karena *kan*

kita mau mengurangi emisi, tapi faktanya mobil listrik itu juga masih makan emisi karena apa? Ya listriknya diproduksi dari fosil.

Coba nanti kita secara integratif holistik itu kita bisa berpikir yang lebih komprehensif *lah*, jadi kita juga secara bersama-sama harus terus-menerus menekan luncuran karbon khususnya di listrik Pak Dadan ya, termasuk bagaimana bio fuel juga kita tingkatkan.

Inilah perlunya Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan, saya kira kita secara bersama-sama kita punya komitmen bersama agar segera, iya ini *kok* sepi-sepi saja energi baru terbarukan karena Pak Maman *kok* agak sepi *gitu loh*, kalau Pak Maman nggak bergerak kita semuanya berat juga di energi baru terbarukan.

Saya kira demikian, mari kita cermati sebagaimana tadi telah disampaikan secara keseluruhan oleh masing-masing dirjen dan lembaga, apa yang telah dilakukan tahun 2023 dengan total anggaran di ESDM itu waktu itu adalah 5,5 triliun dan sekarang sudah 6,7 triliun pagu indikatifnya. Meskipun Kementerian ESDM secara total mengajukan kurang lebih 15 triliun, *nah* di sinilah ruang kita untuk diskusi untuk apa dan tadi sudah dijelaskan sama Pak Maman Pimpinan, bahwa coba kita ungkap juga *asbabun nuzul*-nya anggaran itu *kan* salah satunya adalah pendapatan.

Jadi kalau di Kementerian ini pendapatannya, PNBPNya cukup besar saya kira nanti bisa menjadi bahan pertimbangan utama, kalau kita mau meningkatkan kapasitas kelembagaan di Kementerian ESDM ini dengan berbagai program-program yang ada, dengan konsekuensi logisnya adalah *budget* yang ada juga.

Saya kira demikian.

WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII (MAMAN ABDURRAHMAN,S.T/F-PG):

Pak Pimpinan, boleh sekalian dipresentasiin saya yakin sudah ada *tuh* biar kita lihat juga.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Izin Pak Pimpinan, menyampaikan.

Terima kasih Pak Maman.

Kami sampaikan angka-angkanya untuk yang 3-4 tahun terakhir, terkait dengan PNBPNya untuk sektor ESDM jadi ada 4 kelompok untuk PNBPNya. Pertama adalah PNBPNya Migas, kemudian PNBPNya dari Minerba, PNBPNya dari EBTKE dan lainnya. Ini lainnya ini terkait dengan sewa misalkan aset-aset yang ada dimiliki oleh Kementerian ESDM. Jadi apabila dilihat dalam 3-4 empat tahun terakhir, 2019 PNBPNya dari sektor ESDM 181 triliun, kemudian 2020, 109 triliun ini kontraksi memang karena awal dari Covid-19.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar Pak, agak panas ini Pak kursinya Pak.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Kami lanjutkan untuk 2021 terjadi memang karena basisnya komoditas, terjadi perbaikan dari sisi harga mulai 2021 sehingga PNBP dari sektor ESDM khususnya yang dari Migas dan minerba ini mengalami kenaikan luar biasa. Sehingga realisasinya 184 miliar lebih besar daripada saat sebelum Covid di 2019.

Kemudian di 2022 secara total adalah 351 triliun, 148 triliun dari migas, 183 triliun dari minerba, 2,3 triliun dari panas bumi dan 17 kombinasi dari seluruh pendapatan PNBP yang ada di ESDM. Jadi secara angka memang sangat baik untuk yang tahun 2022.

Untuk 2023 kami menargetkan 219 triliun Pimpinan, 131 triliun dari migas, 85,2 triliun dari minerba, 1,2 triliun dari EBTKE dan sekarang per akhir Mei realisasinya adalah 125,79 triliun.

Demikian.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Artinya, mohon izin Pak Ketua saya ganti supir dulu. Jadi memang kalau urusan ngais-ngais duit kayaknya saya lebih jago Pak.

Nggak, kenapa ini menjadi penting untuk lihat oleh semua teman-teman Komisi VII dan kita stakeholder ESDM, artinya *kan* inilah proporsi ataupun *prognosa* pendapatan negara dari sektor ESDM *gitu loh*. Kita asumsikan saya pakai yang realisasi 2022 aja dulu ya, kita 351 triliun ya *gitu* Pak ya, betul ya. Jadi angka 351 triliun, walaupun memang *debatable* juga, ada yang mengatakan angka kenaikan 351 triliun itu lebih dikarenakan ada peningkatan harga komoditas mineral batubara, saya setuju 100% itu.

Nah lalu ada yang nanya juga, jadi Pak Maman itu bukan karena kinerja institusi *kan* begitu Pak. Ya saya bilang, ya justru itu kita mau meningkatkan kinerja institusi ya harus dinaikkan anggarannya biar lebih produktif *gitu lah* kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita *support* dengan penguatan kinerja institusinya, saya yakin ini bisa lebih dari 351 triliun, saya bilang, betul dong Pak, *kan* Pak iya Pak ya, kayaknya *kok* ESDM *nggak pede* *gitu* Pak.

Jadi maksud saya bener *dong* Pak, jadi seharusnya kalau kita bantu dengan peningkatan anggaran, seharusnya logikanya seharusnya pendapatan

2024 dari PNBPN itu seharusnya bisa lebih dari 351 triliun *gitu*. Itu dalam benak logika saya, kenapa saya harus tekankan ini? Kita ini disaksikan Pak oleh teman-teman media ini, Pak. Jadi maksud saya teman-teman media, publik juga harus melihat, jangan hanya sekedar meneropong dari nilai anggaran yang tiap tahun, tapi juga harus diteropong juga dari pendapatan negara juga.

Artinya sektor ESDM menyumbang 351 triliun, tapi saya berharap Pak jangan lumayan besar ini pendapatannya ESDM jadi ngikut-ngikut kayak si siapa *tuh* yang Rubicon, Rubicon, Pak, *nggak* karena kalau saya juga merasa begini ini *kan* buat kritikan juga di beberapa institusi yang lainnya.

Pada saat diberikan kemewahan anggaran, fasilitas anggaran yang sangat luar biasa ternyata tidak berbanding lurus juga *kan* dengan kinerja teman-teman di sana. Artinya apa? Kami dari Komisi VII juga berharap dan berkepentingan kita *kan* sama-sama memperjuangkan untuk mendorong peningkatan anggaran dalam rangka Pak, ini menjadi catatan ya, dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian ESDM.

Catatannya itu Pak, jadi peningkatan anggaran itu jangan cuma sekedar mengejar peningkatan anggaran. Harapan kita peningkatan anggaran itu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Kementerian ESDM yang hari ini dari sektor pendapatan negara telah menyumbang kurang lebih 351 triliun, iya 2022.

Kalau tahun 2023 kira-kira prediksinya berapa Pak Dadan.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Kalau pakai matematika Pak, *kan* sekarang 125, 125 kali 12 dibagi 5 *lah* kira-kira seperti itu ya. Jadi angkanya 280.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kok lebih turun, Pak.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Karena ini *kan* ada kombinasi antara produksi dan harga Pak, harga minyak sekarang *kan* 76.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Artinya fluktuatif ya.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):



Iya, tapi secara produksi *kan* batubaranya naik Pak dan mineral yang lain juga naik.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya itu yang saya bilang, harus segera cepat itu Pak NIP itu Pak, segera direalisasikan supaya kita semakin imbang itu, semakin cepat lagi, pendapatannya semakin ini.

Jadi saya pikir ini, berarti tolong dibagikan ke kita-kita ya Pak, biar ini menjadi gambaran kita dan nanti masuk juga dalam kesimpulan kita pada saat kita menyetujui ataupun menerima, *sorry*, saya belum masuk pada konteks menerima tapi kita, *eh* menyetujui, tapi kita menerima pengajuan anggaran dari Bapak-Bapak dari Kementerian ESDM.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Izin Pimpinan, menambahkan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silahkan Pak Mul.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Izin Pimpinan, menambahkan logika Pimpinan bahwa hal-hal yang menjadi penting sebagai logika kita untuk mendorong peningkatan anggaran, menurut saya ada 2. Yang pertama adalah bisa itu yang pertama atau yang kedua, yakni terkait PNBP. Yang pertama adalah penurunan defisit transaksi berjalan sektor migas, kalau defisit bisa kita tekan dengan berbagai program yang kita lakukan menunjukkan kinerja tinggi, rupiahnya *kan* turun pemborosan kita.

PNBP yang kedua, pemasukan negara tinggi kalau sekarang saya hitung memang kalau kita lihat angkanya hampir 100 triliun turunnya ya itu faktor harga juga yang dominan, tapi kalau produksi apakah bisa ditingkatkan. Ya *wallahu 'alam* ya mungkin selain batubara saya setuju ditingkatkan.

Namun harus dipastikan PNBP atau yang bersifat *royalti progresif*, itu yang menurut saya. Ini harga tinggi *kan flat* pada angka 90 US dolar per barel, kalau progresif wah itu akan lebih tinggi lagi pendapatannya. Upaya-upaya seperti ini, inovasi seperti itu yang bisa mendorong lagi, ini harus kreatif.

Itu Pimpinan, tambahan saja.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, terima kasih Pak Mul.

Maaf saya mempunyai ada yang, mumpung saya ingat ini buat teman-teman di Ditjen Minerba, Pak. Saya berharap itu sebetulnya waktu itu teman-teman Dtrjen Minerba itu membangun sebuah sistem IT terintegrasi, kalau sekarang *kan* masih terpisah-pisahkan antara OSS lah **MOMI lah**, ini segala macam *gitu*. Nah kalau *nggak* salah saya pernah diskusi dengan Pak Dirjen sebelumnya Pak Ridwan Jamaludin, kalau *nggak* salah waktu jaman Bapak masih Direktur Mineral, kalau *nggak* salah.

Saya pikir itu juga perlu loh Pak di dan itu juga sebenarnya *nggak* terlalu besar juga kok, *nggak* sampai ratusan miliar itu, itu kalau *nggak* salah saya dengar-dengar katanya sekitar 50 miliaran sampai 100 miliaran, tapi implikasinya itu besar sekali karena begini, ini saya mau kasih *stretching* penekanan.

Coba *deh* kita bayangkan dampak dari lambatnya proses birokrasi yang ada di Dirjen Minerba terhadap peningkatan pendapatan negara kita di sektor Minerba. Kenapa saya bilang itu? Pertama Pak, kita dari proses perijinan IUP itu *takes time*, yang kedua dari IUP naik ke IUP OP, IUP eksplorasi, IUP OP itu. Lalu turun lagi ke unit produksi, baru mulai RKAB, dari RKAB *kan* itu 1 tahun sekali dan sekarang suah disetujui *nggak* Pak itu gimana. Waktu itu kita ngusulin RKAB 3 tahun sekali, terakhir gimana?

**PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN
KUSDIANA):**

Masih proses ya Pak.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Nggak update terakhir gimana terkait pengusulan, penyusunan RKAB? Gimana Pak, *update* status terakhir Pak?

**PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN
KUSDIANA):**

Baru direvisi Pak, Permennya Pak.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Kemungkinan besar Permennya kapan Pak?

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Tahun ini, sekitar Agustus mungkin Pak *insya* Allah.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Begini Pak, saya mundur lagi sedikit kenapa saya bilang itu menjadi penting penyusunan RKAB Pak? Itu di jangan 1 tahun sekali, jadi Bapak itu nanti Pak itu bukan hanya sekedar menjadi Dirjen Minerba Pak, Dirjen Mineral Batubara ak. Administrasi Batubara. Bapak bisa bayangkan setiap tahun Bapak, tugas Bapak dikantor urusin RKAB aja dan berapa banyak RKB di Republik ini yang ditarik ke pusat.

Makanya kita bilang daripada nanti Bapak cuman sebagai Dirjen RKAB, dimana juga situasi. Jadi bisa bayangkan ya Pak, perusahaan saya misalnya saya *alhamdulillah* saya kebetulan *nggak* punya perusahaan tambang. Saya punya perusahaan ngurus RKAB bulan ini, *eh* baru disetujui bulan Juni-Juli Pak, tiba-tiba Pak bulan Oktober nanti saya harus siapin lagi Pak, ngajuin lagi RKAB, buat lagi *visibilities* lagi, ini lagi, segalam macam, baru lagi di-*approve* lagi bulan Juni-Juli Pak, terus kayak begitu setiap setahun sekali, ini *nggak* masuk akal Pak, sesat ini.

Nah maksud saya kenapa saya harus ngomong kayak begini di awal, kita posisi di Komisi VII sudah siap men-*support* Bapak-Bapak dalam kontes peningkatan anggaran, tapi kita dalam konteks pengawasan kita berkepentingan untuk mengkritisi Bapak, supaya kinerja kita karena *kan output* kita *kan* peningkatan pendapatan negara, Pak.

Nah itu dari sisi RKB, artinya kalau RAKB itu bisa dilonggarkan tidak 1 tahun sekali, tapi usulan saya waktu itu 5 tahun sekali tapi ternyata kelamaan katanya, ya udah pas 3 tahun sekali *gitu*. Jadi kalau RKAB 3 tahun sekali, terus kita dorong ada anggaran untuk bangun sistem besarnya di Minerba, saya yakin cepat *gitu loh* Pak.

Jadi teman-teman itu udah enak, *nah* kalau proses administrasi birokrasi di Dirjen Minerba itu cepat teman-teman penambang itu kerjanya juga cepat, enak semuanya *gitu loh* maksud saya. Dan saya meyakini kalau itu berhasil jalan, ini bisa lebih besar lagi *nih* yang warna kuning ini, yang kalau tahun lalu 183 triliun yang lebih dititikbesarkan karena faktor peningkatan harga komoditas. *Nah* kita berharap ada sumbangsih peningkatan produktivitas institusi terhadap peningkatan pendapatan negara *gitu*.

Jadi saya mau kita sama dulu Pak ya persamaan frekuensinya *gitu loh*, artinya ke depan nanti kalau misal teman-teman Komisi VII mengkritisi Bapak pada saat kita sudah bantu peningkatan anggaran, Bapak-Bapak harus siap diterima karena kita sudah *support gitu loh* Pak, jadi kurang lebih begitu. Jadi kita enak *lah* Pak kalau melihat *oh* pendapatan kita segini, Bapak sudah prestasi begini saja sudah begini.



Jadi artinya kita mau dorong lagi biar lebih besar karena saya juga pengen Bapak itu sebenarnya melebihi Kementerian Keuangan Pak, jadi jangan kementerian keuangan aja yang paling top di Republik ini, merasa bahwa dia yang paling berkontribusi, akhirnya orang-orangnya jadi macam-macam itu tadi, Rubicon *lah*, joget-joget *nggak* jelas kayak begitu. Itu publik kebuka *kok*, saya berharap ini saya memprovokasi Bapak supaya berebut bekerja sama-sama untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa harus kejebak pada praktek-praktek heonisme ya yang di institusi-institusi itu.

Jadi kita berharap dengan dukungan kita ini, kita simbiosis mutualisme, Bapak-bapak juga berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas institusi. Salah satunya yang tadi itu Pak, yang minerba kalau migas mungkin panjang lagi.

Saya pikir itu saja.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya silakan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Iya menyambung apa yang disampaikan oleh Ketua, intinya kita sudah beberapa kali menerima aspirasi baik yang langsung ke Komisi VII, maupun di luar ketika kita di Komisi VII terhadap persoalan RKAB dan sebagainya.

Pemikiran untuk membangun sistem tentunya kita berharap periodisasi 2019-2024 akan berakhir pada periode ini, tentunya dari bangunan aspirasi-aspirasi yang selama ini berkembang dan kita tampung selama ini persoalan sistem itu memang harus dibangun pada saat ini, *legacy* kita *lah* di sini.

Legacy kita ada di sini sebelum, sebelum ya penyusunan program masih bisa disisipkan, walaupun nanti ada alokasi tambahan anggaran kita masuk, langsung saja masuk pada sistem, kami meminta sistem sekian, kalau tidak kami tidak akan dorong anggaran, *clear* aja di situ Ketua. Kita *kan legacy* kita *kan* di sini Pimpinan, kita tidak mau ya *pameo* yang ada di luar kalau persoalan administrasi yang ada di ESDN itu dengan kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah, itu yang harus hilang.

Maka periode kita inilah saya pikir, saya pikir sepakat semua untuk kami mengalokasikan sekian, masih bisa terkejar waktu *kok*, masih memungkinkan untuk mengejar itu. Saya mendorong Pimpinan ya untuk kita masukkan padanya, tentu di perencanaan sudah ada sesungguhnya tinggal dimatangkan saja.

Saya pikir itu pemikiran kami tambahan saja.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Nasril.

Berarti artinya mempertajam, menambahkan ya.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya silakan Pak Gandung.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Terima kasih.

Jadi saya mendukung ada penambahan anggaran, namun harus ada catatan, Pak. Jangan karena ada euforia dengan penghasilan, kemudian kita ingin tambah. Kami mendukung penambahan itu dengan catatan *output*-nya harus jelas, sebetulnya kalau kita lihat program Bapak itu *output*-nya kadang-kadang remang-remang, syukur ada *outcome*-nya, tidak sekedar *output*, *outcome* dan *benefit*-nya.

Maka kalau itu sudah terpapar saya yakin tidak ada seorangpun akan membantah dan menghalang-halangnya. Ini termasuk filosofi anggaran berbasis kinerja, setiap rupiah harus menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit*. Maka dari itu kalau kita mau 15 triliun ya sudah *output*-nya jelas, nanti kita ngomong ini juga jelas, membela itu juga jelas. Kemudian *outcome*-nya dan *benefit*-nya untuk bangsa dan negara ini, jadi yang impian dari Pimpinan agar supaya hegemoni tidak ada pada keuangan, kita sebenarnya tapi bisa dipertanggungjawabkan.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, terima kasih Pak Gandung.

Mungkin kalau saya simpulkan Pak, itu yang disampaikan Pak Gandung itu ada 2 kata Pak, karya-karyaan Pak. Iya itukan saya mau menyampaikan kebetulan memang di doktrin di partai saya itu, eksistensi umat manusia itu dilihat dari karya. Namun *beyond* di atas karya itu pekerjaan Pak, jadi itu

sebetulnya yang mau kita sampaikan. Itu aja Pak, ini sekedar intermezo biar Pak biar *nggak* ngantuk.

Jadi saya yakin tadi udah ditambahkan Pak, pada prinsipnya teman-teman itu saya simpulkan nanti habis ini kita *skorsing* Pak ya. Kita *skorsing* habis ini, tapi saya ingin mencoba menyimpulkan bahwa Komisi VII pada prinsipnya akan mendukung terkait peningkatan anggaran, dalam rangka tadi untuk meningkatkan kinerja.

Di mana *output* ataupun *outcome* terakhirnya adalah peningkatan pendapatan negara karenakan pada akhirnya apa *sih* keberadaan kita semua di sini antara legislatif dengan eksekutif, kalau bukan daripada memberikan kontribusi sebesar-besarnya buat bangsa dan negara ini.

Artinya kami Komisi VII betul-betul berharap keberadaan ESDM harus bisa menjadi salah satu institusi negara yang benar-benar bisa memberikan kontribusi pendapatan negara sebesar-besarnya. Itu aja Pak sebetulnya semangatnya, jadi kembali memberikan karya dan karya yang sejati.

Jadi itu saja mungkin saya rasa, *nah* saya pikir ini.

F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO):

Ini pasti kan ada catatan-catatan juga dari kita, tapi tanpa menyita waktu sedemikian rupa karena kita *kan* juga perlu, saya kira diteruskan aja sebentar aja.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mohon maaf Pak pimpinan karena tadi saya.

F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO):

Iya Pak Maman ini idenya banyak *kan gitu*.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Karena saya supir tembak iya kan, jadi saya *nggak* tahu kalau tadi sebelumnya ada lubang atau ada apa jadi saya, jadi itulah, jadi mohon maaf-mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf.

Ya silakan kalau gitu kita persilahkan kepada teman-teman partai, saya pikir tidak usah berurutan lah mana aja nanti ya.

Prof. Mul monggo Prof. Mul, jangan lupa perkenalkan diri dan jenis kelaminnya.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Iya Mulyanto dari PKS, jenis kelamin laki-laki bukan transgender.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Pimpinan, izin Pimpinan saya potong.

Mungkin ada yang mau salat harus disampaikan juga, ishoma yang perlu juga itu.

Terima kasih Pimpinan, mohon maaf.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Baik, kebetulan saya sudah tadi.

Jadi secara prinsip ini kan kami akan mendengarkan semua ya capaian-capaian. Terus terang kami secara umum sepakat dengan teman kekaryaan, Pak Gandung, Pak Maman ini bahwa anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini sudah sepantasnya ditingkatkan karena memang ini kementerian tulang punggung ya bagi Indonesia ini paham secara energi ya, sehingga bergerak kepada industri dan bergerak kepentingan masyarakat lainnya.

Dari tadi angkanya sekitar 6,5 triliun menjadi 15,8 triliun, tapi tentunya ada catatan, catatan kinerja sebelumnya dan catatan ke depan. Menurut saya ada 2 atau ya kurang lebih 3 *sih*, 3 logika dasar kenapa anggaran ini perlu dinaikkan dan menjadi dasar pembelaan kita.

Yang pertama, anggaran tersebut harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat, wajib itu, *nggak* ada kalau ada anggaran itu menghasilkan pemborosan atau untuk kepentingan aparat, *nggak* boleh, harus untuk kesejahteraan masyarakat dan itu dibuktikan dengan peningkatan rasio elektrifikasi tahun 2023 100%, tahun 2024 harus ada keadilan Pak Maman.

Keadilan energi, keadilan listrik, masa udah 70 tahun lebih Maluku masih gelap, Kalimantan Barat sebagian gelap harus impor dari negara tetangga. 100% ini *nggak* boleh ditawar-tawar lagi, ini *milestone* ini, baru kita bekerja untuk rakyat, nyala seluruh Indonesia *kan gitu*.

Untuk itu perlu anggaran, kita dorong, kita dorong anggarannya, anggaran untuk memasang listrik baru menambah elektrifikasi, kita dorong, untuk masyarakat *kan*, untuk masyarakat, itu *kan* pekerjaan utama menurut saya.

Yang kedua, Kementerian ESDM ini bekerja tinggi sehingga dia membantu pemerintah mengurangi defisit transaksi berjalan yang selama ini boros, harus diusahakan melalui suatu program-program nyata. Ada pertama



lifting jangan turun-turun mulu bagaimana mau mandiri, gimana *nggak* impor kalau *lifting*-nya turun *kan gitu*.

Logika dasar segala hal yang mengarah kepada peningkatan *lifting*, kita dorong. Yang kedua, berbagai hal yang berupaya untuk mengurangi impor LPG, kita dorong *nah* begitu defisit transaksi berjalan iya *kan* yang menghabiskan uang kita. Kita suntik sedikit anggaran ESDM, namun defisit transaksi berjalan turunnya *drop kan* luar biasa kita ini.

Yang ketiga, kilang baru wah kalau BBM-nya tidak kita proses *kan* kita impor. *Nah* logika-logika seperti ini sehingga defisit transaksi berjalan bisa kita reduksi dan apalagi Pak Maman ya PNBPN ini ya meningkat.

Itu adalah dua logika pertama, yang logika ketiga, kita wajib mendorong Kementerian ESDM karena ini adalah kementerian masa depan dengan *green energy*-nya, iya *kan* katakanlah menatap masa depan *green energy*, maka kita perlu dorong ini.

Kita bukan lihat ke belakang agar betul-betul ke depan Indonesia menjadi negara yang maju ya karena energi yang bersih. Saya rasa teman-teman mendukung 3 logika ini. Sudah barang tentu apa yang kita lakukan hari ini catatan-catatannya harus diselesaikan, misalnya *green energy*, PJUTS, mati mulu lampunya baru dipasang, keluar baru 30 titik mati. Bu Diah aja keluar 50 titik mati PJUTS, ini *nggak* bisa menatap masa depan kalau begitu, ke belakang terus kita.

Demikian Pimpinan, secara umum kami setuju dengan catatan-catatan tersebut.

Sekian.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih banyak Prof. Mul.

Selanjutnya silakan Jeng Ratna saya kalau melihat Pak Ketua langsung, *oh* mau Ishoma dulu? Bapak udah pada Ishoma Pak dari tadi? Belum ya, *oh* ya udah kalau *gitu* begini kita skor ya Pak Ketua ya. Kita Ishoma dulu kurang lebih 10 menit lah ya, 10 menit *lah* saya pikir 10 menit aja kita jadi 15 menit, 15 menit jadi 20 menit.

Sidang saya skor 10 menit.

**(RAPAT DISKOR PUKUL 14.30 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**



(kembali di rekaman menit ke 5:01:00)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera

Skorsing sidang saya cabut.

**(SKOR RAPAT DICABUT PUKUL 16.34 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Bapak-Bapak telah peregangan otot melenturkan sendi-sendi dan melakukan perhitungan dan lain sebagainya, kita lanjut kembali sidang kita. Saya pikir kita estimasikan jam 5 selesai ya Pak ya, saya pikir itu ya jam 5 kita selesai. Jadi sekarang ini tinggal melanjutkan apa yang tadi menjadi pandangan beberapa rekan-rekan Komisi VII, baru nanti langsung kita buka proporsionalitas angka-angkanya.

Silakan lanjut Mbak Ratna yang paling Juwita.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Pimpinan, daftar Pimpinan Sartono.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan serta seluruh sahabat-sahabat Komisi VII,
Yang saya banggakan Bapak Plt. Sekjen ESDM beserta para Dirjen, juga Sekretaris DEN dan Kepala BPH Migas, ada Kepala BPMA juga.

Terima kasih atas seluruh paparannya, tadi sudah kami simak dengan seksama. Secara garis besar Pak Sekjen, saya ingin mengingatkan saja bahwa di sini kita mendapatkan dua angka yang berbeda, yang pertama adalah pagu indikatif yang sudah mendapatkan persetujuan. Yang kedua adalah usulan untuk kenaikan secara umum, yang ternyata pada masing-masing dirjen itu belum dijabarkan sesuai dengan pengajuan peningkatannya tersebut. Sehingga mungkin akan lebih baik apabila nanti itu didetailkan juga, yang pertama itu secara umum semuanya.

Yang berikutnya kami ingin menyampaikan beberapa catatan, yang pertama untuk Badan Geologi. Selamat Pak Sugeng atas amanah barunya, semoga bisa semakin sukses *gitu* ya Pak, penuh berkah. Pak, di paparan yang tadi disampaikan, kami banyak mencermati bahwa program prioritas Badan

Geologi tahun 2023 sampai dengan bulan Juni saat ini, itu rata-rata masih berkisar 50%, yang paling tinggi saya lihat 50%.

Bahkan ada beberapa program prioritas itu yang masih nol begitu, *nah* ini mungkin bisa nanti dijelaskan kendalanya ada di mana. Kalaupun misalnya itu bahasanya adalah ini kontrak pengadaan Bu, barangnya nanti datangnya bulan sekian, jadi langsung diserap habis. Menurut saya dari awal proses itu *kan* pasti ada runtutannya, jadi anggaran segini aja belum bisa diserap maksimal Pak, itu kenaikannya agak banyak *loh* yang Badan Geologi ini. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan ke kami.

Yang berikutnya terkait BPH Migas, pada prinsipnya sesuai dengan komitmen kami di tahun sebelumnya ya Ibu Erika bersama dengan para komite yang lain bahwa kita sepakat kalau BPH Migas ini seharusnya diberi keleluasaan untuk bisa mengelola anggaran ya lebih besar dari ini karena hasil yang diberikan oleh BPH Migas itu juga tinggi begitu.

Nanti kita perjuangkan sama-sama, tapi untuk yang tahun ini sepanjang tahun 2022 kemarin Bu, saya melihat ada 919 kasus penyalahgunaan atau penyelewengan BBM bersubsidi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka 1.137. *Nah* mungkin, mungkin Bu Erika selain program-program yang sudah reguler yang biasanya dilakukan oleh BPH Migas, saya berpikir bahwa perlu ada langkah khusus terkait permasalahan penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini *gitu*.

Sehingga masyarakat juga mendapatkan semacam *shock therapy* yang bagus *gitu loh*, sehingga pelaku-pelaku yang lain itu bisa berpikir ulang kalau ingin melaksanakan hal yang sama, *ntah* itu nanti sifatnya pengawasannya yang lebih diperketat, menggandeng HPH atau bagaimana, tapi kami berharap *sih* lebih ke langkah preventif ya maksudnya, bagaimana hal tersebut bisa dicegah dan tidak terjadi di kemudian hari.

Yang berikutnya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pimpinan tadi Pak Maman bahwa betul Pak Sekjen, kalau misalnya ada usulan untuk kenaikan sebesar 9 triliun sekian, itu kita juga harus berpikir ini dapatnya dari mana begitu. Bagaimana PNBPN yang dihasilkan oleh sektor ESDM ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan tersebut atau tidak? Karena kalau tidak berarti lagi-lagi kita harus membebani APBN murni begitu ya.

Yang berikutnya untuk Inspektorat Jenderal, Pak Irjen iya padahal kemarin janjinya anggarannya mau dinaikkan juga ya Pak, tapi *kok nggak- nggak gitu* ya Pak Irjen ya. Kayaknya perlu Pimpinan, Pak Irjen ini juga mendapat perhatian karena beliau kan yang harus mengawasi seluruh sektor pelaksana yang ada di Kementerian ESDM, sehingga apabila diharapkan apabila keberpihakan anggaran ini bisa dipenuhi, maka kita naghinya itu juga gampang, kamu udah melaksanakan apa aja *tuh kayak gitu*.

Dan mungkin juga Pak Irjen kami diberi contoh *gitu* ya, saat Bapak sudah melaksanakan fungsi pengawasan berapa kali dan korelasinya dengan tingkat optimalisasi penyelamatan PNBPN itu seberapa banyak. *Nah* itu menarik Pak

Irjen kalau misalnya bisa disampaikan ke kami, sehingga Pimpinan di sini beserta bersama dengan anggota Komisi VII juga bisa menghitung ulang, berarti yang bisa diselamatkan seberapa besar begitu.

Selanjutnya untuk Dirjen Minerba, Dirjen Minerba ini hari ini sangat mendapatkan perhatian dari masyarakat umum ya, mulai dari pencabutan izin sampai dengan ke kasus-kasus kemarin, ini sangat luar biasa. Kami mohon tidak mengendurkan semangat yang ada di dalam tapi bagaimana berusaha untuk memperbaiki *lah*, supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi.

Kenaikannya yang diusulkan besar sekali ya Pak, 652 miliar kalau tidak salah hitungan kami. Namun saya mohon Pak, seperti yang ada di halaman 13 pemaparan Bapak dan halaman 14, disambung juga halaman 15. Saya agak tergelitik melihat ada program fasilitasi batubara, item-nya sama 5 kali tapi nilainya berbeda dengan fasilitasi mineral.

Nah inikan mungkin, mungkin kalau misalnya ada permasalahan yang ditemukan di lapangan antara badan usaha dengan masyarakat, *kok* kita yang tekor dalam tanda petik negara ya, harusnya badan usahanya *dong* yang kita, istilahnya kita maintain pertanggungjawaban untuk fasilitasi dan lain sebagainya begitu.

Dan itu nilainya menurut saya lumayan fantastis Pak, karena per kegiatan berarti membutuhkan dana 300 juta untuk yang batubara, untuk yang mineral *nggak* sampai segitu dan itu juga membuat saya bertanya-tanya kenapa batubara menjadi lebih mahal? Mungkin nanti bisa dijelaskan.

Selanjutnya yang program dukungan manajemen Pak halaman 15, izin Pimpinan boleh interaktif khusus yang ini? Operasional kantor IT 46 miliar, operasional kantor minerba 49 miliar. Ini yang dimaksud dengan operasional kantor itu selama 1 tahun untuk seluruh Indonesia atau bagaimana Pak? Izin.

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

Mohon izin, untuk itu untuk Kantor Inspektur Tambang se-Indonesia Bu.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Sorry, bisa disebutkan Pak jumlahnya ada berapa *gitu*.

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

31 kantor.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

31 kantor ya, untuk yang IT atau untuk yang minerba. Itu *kan* ada 2 tuh, operasional kantor IT sendiri, operasional kantor minerba sendiri, yang 31 ini yang IT atau yang minerba?

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Coba di bantu siapa Pak, yang lebih paham detail karena *kan* Pak Wafid atau Pak Wahid ya, Wafid *kan* baru seminggu ya atau berapa haris, baru 2 hari ya, coba tolong dibantu untuk menjawab Bu Ratna.

STAF DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:

Mohon izin Pak Plt.

Terkait dengan 46 miliar itu adalah kantor Inspektur Tambang kita yang tersebar di 31 provinsi, Ibu. *Nah* sementara yang 49 miliar itu adalah operasional kantor kita yang di jalan Soepomo, Ibu.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Satu gedung Pak?

STAF DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:

Ada 3 gedung Ibu.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

3 gedung 49 miliar, Pak?

STAF DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:

Itu sekaligus dengan pengelolaan Gedung kita Bu, *cleaning service*, kemudian ada satuan pengaman.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Oke, terima kasih-terima kasih penjelasannya.

Sudah dijelaskan Pimpinan, kami mohon juga ada *stressing* terkait ini.

Yang terakhir, yang terakhir Pak, ada BPSDM. BPSDM ini juga tadi kami lihat juga mengajukan kenaikan anggaran begitu ya, sebenarnya *sih* kita sepakat Pak, kalau misalnya kita mau merubah sistem kita juga harus mempersiapkan SDM yang baik begitu, dengan berbagai pembekalan ilmu dan lain sebagainya.

Cuman yang ingin saya tanyakan Pak, komitmen dari BPSDM terkait akselerasi transisi energi di Indonesia itu sebesar apa ya? Karena begini, tadi disampaikan bahwa dalam satu tahun memberikan pelatihan kepada sekian ratus, sekian ratus orang begitu ya.

Di tahun 2023 itu tercatat di antara 1.600-an dari 2.200 orang-orang yang akan dilatih itu ada 284 saja yang dipersiapkan untuk pelatihan konservasi energi, energi baru terbarukan. Setelah itu malah di tahun 2024 padahal anggarannya naik *nih*, itu yang dilatih malah turun hanya 260 orang. *Nah* jadi kira-kira boleh *kan* kalau saya bertanya, berarti komitmennya untuk energi terbarukan ini sebesar apa begitu.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Mbak Ratna silakan.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Sebab menurut saya agak anomali, hari ini kita sudah punya banyak sebenarnya ahli-ahli migas begitu tapi kita malah yang kurang itu yang di sektor energi baru energi terbarukan, sehingga itulah yang sebenarnya harus diperkuat begitu.

Saya *nggak* mengerti *reasoning* dari BPSDM itu terkait apa dalam hal ini, apakah memang *demand*-nya ya belum ada atau bagaimana begitu, tapi saya yakin ya kalau misalnya kita sudah bergerak ke sana semua sektor itu pasti mengikuti. Sehingga kami berharap BPSDM bisa mempertimbangkan ulang terkait tenaga-tenaga yang akan dilatih di sektor energi baru dan energi terbarukan.

Mungkin itu saja Pimpinan yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan jawabannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami akhiri.

*Wallahul muafiq ila aqwamitthoriq,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Mbak Ratna.

Memang Bapak-bapak harus paham kalau Mbak Ratna orangnya agak menukik, agak menukik, jadi memang selalu begitu. Jadi makanya saya kasih silakan, bahkan kalau mau tambahan interaktif pun saya ini lagi.

Saya hanya tambahkan saja tadi, karena tadi Mbak Ratna bahas mengenai IT. Jadi nanti kita akan, kita sepakat kan mau menambahkan mempersiapkan membangun sistem IT terintegrasi dalam rangka untuk mempercepat proses perizinan di sektor minerba.

Sekaligus kami juga tadi di Pimpinan sepakat juga akan membentuk panja pembangunan sistem ini. Jadi dalam setahun ini saya akan monitor Pak, khusus nanti di panja itu. Jadi anggarannya sudah kita siapkan, kita bantu, kita *support* dan kita monitor lagi dengan panja.

Jadi karena ini kita *nggak* mau main-main karena tadi di awal kan tadi saya sudah sampaikan *loh* ya bahwa kita *concern* betul dalam rangka untuk mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor ESDM ini, baik di migas maupun di minerba.

Nah concern saya di Minerba Pak, jadi itu saya mau sampaikan terlebih dahulu. Artinya kita *nggak* memberikan cek kosong, hanya sekedar men-support anggaran tapi kita *nggak* kawal. Jadi biar nanti *cek and balance*-nya berjalan *tuh* Pak, karena laporan-laporan *kan* juga banyak di sektor minerba ini *gitu*.

Silakan selanjutnya Pak Sartono, iya nanti Pak Sartono baru Jeng Roro, baru ke Pak Willy Dozzen, Pak Bambang Hermanto.

Silakan Pak Sartono.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Terima kasih Pimpinan, Pak Maman. Terima kasih waktunya.

Pimpinan yang kami hormati,
Para sahabat Komisi VII yang kami hormati, dan
Mitra ESDM, dari sini hadir Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Irjen, Pak Sekjen DEN, BPH Migas, Kepala BPMA, Komite BP Migas yang kami hormati.

Mohon maaf agak terlambat ini Pimpinan, karena begitu pentingnya tadi saya mengikuti kegiatan di kunjungan Mahkamah Kehormatan Dewan, tapi begitu pentingnya dalam membahas anggaran kami izin minta waktu untuk berbicara.

Menyampaikan catatan-catatan saja begitu Pimpinan, untuk terkait Sekjen KESDM RI kami hanya ingin diberikan penjelasan begitu Pak Sekjen mengenai penyelesaian usulan pengelolaan BMN pada poin ke 10, indikator kinerja utama di tahun 2023, pengelolaan BMN ada penggunaan di situ, ada pemusnahan, ada penghapusan, ada juga pemanfaatan.

Nah itu mohon juga di, itu bagaimana itu, terus juga ada barang BMN yang seperti apa itu, apakah terkait, ini *kan* terkait tentang inventaris barang milik negara, pengelolannya seperti apa, apakah sudah baik atau perlu dibenahi, itu juga mohon diberikan penjelasan.

Masih terkait Sekjen KESDM RI pada pagu indikatif 2024, ada lonjakan begitu ya anggaran Pusdatin begitu mencapai kurang lebih 100%. Apakah juga mohon dijelaskan terkait ini rencananya dan pengelolannya anggaran tahun 2024 pada bidang Pusdatin meliputi apa saja.

Juga pada prinsipnya *over all* kami menilai kinerja setjen sudah baik, capaian opini BPK juga baik ya WTP begitu dan perlu terus harus dipertahankan kinerjanya untuk ditingkatkan, sehingga capaian target indikator kinerja pada tahun 2023 dan 24 tercapai.

Ini terkait Itjen, ada 6 tugas ya Pak Itjen ya. Fokus pengawasan Inspektorat Jenderal tentang ada 6 hal itu yang betul-betul akan dijalankan begitu. Di tahun 2023 dan 2024 ini *kan* cukup berat ini, tahun politik karena apa? Ini merupakan saya pikir cukup ketat, di parlemen siap membantu Pak Itjen apa saja yang ditemukan adanya penyimpangan begitu yang terjadi.

Sebagaimana kita lihat waktu kita kunjungan kerja ke Semarang Pak Itjen tentang ada proyek Cisem, Jargas Kota dan lain-lain, ini betul-betul jangan sampai terjadi ada pemasaran, ada temuan begitu, ingin berjalan dengan baik begitu dan kadang-kadang kalau dicari-cari ada aja yang salah, tapi daripada dicari-cari dan ditemukan permasalahan tolong lebih awal dikoordinasikan dengan baik proyek-proyek itu.

Tugas berat itu Pak, kalau memang diperlukan ekstra *effort* begitu, pengawasan yang dilakukan silahkan diusulkan kepada, disampaikan kepada Komisi VII DPR RI termasuk di permukaan pada peningkatan anggaran, begitu Pimpinan dalam sektor ini ya karena kekurangan anggaran kinerjanya tidak maksimal, ada permasalahan yang akhirnya lebih besar nanti di kemudian hari.

Ini selanjutnya juga untuk BPH Migas begitu agar kiranya fungsi pengawasan yang ada terus dikembangkan, disebarluaskan per titik, serta sosialisasi, baik penggunaan BBM, kebijakan hilir migas dapat berjalan baik, efektif ya bagi masyarakat dan kelompok akademisi diajak. Ini permasalahan-permasalahan sering terjadi dan berulang, temuan-temuan di lapangan tentang apa sektor distribusi minyak dan gas ini.

Nah ini juga kalau diperlukan anggaran harus berani juga Bu untuk bisa memaksimalkan kinerja, jadi tidak terjebak kepada aturan, wah ini anggarannya hanya bisa segini saja tapi kerja tidak bisa maksimal. *Nah* ini dalam forum ini juga harus dipikirkan begitu karena kita mewakili negara DPR ini untuk, kalau ada untuk meningkatkan kinerja dan mencegah kebocoran-kebocoran terjadi daripada subsidi minyak ini yang harus tetap pada sasaran, melibatkan semua elemen atau aparat keamanan, *nah* itu perlu anggaran yang tinggi dan melibatkan orang banyak perlu juga itu untuk meningkatkan.

Kalau *ndak* ini terjebak pada anggaran, salah satunya memaksimalkan daripada kerja itu dibanding kita anggarannya terbatas tetapi terjadi kebocoran yang luar biasa. Kami melihat dari segi di parlemen itu yang, yang terulang kembali kebocoran-kebocoran itu, melibatkan, kadang-kadang juga melibatkan aparat hukum, ini ngeri juga tapi harus disampaikan juga dalam forum terbuka kalau terjadi hal tersebut.

Demikian sementara Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih banyak Pak Sartono masukan-masukannya dan saran, maupun kritikan.

Selanjutnya Jeng Roro.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrohmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang saya hormati Pak Ketua Pak Maman, beserta seluruh Anggota Komisi VII yang saya banggakan,
Yang saya hormati Pak Sekjen ESDM beserta seluruh jajarannya, para Dirjen hingga Kepala BPH Migas dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yang pertama tentunya kami, saya rasa kami semua apresiasi setinggi-tingginya terhadap pendapatan negara terkhusus untuk sektor energi yang mencapai 351T ya pada tahun 2022, tahun lalu dan kami berharap bahwa tren ini akan ibaratnya semakin meningkat *gitu* dengan berjalannya waktu. Maka kita menyadari bahwasanya kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita itu sangat penting.

Nah maka oleh karena itu segala upaya saya rasa harus kita tekadkan dan perjuangkan agar anggaran tahun 2024 itu bisa meningkat berdasarkan kinerja dari realisasi yang sudah kita lihat bersama, itu poin pertama.

Yang kedua, saya mungkin langsung ke masing-masing tidak semuanya hanya beberapa yang ingin saya mungkin pertanyakan. Yang pertama untuk Irjen ya. Kami melihat bahwa berdasarkan usulan untuk tahun anggaran 2024 itu awalnya, iya 2024, 138,4 miliar. Namun secara indikatif naik menjadi 206,08 miliar. Pada prinsipnya kami mendukung dengan adanya kenaikan dalam bentuk apapun asal secara konkret jelas program-program yang memang ingin dilaksanakan.

Nah oleh karena itu kami mengamati bahwa ada peningkatan yang saya rasa cukup drastis sebesar 30,9M berkaitan mengenai pengawasan terpadu. Walaupun ini memang sifatnya itu lokasi-lokasi di mana pengawasan tersebut akan dilakukan dapat didiskusikan secara langsung, lebih lanjut lagi *gitu* ya Pak ya Pak Irjen.

Nah saya sebetulnya nanti mungkin bisa dijelaskan secara garis besar, itu pengawasan terpadu ini yang, yang menjadi niatan utama dengan melakukan pengawasan ini itu seperti apa, lalu kemudian apakah ada wilayah-wilayah prioritas yang kemudian akan dilaksanakan pengawasan terpadu tersebut. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua Dirjen Minerba, jadi kalau Dirjen Minerba ini kita melihat bahwa tahun 2023 anggarannya di 678 miliar. Namun berdasarkan untuk tahun anggaran 2024 itu di kisaran 712,8 yang kemudian ditingkatkan lagi secara indikatif menjadi 1,24 triliun.

Jadi ini peningkatannya itu sangat amat signifikan dibandingkan yang lainnya *gitu*, dirjen-dirjen yang lainnya, sehingga bahkan mencapai kurang lebih dua kali lipat lah ya dari originalnya *gitu*. *Nah* maka oleh karena itu saya dalam hal ini, sebetulnya kita juga paham lah dengan berbagai macam lokus kerja yang pada dasarnya memang harus diperjuangkan dan yang harus dilakukan.

Saya pada prinsipnya ingin menyoroti tadi ada bagian mengenai Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, di situ disampaikan terkhusus di *slide* nomor 14. Bahwa berkaitan mengenai, ini *kan* ada macam-macam ya, ada pengawasan dan penilaian reklamasi dan pasca tambang dan kalau kita melihat nilainya itu ada kenaikan dari 2023 yang mencakup 67,6 miliar menjadi 370,04 miliar. Jadi ada kenaikan sekitar 302,4 miliar, ini signifikan sekali Pak, tapi kalau signifikan program-programnya jelas dan bisa dijelaskan dengan baik juga kita tidak ada masalah, tapi kalau saya melihat misalnya ya berkaitan mengenai reklamasi pasca tambang kurang lebih 7.100 hektar.

Ini *kan* sangat baik sebetulnya dan sangat dibutuhkan untuk wilayah-wilayah yang memang pada dasarnya butuh, apa namanya program reklamasi tersebut. Ini salah satu hal di mana kita juga mendorong *sustainability* Pak ya, jadi bagaimana kita tetap memelihara lingkungan pasca tambang, tapi anggaran yang dialokasikan untuk itu hanya 2,05 miliar.

Sedangkan saya *tuh* masih bingung Pak sebetulnya, jadi misalnya di evaluasi, verifikasi dan bimbingan teknis aspek teknik dan lingkungan mineral dan batubara ada 5 kegiatan evaluasi teknis di kisaran 6,34 miliar. *Nah* pertanyaan saya, apakah untuk setiap kegiatan itu nominalnya 6,34 miliar atau secara keseluruhan nominalnya seperti itu karena kalau misalnya secara keseluruhan nominalnya seperti itu yang dipaparkan di *slide* 14 ini, ketika kita apa namanya simpulkan keseluruhan itu menjadi 70 koma sekian miliar.

Nah maksud saya sisanya itu kemana, tapi kalau memang penjelasannya adalah 6,34 kemudian dikalikan 5 itu baru dia nominalnya menjadi 300 sekian miliar. *Nah* itu tolong saya mohon sekali untuk kemudian dijelaskan kepada kami karena ini anggaran sangat besar Pak, saya hanya ingin, saya mengamati bahwa setiap anggaran yang diperuntukkan untuk masing-masing ditjen itu harus tepat sasaran dan harus jelas program-programnya yang kemudian akan dilakukan. Itu yang minerba.

Lalu berikutnya mengenai ini *in order* aja ya, jadi berikutnya mengenai Dewan Energi Nasional, *nah* di sini *kan* ada Pak Sekjen. *Nah* ketika kita berbicara mengenai DEN ini *kan* didasarkan oleh amanat undang-undang ya, jadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, kita tahu secara struktural sebetulnya ketuanya itu presiden bukan Menteri ESDM *gitu kan*.

Nah maka oleh karena itu saya sebetulnya dan saya rasa kita semua juga menyadari hal ini tapi belum melakukan apa-apa *gitu*, bahwa Dewan Energi Nasional itu sebetulnya secara anggaran seharusnya tidak dibebani oleh Kementerian ESDM saja karena didalamnya itu ada, misalnya ketuanya presiden, wakil ketuanya wakil presiden, ketua hariannya memang menteri yang membidangi tapi selebihnya *kan* ada kementerian-kementerian lainnya, misalnya Kementerian Keuangan, Bappenas, Perhubungan, Perindustrian, Pertanian, BRIN seharusnya masuk di sini juga karena Menristek *kan* udah *nggak* ada dan KLHK.

Seharusnya anggaran lembaga ini tidak hanya dibebani oleh Kementerian ESDM, tapi lintas kementerian agar kita betul-betul merasakan esensi dari adanya apa institusi ini *tuh* seperti apa. Dan kalau saya lihat dari anggaran yang telah dialokasikan untuk DEN dari tahun 2023 yang sekarang ya berarti, itu 56,9 miliar. Sedangkan usulan awal untuk tahun 2024 adalah 194,4 miliar tahun, pagu indikatifnya diturunin lagi menjadi 56,8 eh 8 atau 9 miliar. Tapi tadi ada catatan kalau dari presentasinya saya amati itu seharusnya 71,86 miliar dengan berbagai macam hal yang tadi juga sudah disampaikan.

Nah, saya itu kepingin nanya aja sebetulnya, pandangan Kementerian ESDM terhadap institusi ini *tuh* seperti apa? Karena kalau saya lihat itu sangat amat tidak berpihak, dari segi anggaran aja *nggak jelas*. Jadi ibaratnya kalau misalnya dikasih 50 sekian miliar, sedangkan yang lainnya dikasih anggaran di atas 100 miliar, ibaratnya DEN ini mau nafas aja *nggak* bisa *gitu*. Jadi ini *kan* kasihan sebetulnya, menurut saya ya, DEN diminta untuk merumuskan kebijakan energi nasional dengan mempertimbangkan keseluruhan dari 7 sektor yang tadi sudah saya sampaikan.

Nah ini *kan* ditambah juga harus merumuskan rancangan umum energi daerah, yang seharusnya Pak Sekjen itu dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten karena ketika kita berbicara mengenai transisi energi kadang-kadang pemerintah daerah itu juga lupa bahwa ini seharusnya merupakan salah satu prioritas nasional kita.

Nah maka oleh karena itu kalau kita tidak kawal dengan baik, lepas lagi ini niatan kita bersama dan impian kita bersama untuk kemudian mendorong *sustainable development* dan transisi energi di negara kita kalau kita tidak bisa menjamin bahwa setiap pemerintah daerah itu *commit* terhadap peraturan yang ada di pusat, ditambah RUU EBET yang seharusnya ya kita juga menantikan tindaklanjutnya seperti apa *kan* dan kita semua bagian dari perubahan itu sebetulnya.

Jadi saya rasa semua itu kebijakan, sebuah anggaran itu berdasarkan niat kita itu sebetulnya untuk apa *gitu*, kalau kita ingin mengedepankan transisi

energi, ayolah kita alokasikan anggaran yang cukup besar untuk kemudian kita bisa merealisasikan hal tersebut. Jadi itu yang ingin saya tanyakan mengenai DEN, saya harap tolong *lah* supaya *fair* dipertimbangkan Pak Sekjen, jangan jahat-jahat amat. Tolong *lah* supaya mereka itu bisa nafas Pak Sekjen itu.

Lalu yang mungkin salah satu yang terakhir, ada 2 lagi sih. Yang kemudian berkaitan Ditjen EBTKE, *nah* kalau saya, Mbak Ratna, temen-temen di sini kita sangat antusias terhadap transisi energi. Oleh karena itu Ketika kita melihat ada angka di tahun 2023 adalah berada di kisaran 1,3 t, lalu kemudian usulan awal untuk 2024 ada 5,4 t, kita senang sebetulnya. Tapi begitu kita lihat lagi bahwa pagu indikatifnya menjadi turun menjadi 448 miliar, walaupun itu dengan catatan belum termasuk PJUTS, terus ada juga motor apa BBM ke listrik ya Pak, lalu kemudian PLTS atap dan lain sebagainya.

Yang saya ingin tanyakan adalah ketika kita mempertimbangkan segala apa faktor itu, itu kemudian anggarannya menjadi berapa Pak? Saya berharap bahwa angka ini tidak semakin turun dengan berjalannya waktu *gitu*. Justru makanya keberpihakan anggaran itu penting sekali kan sebetulnya, kembali lagi niat kita itu dalam apa namanya, dengan kita berada di sebuah institusi yang sebetulnya menentukan arah bangsa, kita maunya itu ke mana? Kan kelihatan banget sebetulnya dari anggaran-anggaran apa, yang sudah ditentukan *gitu*.

Jadi saya mohon sekali untuk penjelasannya berkaitan mengenai itu. Lalu untuk PJUTS banyak sekali masalah tentang kerusakan dan lain-lain, itu tolong dibantu bagaimana karena di dapil saya itu 20 titik itu sudah mati Pak dan ini bukan hanya saya, saya rasa teman-teman saya semuanya juga mengalami hal yang sama.

Dan *slide* 4 bantuan pemerintah konversi motor listrik target 2023 adalah 50 ribu unit motor konversi, sedangkan capaian 2023 adalah 0 unit. *Nah* ini saya ingin mengetahui keberlanjutan dari program ini seperti apa dan kenapa *kok* masih seperti itu.

Yang berikutnya dan mungkin ini terakhir berkaitan mengenai Badan Geologi, ini Badan Geologi yang baru ya. Sebetulnya gini Pak, kita itu melihat bahwa tahun 2023 *kan* 840 miliar ya *kan*, terus di tahun 2024 targetnya adalah 1,18T, indikatifnya bahkan menjadi 1,26T. *Nah* kita melihat bahwa terkhusus untuk realisasi anggaran tahun 2023, menurut pandangan saya itu kurang optimal, kurang optimalnya kenapa? Karena misalnya ada anggaran yang diperuntukkan untuk museum dan realisasi anggaran untuk tahun 2023 itu masih 6 koma sekian persen.

Lalu ada kriteria-kriteria lainnya misalnya PATGL, PSG, BKAT yang sebelumnya saya juga *nggak* ngerti singkatan-singkatan itu apa Pak? Saya *nggak* ngerti, Pak. Jadi mohon sekali dijabarkan itu maksudnya apa dan kalau kita lihat tren-nya Pak realisasinya itu ada yang 3,26%, ada yang bahkan 0% sedangkan sekarang itu udah bulan Juni Pak.

Jadi saya bingung kalau misalnya progressnya itu masih sekian persen, target untuk akhir tahunnya itu seperti apa *gitu* dan realisasi dari program-program ini seperti apa karena kalau misalnya kalau saya hitung ini ada yang tidak efektif itu 19M anggaran yang kurang efektif, bahkan pencapaiannya 0%.

Nah itu sebetulnya bisa diperuntukkan untuk hal-hal yang menurut saya lebih produktif *gitu*. Jadi ini justru membuat kita mempertanyakan buat apa anggaran sebesar ini sebetulnya.

Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dan sebetulnya dari Badan Pengembangan SDM tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratna, jadi saya tidak harus menyampaikan lagi. Tolong pengembangan SDM diperuntukkan juga untuk sektor EBTKE Pak, banyak sekali perusahaan-perusahaan, sebetulnya perusahaan energi sekarang itu bukan hanya perusahaan *oil and gas*, tapi mereka sekarang menjadi energi, mereka sudah men-*divers* energi portfolio mereka dan pengembangan energi terbarukan terjadi di lintas perusahaan yang ada. Bahkan Pertamina aja udah ada geothermal, lalu kemudian Indika juga udah melakukan berbagai macam ekstensi, bahkan Exxon dan lain-lain.

Jadi saya harap sekali bahwa kita bisa menciptakan SDM-SDM yang unggul yang kemudian bisa berkontribusi karena dengan kita mengedepankan *sustainable development* kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat banyak dan saya rasa Bapak mempunyai peran yang sangat andil Pak, untuk kemudian menciptakan kualitas SDM yang unggul untuk bangsa Indonesia.

Itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih Jeng Roro.

Kalau kata sederhana aja kalau terkait DEN itu sederhana gini, kalau memang *nggak* diperhatikan udah DEN bicara khusus aja di luar ESDM *gitu* aja. Jadi sebenarnya ini kalau saya lihat ini ada 3 institusi di bawah, sebetulnya mau di bawah ESDM *nggak* di bawah ESDM juga kayak BPMA, BPH Migas dan DEN itu ke depan *nggak* usah rapat RKAKL digabungin sama ESDM, dipisahin aja kalau menurut saya karena memang secara institusional juga saya *nggak* tahu, secara hierarki itu saya nanti saya pelajari ya.

Saya pikir sekretariat perlu pelajari, itu mungkin kayak DEN, BPH Migas dan BPMA, *kan* kayak BPMA *kan* sama SKK Migas *kan*. BPH Migas *kan* dia pakai model *attention* ini Pak, apa itu istilahnya. Kalau PNBPN-nya sekian, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dapat sekian *gitu* ya, betul ya.

Terus kayak DEN ini *kan* juga beda, jadi ke depan mungkin 3 institusi ini pisah saja dengan ESDM maksudnya pembahasannya, jadi biar bisa lebih fokus kita karena saya lihat keberpihakan secara *political policy* Kementerian ESDM terhadap 3 lembaga ini kurang, saya lihat itu.

Jadi maksud saya mungkin ya wajar karena ESDM ini *kan* banyak yang dipikirin *kan*, harus ngamanin kelistrikan, harus ngalamin Migas, harus ngamanin Bageol, harus ngamanin minerba. Ya udah maksud saya nanti, khusus yang 3 itu bisa aja karena *toh* juga kayak BPH Migas sebetulnya *kan* bukan di ESDM *kan* ininya ya, di Kementerian Keuangan ya BPH Migas itu.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Anggarannya masih gabung dengan Kementerian ESDM.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Tapi penentuannya.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Iya penentuannya dengan izin penggunaan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya itu artinya berarti sebetulnya lobinya bukan sama ESDM *kan*, lobinya sama Kementerian Keuangan. Jadi kalau kita mau naikkan atau mau turunkan ya sebetulnya *nggak* perlu ngomong sama ESDM, kita bicaranya sama Kementerian Keuangan, Badan Anggaran itu berarti, maksud saya yang *gitu-gitu*.

Terus kayak BPMA ya kalau anggarannya ya misal ini itu saya pikir dalam pembahasan anggaran perlu digabungin dengan SKK Migas *gitu*. Terus kayak DEN *kan* beda lagi itu, katanya ke presiden *kan*. Jadi saya pikir itu juga perlu menjadi perhatian, tapi Mbak Roro tadi dalam pembicaraan kita udah dorong dinaikin *gitu* untuk DEN, BPMA dan BPH Migas. Jadi *insya* Allah ini kita perhatiin *lah*.

Ya selanjutnya Pak Willy Dozen, saya ingat dulu zaman-zaman saya masih kecil ada film pendekar Willy Dozen.

Silakan Pak Willy.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Terima kasih Pimpinan dan terima kasih juga kehadiran Pak Ketua Pak Sugeng ya.

Pertama, saya memberikan apresiasi juga ya kepada Kementerian ESDM melalui Plt. Sekjen yang sudah memaparkan, baik itu menyangkut masalah evaluasi dan juga tentang rencana 2024. Saya tidak banyak membahas masalah angka dalam hal ini hanya secara garis besar saja ya, pertama dalam evaluasi yang saya mau garis bawah di sini itu saya melihat bahwa Kementerian ESDM ini sangat kecil sekalinya *gitu* nyalinya dalam rangka bagaimana untuk menertibkan *illegal mining*, itu nyalinya sangat kecil sekali.

Buktinya kondisi di lapangan luar biasa, kalau kita mau jujur dengan ilegal itu kerusakan, kerugian negara itu cukup besar, artinya bocornya sumber-sumber penerimaan negara.

Nah di sini saya tantang supaya di dalam rencana 2024 itu dibesarkan *gitu* anggarannya, kemudian dipertajam timnya untuk kita menyelamatkan kerusakan dan juga kebocoran keuangan negara karena kita membahas kinerja dan juga sekalian untuk 2024. Jadi itu catatan saya mungkin itu ke Sekjen atau ke Inspektorat ya untuk menjadi perhatian dalam rangka kita melaksanakan evaluasi 2023, termasuk juga untuk 2024.

Yang kedua, saya menyoroti tentang listrik ya dan saya bersyukur ini sudah ada Pak Dirjen Listrik yang bisa saya katakan sudah luar biasa dan beliau sudah sampai ke pelosok di daerah dapil saya di Kalimantan Tengah dan beliau melihat sendiri kalau kita melihat listrik desa Lides di Kalteng itu, itu merupakan provinsi yang paling tertinggal listrik desanya karena sampai dengan saat ini itu kurang lebih 450 desa yang listrik desanya belum masuk ya.

Ada 16 ibu kota kecamatan yang belum PLN masuk, *nah* jadi ini bagian yang bisa saya katakan menjadi perhatian ya dan saya juga bersyukur karena saya lihat di tahun ini bahwa listrik ini akan disambung gratis ya melalui program apa namanya ini ya BPBL ini ya, tetapi kalau angka 80.000 sambungan listrik rumah tangga orang tidak mampu itu kayaknya kalau menurut saya itu terlalu sedikit ya, kalau bisa ditambah bukan 80 ribu tetapi kalau bisa, kalau kita ingin mempercepat merealisasi Sila ke-5 dari Pancasila itu ya “keadilan seluruh rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia” itu menurut saya itu harusnya diperbesar, supaya cepat orang bisa.

Jadi ini menjadi perhatian, maka oleh karena itu saya juga ingin menantang *gitu* Kementerian ESDM ini ya untuk berani *gitu* ya membuat loncatan yang lebih percepatan Indonesia terang itu dengan rasa keadilan *gitu* ya. Jadi bukan hanya tadi saya bicara desa yang masih banyak masih listriknya belum masuk PLN-nya, kemudian ibukota kecamatan aja belum masuk PLN dan kita belum bicara tentang sambungan rumah tangga tadi ya.

Maka untuk itu saya juga berharap dari anggaran dari ESDM yang 6 koma sekian T ini 6,7T ini bisa, artinya diciutkan untuk membantu Dirjen Listrik ini *gitu* karena ini program yang nyata dan jelas ya bahwa kinerja Komisi VII dan kinerja Kementerian ESDM itu kelihatan, kelihatannya kenapa? Karena nyala ya, kalau dia *nggak* nyala, gelap, berarti kinerjanya *nggak* bagus *gitu* ya.

Nah maka untuk itu saya menyarankan ya bahwa anggaran untuk listrik ini harusnya ditambah ya, terutama tolong nanti sekjen bisa ngatur-ngatur yang mana, turun yang mana, naik yang mana. Sehingga Dirjen Listrik ini harusnya naik ya untuk percepatan perlistrikan.

Yang ketiga, saya juga mohon dievaluasi *gitu* untuk keberadaan Perta Shop, jadi dievaluasi keberadaan Perta Shop ini ya karena kenyataan di lapangan kurang fokus, terutama penempatan Perta Shop itu titik-titiknya yang tidak seperti apa yang kita harapkan berada di tempat-tempat tertentu untuk memotong distribusi, untuk orang bisa mendapatkan bahan bakar yang lebih bagus, terutama di desa-desa.

Jadi bukan di jalan umum kota *gitu* ya. Kemudian juga kita melihat suplai bahan bakar ini juga kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada *gitu*. Maka ini perlu juga mendapat perhatian.

Yang terakhir ya artinya saya berharap agar fungsi pengawasan yang ada di Kementerian ESDM ini betul-betul riil ya, kapan perlu ditambah anggarannya untuk inspektorat atau bagian pengawasan. Sehingga kebocoran-kebocoran yang saya maksud tadi ya ini bisa kita selamatkan ya.

Mungkin itu yang menjadi masukan saya, terima kasih dan saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sudah Pak Willy ya?

Mohon maaf, tadi ada sedikit selingan diajak curhat dengan Pak Ketua

Terima kasih.

Cukup ya saya pikir ya, jadi kita tinggal lanjut ke tampilan ini. Namun saya ingin silakan dulu ditampilkan.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Izin Pimpinan, saya belum.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ow iya, silakan Pak Her.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Baik, terima kasih Ketua atas waktunya.



Saya singkat saja barangkali karena waktunya memang sudah lewat dari jam 5, barangkali kalau teman-teman tadi sudah menyoroti lebih banyak hal, saya singkat saja Pak Sekjen, Pak Dirjen dan seluruh jajarannya, Kepala BPH Migas dan BPMA dan seluruh yang hadir di sini.

Terkait dengan PJUTS Pak, PJUTS ini di dapil saya terlalu banyak persoalan. Yang pertama adalah pemasangannya, Teknik pemasangannya yang sepertinya tidak sesuai dengan spek, banyak yang miring, banyak yang tidak lama kemudian jatuh panel suryanya, kemudian mati, Pak. *Nah* ini apakah memang ini memang speknya yang di, sesuai anggaran itu dengan spek seperti itu atau seperti apa.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya kira mumpung kita sedang membahas anggaran, kalau memang anggaran yang tersedia itu hanya bisa untuk membeli dengan spek yang ada maka ke depan saya kira dengan pengalaman yang ada ini kita minta supaya ditingkatkan Pak, jangan sampai lagi ada persoalan di lapangan karena baru dipasang kemudian baru sebulan mati ya. Ada banyak persoalan karena baterainya, karena panel suryanya, karena lampunya dan lain sebagainya.

Maka oleh karena itu saya minta dalam kesempatan ini supaya di tahun berikutnya pengadaan PJUTS itu supaya bisa diberikan material yang lebih *qualified* Pak, kualitasnya lebih tinggi atau barangkali lebih bagus lagi kalau kita bisa memberikan garansi yang lebih lama Pak, terutama untuk baterai karena baterai ini saya kira barang yang memang kadang-kadang kita tidak bisa ukur, 1 bulan baru dipasang kemudian tiba-tiba mati. Oleh karena itu ke depan pengadaan PJUTS saya minta supaya kualitasnya lebih ditingkatkan lagi agar bisa meminimalis persoalan di lapangan.

Yang berikutnya Pak terkait dengan saluran penyambungan baru Pak di Desa Cikawung, Indramayu. Yang kemarin kita sudah usulkan itu ada satu desa, satu blok maaf bukan satu desa, di satu desa ada di dua blok, satu blok itu ada 330 kepala keluarga yang sama sekali belum mendapatkan sambungan listrik, itu di Desa Cikawung.

Nah saya mendapatkan info pengadaan materialnya sudah sampai di lapangan Pak, tetapi mereka belum bisa eksekusi oleh karena saya tidak tahu itu karena administrasinya atau karena apanya, Pak. Oleh karena itu saya berharap dalam waktu yang tidak lama lagi ya karena itu materialnya semua sudah tersedia tinggal eksekusi saja, kita minta supaya itu bisa segera dipasang Pak ya supaya masyarakat di dapil kami sudah bisa segera menikmati saluran listrik Pak yang baru.

Yang selanjutnya, ini terkait dengan pengawasan BPH Migas Bu, jadi di dapil kami memang masih banyak sekali persoalan-persoalan terkait dengan distribusi BBM bersubsidi terutama, terutama ini untuk para nelayan dan para petani yang memang selalu setiap kali ada membutuhkan BBM bersubsidi pada saat musim tanam ini selalu banyak persoalan.

Terkait dengan apa namanya rekomendasi dan lain sebagainya, tempo hari di kesempatan yang lain saya sudah sampaikan kepada Bu Erika saya kira dan ini saya kira perlu segera disudahi Bu persoalan ini, dibuatkan segera aturan yang jelas, siapa yang berhak merekomendasi, berapa banyak alokasinya supaya masyarakat juga menjadi paham. Jangan kemudian ketika membutuhkan BBM kemudian kita yang juga menjadi sasaran dari mereka.

Lalu kemudian terkait dengan sosialisasi, baik di BPH Migas maupun di yang lain, saya kira karena kita ini menjelang masa kampanye di bulan Oktober. Jadi kalau bisa sisa-sisa sosialisasi itu, program sosialisasi aspirasi kita itu bisa selesai di Bulan September supaya tidak bertabrakan dengan masa kampanye karena kalau sudah masa kampanye saya kira ini banyak persoalan lain.

Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih Pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian ESDM.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya silakan Pak Nasir sebagai *appetizer* dan *main course*, *dessert*.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Saya hormati Pimpinan Komisi VII, teman-teman Anggota Komisi VII, Ditjen Kementerian ESDM dan seluruh jajarannya, BPH dan yang lain mungkin tidak bisa saya sebut satu-persatu.

Mungkin minta penjelasan saja sedikit, izin Pimpinan.

Ini anggarannya Dirjen Minerba dari 678 menjadi 1,2 terus peningkatan Sekretariat Ditjen Minerba dan Batubara dari 391 ke 650, terus peta teknis dan lingkungan mineral dan batubara dari 67 jadi 370, mungkin yang bisa jawab siapa ya. Ini peningkatannya yang satu 300 miliar ini untuk apa ya Pak, dengan yang satu lagi mungkin berkisar hampir 300 juga.

Izin Pimpinan.

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

Baik, izin menjelaskan terkait dengan kenaikan 300 miliar khususnya di Direktorat Teknik itu digunakan optimalisasi untuk pengawasan aspek teknik dan lingkungan di 3.300 badan usaha. Kemudian optimalisasi 750 inspektur tambang seluruh Indonesia, pengawasan dan pemantauan keberhasilan reklamasi dan pasca tambang dan nanti akan diuraikan lebih detail lagi rincian.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya saya tanya dananya buat apa Pak yang 300 itu, ini *kan* tadi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Ini apa ya 300 miliar ini?

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

Untuk optimalisasi 750 inspektur tambang seluruh Indonesia.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya untuk apanya, ini Bapak sebagai apa?

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

Saya Plt. Dirjen Minerba Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya yang mengajukan ini siapa? Untuk apa *gitu loh*, ini batubara hilang juga, ini Bapak tambah-tambah kalau *nggak* jelas *kan* percuma *kan* uangnya. Ini dijamin batubaranya *nggak* hilang lagi, ini *kan* Inspektur Bapak bilang tadi, dijamin *nggak* batubaranya *nggak* hilang, *loh* ini 300 miliar, Pak. Bapak bilang *kan* untuk inspektur.

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

Bentuk pengawasan yang nanti akan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya *kan* Bapak bilang untuk penyiapan anggaran inspektur, 7.000 tadi *kan*.

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

750.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sekarang berapa inspekturnya.

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

750 IT Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sekarang 750 ditambah lagi 750 *gitu*? Bukan?

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

Hanya 750 seluruh Indonesia.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ini sekarang berapa jumlah inspektornya.

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

750 Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Nah ini dana untuk apa?

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

Untuk pengawasan optimalisasi dan mungkin *anu eh* apa Namanya perlengkapan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Rincikan aja dulu *nih* kalau *nggak kan* repot Bapak, ini 750, Bapak bilang 750 ini juga optimalisasinya buat apa? Menggemukkan perut *kah*, besarkan kepala *kah*, melicinkan otak *kah*, *kan* di situ. *Kan* ini harus Bapak jelaskan optimalisasinya untuk apa *gitu*.

PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (M. WAFID A.N):

Operasional.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Apa operasional apa, ini mungkin, izin Pimpinan, kita *drop* aja dulu uangnya kalau *nggak* jelas *gitu loh, loh, kan* harus jelasin. Kalau tadi uangnya kalau orangnya 750 ditambah 750 mungkin *kan* mungkin banyak yang diawasi, *nggak* tidur aja. Ini *kan* batubara hilang semua *nih*, sekarang kita minta 300 miliar ini buat apa? *Kan* harus Bapak jelaskan.

Sekarang anggaran yang sekarang yang lama itu cuman 67 miliar ditambah jadi 300 miliar, 300 sekian, 301 *lah* ini, *nah* buat apa Pak? Bapak bilang optimalisasi, optimalisasi itu setahu saya memperbaiki dan menambah peralatan *kek*, apa *gitu*. Apa Bapak bisa tengok dari sini di sana malingnya ketahuan *kan* bisa, jelasin *dong*.

STAF DITJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:

Izin menambahkan.



F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sampeyan sebagai apa?

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya silakan, jadi begini Pak Nasir karena Pak Wafid ini kan baru 2 hari Plt. Jadi akhirnya kita minta diperbantukan juga sama beberapa direktur-direktur dan sesdirjennya untuk merespon dari tadi.

Iya silakan.

STAF DITJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:

Terima kasih.

Izin Pimpinan, izin Pak Wafid.

Jadi kenaikan 300 miliar itu sebetulnya untuk sarana dan pra sarana untuk 150 inspektur tambang yang sudah ada Bapak. Jadi Inspektur tambang memang yang ada di seluruh Indonesia itu jumlahnya 750 itu, disamping itu untuk optimalisasi pengawasan terhadap 3.300 badan usaha yang sampai saat ini memang belum optimal, termasuk seperti tadi sampaikan oleh Bapak bahwa perlengkapan untuk inspektur tambang terutama untuk pencairan jaminan reklamasi memang belum optimal dengan belum melibatkan *drone* dan lain sebagainya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya 300 miliar ini buat apa Pak? Ya Bapak optimalisasi aja, ini kita harus jelas 300 miliar ini bentuknya apa, ngisi perut *kah*, kan tadi saya bilang besarkan otak *gitu*, *kan* harus jelas Pak buat apa?

STAF DITJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:

Iya drone, sarana dan pra sarana.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Apa dia.

STAF DITJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:

Sarana dan pra sarana misalnya pembelian drone, sewa mobil, kantor.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Tapi kita udah biayain untuk sewa mobil kemarin 100 miliar yang anggaran kemarin.

STAF DITJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:

Kan inikan untuk tahun 2024, Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sewanya berapa tahun, berapa unit yang disewa.

STAF DITJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:

Iya Pak untuk detailnya memang menyusul Pak, mungkin demikian.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Kalau *nggak* izin Pimpinan, kita minta detailnya aja dulu ini kalau *nggak* ya *nggak* usah disetujui *gitu*. Jadi agak repot nanti kalau 300 miliar batubaranya hilang *nggak* ketahuan juga *kan* susah juga ini jadinya. Tapi kalau Bapak jamin bilang, kami yakin 300 miliar ini untuk membuatkan kinerja kami lebih baik dan sampai ke sasarannya dengan baik, batubara *nggak* hilang terus devisanya naik sekian *gitu kan* bagus karena *kan* harus ada, karena 300 miliar itu *kan* banyak uangnya. Kalau orangnya jumlahnya *nggak* bertambah *kan* repot.

Izin Pimpinan mungkin ini catatan supaya kalau bisa jangan disetujui dulu dan termasuk tadi yang di bawahnya juga 390 jadi 652. *Nah* ini apakah karena kasus penggelembungan honor-honor itu sekarang dibalikin di sini atau gimana, ini gimana? Saya izin Pimpinan minta penjelasan juga ini yang ada hampir 300 miliar juga. Soalnya modem-modem aja *nggak* masuk-masuk ini orang ngurus *gitu* di mineral itu, ini buat apa sekarang 300 miliar ini.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Mungkin izin Pimpinan, supaya lebih jelas ini *kan* 600 miliar kurang lebih, ini di *drop* saja dulu nanti kita minta dulu penjelasan mungkin di-*clear-kan* dulu 600 miliar ini buat apa *gitu*. Ini *kan* peningkatannya hampir 600 miliar, kalau Bapak *nggak* bisa jelasin *kan* repot juga kita menyetujuinya.

STAF DITJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:

Izin Pak, mungkin bisa dibantu ditayangkan program dukungan manajemen yang sheet 15. Jadi ada beberapa penjelasan di sini bahwa kenaikan 300M itu ada penjelasan yang dijelaskan di halaman 15 itu gaji, operasional pemeliharaan kantor. Tadi juga sudah disampaikan ditanyakan juga oleh Ibu Ratna tentang operasional kantor IT, kemudian operasional kantor minerba. Operasional kantor IT juga kami cadangkan 46,12 miliar.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Kantornya *kan* sama ini Pak, apakah kantor baru, apa ada penambahan pegawai di sini. *Kan* dulunya cuman 390, *nah* sekarang bisa meningkat sampai 300 miliar, apa ini? *Loh kan* kantornya jumlahnya sama, pegawainya sama, apa honor yang dipermasalahkan karena kasus KPK kemarin? Yang dia apa itu yang pintar-pintaran si IT, si IT.

Nah mungkin izin Pimpinan, Fraksi Demokrat minta untuk yang 600 miliar ini kita bahas dulu baru kita bisa setuju. *Nah* karena kita minta secara gamblang Pak, kalau tadi Bapak *quantity*-nya yang 2023 dengan 2024 ini *quantity* orangnya sama, Bapak harus jelasin dulu buat apa. Kalau kantornya sama, jumlah kantornya sama juga di 2023 jumlah kantornya juga sama, *nah* Bapak jelasin juga buat apa, *nah gitu*.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, terima kasih Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Mungkin itu Pak Pimpinan, jadi untuk yang 600 miliar mungkin Fraksi Demokrat dikaji ulang dan untuk dipindahkan mungkin anggaran ini ke tempat lain, yang mungkin lebih bermanfaat dan bisa ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Tapi kalau bisa diuraikan secara detail, mungkin minta waktu yang khusus Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, saya mau tanya Pak yang anggaran yang untuk peningkatan sistem IT terintegrasi itu di mana ya nanti, yang tadi diusulkan.

Ya, silakan, Pak.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Terima kasih Pimpinan.

Kami sekarang lagi mencoba sedikit melihat ulang untuk yang komponen yang 650 dan 300 Pak, dengan maksud untuk memastikan bahwa yang diminta oleh Komisi VII dan memang ini yang diperlukan untuk memperkuat sistem dari minerba, sistem yang terintegrasi, baik itu dari mulai untuk proses perizinan maupun sampai kepada proses pembinaan dan pengawasannya di lapangan.

Jadi kita memang sekarang kalau secara detail ditanya ini berapa, ini berapa, belum siap untuk sistem terintegrasi, tapi dari diskusi kami secara cepat *gitu* ya dengan pihak-pihak yang memahami hal ini mungkin akan diperlukan pendanaan sekitar 150-an miliar Pak dan itu akan dianggarkan di 2024. Secara, secara persiapan kami sudah melakukan hal ini sudah diskusi dengan IBM dan yang lain-lain, jadi memang nanti anggaran untuk yang sistem itu akan ada dari komponen yang tadi Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya itu artinya begini Pak, makanya itu juga tadi ditanyakan Pak Nasir supaya detail *kan*. Jadi begini Pak Nasir tadi di awal kita ada pembahasan kesepakatan bahwa kita berkepentingan untuk mendorong perbaikan dan optimalisasi pelayanan sistem perizinan dan lain sebagainya yang ada di minerba.

Nah itu tapi terintegrasi semuanya *nggak* seperti sekarang ini kan amburadul, bahkan masih ada yang manual *gitu*. *Nah* kita mau mendorong itu segera diperbaiki dan disambut oleh teman-teman dari Gerindra dan dari PAN tadi berharap ada *legacy* dari kita Komisi VII di akhir masa periode kita, tahun 2024 ini kita menghasilkan sistem ini *lah* supaya teman-teman penambang itu *nggak* susah *lah gitu loh* ngurus daftar ini, daftar itu setengah mati *lah*, ada bahasa tadi dipersulit *lah*, yang mudah, yang seharusnya mudah dipermudah, yang mudah malah dipersulit begitulah kurang lebih.

Nah jadi saya pikir begini, saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasir, nanti ini *kan* pagu indikatif besarnya, nanti memang kita mau bahkan begini Pak Nasir, tadi kita minta khusus yang untuk minerba ini kita akan buat panja pengawasan khusus untuk masalah *monitoring* realisasi pembentukan sistem integrasi tersebut, jadi sampai seperti itu tadi.

Jadi saya pikir nanti kita *breakdown* saja habis *next* rapat selanjutnya kita agendakan khusus untuk mendetailkan karena ini *kan* masih besar-besar *nih* ya, masih dalam anggaran umum ya belum detail, masih untuk masuk di pagu indikatif begitu.

Saya pikir cukup ya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sedikit 1 menit Pimpinan, mungkin anggaran yang 600 miliar tadi difokuskan aja sistem yang mau dibuat apa, tapi kalau **cuman menggemukakan** perut inspektorat tadi Pak, saya *nggak* setuju. *Nah* itu *nggak* mungkin kalau hasilnya *nggak* ada juga, lebih bagus sistem IT yang disampaikan Pak Ketua tadi kalau timbangan mobil itu naik di timbangan tambang, dia bisa dilihat oleh Dirjen Minerba, bisa dilihat Menteri Keuangan, *nah gitu* tidak pakai analisa dan tahun ini mungkin targetnya segini, *ndak* ada lagi kalimat itu *nah gitu*. Jadi kehilangan batu itu tercatat di situ dengan *quantity* yang Bapak keluarkan dari



RKB tadi. *Nah* kalau itu *nggak* ada percuma Pak Maman, *nggak* ada juga hasilnya ini 600 miliar nanti *gitu*.

Nah itu Pak Plt. Sekjen, mudah-mudahan Bapak jadi sekjen nanti. Jadi itu yang kita minta Pak, jadi kalau Bapak tadi bilang mungkin 150 aja, 150 aja dulu, mungkin cadangan awal untuk membuat sistem IT-nya, berapa *sih*? Umpamanya kebutuhannya 1 triliun *nggak* apa-apa, tapi kan pemasukan PNBPN batubara inikan besar, kehilangannya cukup besar.

Nah kita benahi itu aja sistemnya aja dulu *gitu*, kalau dia 600 miliar berarti harus dijelaskan 600 miliarnya apa, kalau cuma inspektoratnya tadi dari 700 itu *kan* pak, Bapak cuma pakai tadi 600 berapa, inspektorat tadi, 67 sekian *kan*. Kalau di-*double*-kan 3 harusnya jumlah orangnya *double* dong, ini *kok* orangnya *nggak* bertambah.

Jadi untuk makan dia saya rasa mubazir *gitu*, jadi itu mungkin di *drop* aja Pimpinan, kita balik ke sistem IT-nya yang *connect* dengan timbangan tambang tadi Pak, sama RKB-nya ini harus *connect* dia *gitu* sama sistem yang ini ngurus-ngurus perpanjangan RKB apa ini, ini, jangan bertele-tele *gitu*.

Nah itu aja yang kita minta, sarannya, soalnya yang minerba ini lebih pintar Minerba dari Pak Joko DEN ini. *Nah* jadi saya minta sistemnya Pak, sistemnya di minerba itu yang urusan minerba kalau didatengin apa belum masuk modem lah, belum beginilah, tapi di batubara *nggak* ada *gitu loh*. *Nah* kenapa itu bisa beda *gitu loh*, padahal kantornya *kan* sebelah-sebelahan *gitu*, *nah* saya minta itu dibenahi *gitu*.

Mungkin itu aja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, terima kasih Pak Nasir.

Ini saya senang sekali Pak Nasir agak baik sekali, relatif bijak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ini udah kelewat sabar.

F-NASDEM (RICO SIA):

Pimpinan, izin sedikit aja, 30 detik.

Tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasira ada ke Plt Minerba, izin sedikit aja.

Pak Plt, 2 hari lalu saya mendengar kabar ada dari Paser Penajam keluar tongkang yang kemudian ditangkap, di sana Penajam Paser itu Modinya lagi di-*take down*, tapi ada tongkang bisa keluar dari sana bawa barang

dari sana. Mohon info besok atau lusa saya dikasih tahu kenapa bisa, terus pakai dokumennya apa, kenapa bisa sampai begitu.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya pikir itu nanti bisa langsung ke beliau.

Ya, silakan dibuka, lumayan rapat dari jam berapa kita, jam 11.00 ya, setengah 12, ya silakan dibuka, kita masuk ke kesimpulan, nanti ini ada beberapa redaksi-redaksi yang ingin saya ubah sedikit, saya kasih tambahan.

Yang pertama, Komisi VII DPR RI, *nah* ini saya perlu jelaskan jadi sehubungan dengan pengagendaan program *clean cooking* untuk rumah tangga. Jadi informasi dari teman-teman Kemenkeu dan Bappenas ya minta agar tetap ditambah dimasukkan dalam draf kesimpulan ini untuk segera bisa kita realisasikan dan kemanfaatan untuk masyarakat.

Iya jadi mulai untuk realisasi di tahun 2023 ini, jadi kata-katanya kurang lebih seperti ini.

1. Komisi VII DPR RI mengikuti program Kementerian ESDM RI yaitu *clean cooking* untuk rumah tangga agar dapat segera direalisasikan, mulai tahun 2023 yang dapat bermanfaat langsung kepada masyarakat.

Cukup *nggak* dengan ini, silakan Pak Dadan *kan* yang ini pembicaraan dengan Kemenkeu.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI / DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Cukup Bapak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Cukup ya, aman ini ya jadi jangan bolak-balik lagi Pak syarat administrasinya ya.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Poin kedua, tapi saya sebelum masuk poin kedua saya ingin tambahkan lagi ada poin kedua lagi sendiri. Itu silakan Pak itu di-*copy paste* ditambahkan saja perhitungan pendapatan negara jadi PNBPN kita. Jadi silakan, jadi di situ.

Komisi VII DPR RI mengapresiasi peningkatan pendapatan PNBPN Kementerian ESDM mengapresiasi terjadi proses peningkatan pendapatan

PNBP di Kementerian ESDM dari tahun berapa itu, apa 2019 sampai 2022, didetailkan itu Pak, 2019 berapa, coba ditulis, 2019 berapa.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

2019, 181T.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya tahun 2019, ya tahun 2019 PNBP ya *gitu*.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

181 triliun ya semua, 2020, 109. 2021, 184. 2022, 351.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, sip, *nah* dengan rincian sebagai berikut.

Jadi maksud saya biar jelas juga dimasukkan dalam ini *kan* bahwa ada prestasi dan pencapaian yang dilakukan oleh Komisi VII dan Kementerian ESDM selama itu. Yaitu ukurannya adalah yang riil aja yang terlihat yaitu peningkatan pendapatan negara yang naik secara signifikan, dengan rincian sebagai berikut.

Mengapresiasi terjadinya peningkatan pendapatan, *oke*, sip, masuk poin ketiga sekarang, Pak.

Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Sekjen Kementerian ESDM RI untuk meningkatkan pagu indikatif RKAKL Kementerian ESDM RI tahun anggaran 2024 dari 6,7 sekian menjadi 11 sekian.

Kita bahas detailnya aja dulu Pak, yang di bawahnya dulu, jadi yang kata-katanya terakhir aja, ya ini.

- a. Sekjen 545 miliar,
- b. Irjen 206 miliar,
- c. Direktorat Jenderal Migas ada penambahan sekisar 1,8T, tapi saya minta itu didetailkan nanti ya Pak, maksudnya di bawahnya itu dikasih itu kenaikan itu.
- d. Direktorat Jenderal Gatrik 1,5 ada penambahan, *eh* Gatrik itu 1,9.
- e. Minerba 1,2.
- f. Sekjen DEN 76.

Gimana Mbak Roro.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Izin Ketua, *nggak* saya *tuh* mikir ini *kan* tambahan anggarannya *kan* yang tadinya 6 sekian triliun menjadi 11 *kan*. *Nah* otomatis dengan skenario seperti ini saya rasa tadi saya juga sudah menyampaikan beberapa apa, dari beberapa direktorat bahwa ada anggaran yang sifatnya itu tidak produktif. Tadi Pak Nasir juga menyampaikan ada beberapa yang tidak produktif *gitu*, saya rasa bukan hanya kami *sih* yang menyampaikan.

Nah itu tolong diperhatikan *gitu*, kayak misalnya di poin 6 kalau tadi *kan* saya bilang EBTKE tolong dinaikkan dan terjadi *gitu* ya. *Nah* kalau saya lihat di DEN dengan peningkatan 20M kemudian mencari 76, dengan asumsi bahwa kenaikan itu menjadi 4T, *sorry* kenaikan itu menjadi 11T saya rasa ini kecil banget dengan kenaikan berapa itu berarti tambahannya 20M. Saya rasa berapa tadi Pak Ketua menyampaikan, bisa ditingkatkan lagi ini nominalnya, 100 ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Minimal bisa 100 milyar *lah*.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Mohon dipertimbangkan Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Nggak silakan aja di ini, Pak Sekjen DEN, kepada Pak Sekjen DEN ini kok kayaknya agak lemah-lemah sekali. Kira-kira Pak Sekjen butuh, kebutuhannya untuk meng-apa, merespon, mengakomodasi kebutuhan sampai kurang lebih 2024 ini diperkirakan berapa Pak Sekjen.

SEKJEN DEWAN ENERGI NASIONAL (DJOKO SISWANTO):

Izin Pak Plt. Sekjen KESDM.

Jadi usulan awal *kan* 100 sekian *gitu* Pak, kemudian ada usulan dari Ketua Harian DEN Pak Menteri ESDM ke Kemenpan, itu kemudian diproses dengan Kementerian Keuangan, itu udah selesai dan saat ini Kemenpan telah bersurat ke presiden Bulan Maret lalu untuk penyelesaian honorarium. Jadi kalau APK DEN itu, Anggota DEN itu bukan gaji tapi honorarium istilahnya dan tambahan pegawai itu memerlukan dana tambahan.

Disamping itu ada amanat kita untuk mengetahui *supply-demand* energi di berbagai daerah, sehingga diperlukan anggaran untuk mengetahui potensi berbagai macam energi di setiap daerah sebagai bahan untuk membuat Perda Ruwet di beberapa provinsi masih belum selesai. Sehingga survei untuk kebutuhan mengetahui potensi energi setiap daerah itu memerlukan dana yang cukup besar sebetulnya yang kita ajukan kemarin itu.

Namun demikian pembahasan di internal kami itu hasilnya demikian Pak, mungkin seperti itu.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bagaimana Pak?

SEKJEN DEWAN ENERGI NASIONAL (DJOKO SISWANTO):

Kalau memang bisa disetujui untuk dikembalikan sesuai arahan Bapak-Ibu Anggota bisa kembali ke usulan awal yang 100 sekian yang kemarin Pak.

Terima kasih.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ini sekjennya *nggak* semangat dia.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Gimana Mbak Roro?

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Saya mau nanya aja *sih* sebetulnya sama Pak Sekjen, mohon dijelaskan kepada kami *gitu*. Kayak misalnya tadi di paparannya seharusnya yang anggaran awal itu *kan* 120 sekian ya *kan*, *eh* berapa 129 sekian miliar. *Nah* itu atas dasar apa Pak? Jadi program-program strategis apa yang kemudian akan dilakukan, yang kemudian dia turun lagi menjadi 50 sekian *kan*.

SEKJEN DEWAN ENERGI NASIONAL (DJOKO SISWANTO):

Iya betul jadi yang anggaran strategis tadi adalah melakukan survei untuk mengetahui potensi, misalnya berbagai EBT termasuk sebetulnya potensi fosil di setiap daerah, setiap provinsi. *Nah* kita tidak punya data itu.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya konkretnya gini aja, saya langsung aja kira-kira yang dibutuhkan tambahan estimasi berapa?

SEKJEN DEWAN ENERGI NASIONAL (DJOKO SISWANTO):

Yang usulan kami awal, Pak.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Berapa Pak?

SEKJEN DEWAN ENERGI NASIONAL (DJOKO SISWANTO):

Yang kemarin di paparan Pak Menteri itu.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

190-an itu, 120, 120.

SEKJEN DEWAN ENERGI NASIONAL (DJOKO SISWANTO):

Sebentar lihat dulu.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Berarti butuh tambahannya kurang lebih sekitar 50? Benar ya.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Ketua.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya silakan.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Kita *sih* setuju-setuju aja untuk penambahan anggaran ya yang penting diikuti dengan sebuah kinerja yang positif *kan gitu* ya dan apakah yang dimungkinkan *kan* di DEN ini ada kegiatan semacam sosialisasi, kemudian kepada masyarakat karena *kan* orang agak awam juga *nih*, ini apa *kan gitu*.

Terus yang kedua, saya *pengennya* DEN ini membuat sebuah *blueprint* energi nasional kita. Jadi Dewan Energi ini karena terus terang energi kita inikan sekarang masih parsial-parsial *nih nggak* terintegrasi *lah*, baik dari sumbernya maupun sumber energinya dan sebagainya.

Saya kira DEN juga bisa membuat semacam sebuah *blueprint*, bagaimana *sih* energi nasional Indonesia ini ke depan seperti apa *gitu*, supaya terintegrasi ya antara EBT, itu, macam-macam *lah*, sumber kita ini *kan* banyak sekali ini tapi *kan* parsial-parsial.

Kadang-kadang banyak program yang kadang ini diprogramkan, tahun depan hilang, ini ada, besok hilang lagi. Jadi seolah-olah kita ini tidak pernah membuat sebuah kebijakan energi yang terintegrasi dan jangka panjang *gitu loh*, apakah memungkinkan DEN melakukan ini, kalau memungkinkan ya DEN kita akan dukung dengan sebuah anggaran kalau memang DEN bisa melakukan itu.

Saya kira itu Pimpinan.

SEKJEN DEWAN ENERGI NASIONAL (DJOKO SISWANTO):

Izin Pimpinan, memang kita sedang **kaji** Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional Nomor 79/2014, itu ada satu klausul yang mengatakan setelah 5 tahun itu untuk bisa ditinjau kembali. *Nah* kami sedang memproses itu dan tahun ini sampai tahun depan itu diharapkan selesai, kita membutuhkan data *supply-demand* itu sampai dengan 2060 sesuai dengan *net zero-emisi* itu itu.

Nah data-data itulah yang saya sampaikan tadi kita butuh untuk kita mendesain tadi *grand strategy* energi kebijakan energi kita sampai 2060. *Nah* ini kita kerjakan setiap minggu Pak, cuman sekali lagi datanya kita sangat minim begitu. Kita perlu data untuk itu.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya udah konkretnya Pak, artinya kalau misalnya di sini kita naikkan kurang lebih sekitar 170M tapi begini, saya *nggak* mau ada penambahan totalnya lagi. Jadi saya pikir dengan angka 11,7. 11 triliun 70 miliar ya, 11 triliun 70 miliar ini, ini salah ini ya, bukan ini, ada yang salah ini.

Saya *nggak* mau ada penambahan lagi dari angka ini, jadi gini aja kita tambahkan kurang lebih 50 miliar di sini untuk Sek DEN jadi total penambahan kurang lebih sekitar berapa *tuh*, jadinya sekitar 150 miliar berarti *kan*, iya *kan* 70 miliar tambah 76 itu buat tambahan program Bapak, tapi saya *nggak* mau ditambahkan dari totalnya ini. Saya inginnya diambil aja dari yang lain, mungkin kita ambil dari Gatrik aja 70 miliar itu Pak ya, 50 miliarnya. *Nggak* ini, ada lagi, Program Gatrik itu banyak *loh*, Program Gatrik ada beberapa. Gatrik ini apa aja Pak programnya 1,8T ini, eh 1,5T.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Ini ada infrastruktur transmisi, kemudian sambungan listrik gratis, kemudian yang jumlahnya dinaikkan menjadi 200.000, kemudian ada *clean cooking*.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh clean cooking ya, menurut Bapak diambil mana Pak 50 miliarnya?

**PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI / DIRJEN EBTKE (DADAN
KUSDIANA):**

50 ya Pak, kalau 50 nanti saya akan ambil dari masing-masing saja
nanti.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya udah, *nggak* gini aja harus sekarang Pak karena kita mau tapi saya
nggak mau ada penambahan total.

**PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN
KUSDIANA):**

Iya Pak.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/ WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya *gitu* aja dulu ya, jadi *nah* itu jadinya total itu tambahan itu 70 miliar.

**PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN
KUSDIANA):**

50 apa 70 Pak?

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

70, jadi kita ambil 50 miliar dari luar.

**PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN
KUSDIANA):**

Iya, saya usul ya Pak dari Migas nanti ngambil 15, dari Gatrik ambil 15
dan Minerba 10, dari EBTKE 10.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, ya udah berarti nanti detailnya silakan nanti sama sekretariat ya,
ya diambil saja masing-masing dari situ.

Oke, lanjut ke BPSDM kurang lebih 585 miliar, itu *kok* jadi 76 ya, *nggak* jadinya 120 itu Mas, 120 ya.

Dah lanjut Badan Geologi 1,2 *sorry* saya mau minta kepastian Pak Karnato *itu slim hole* itu, sumur *slim hole* itu sumur panas bumi atau bagaimana? Untuk panas bumi ya, *oke*. Itu dalam rangka untuk yang mendorong *renewable* energi baru terbarukan itu ya untuk menemukan cadangan baru ya.

Oke, selanjutnya BPMA 98 miliar nanti tolong di-*adjust*, Pak ya. Jadi ada perubahan di DEN dan saya minta di-*adjust* saja, jadi tetap totalnya di angka 11,70 *something* itu ya.

Jadi total anggaran yang dibahas dan disetujui oleh kedua belah pihak antara Kementerian ESDM dan Komisi VII adalah sebesar 11 triliun 70 miliar rupiah.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Lanjut nah saya minta, sekarang kita naik ke redaksionalnya Pak, redaksional di atas, ya.

Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Sekjen Kementerian ESDM untuk meningkatkan pagu indikatif RKAKL Kementerian ESDM RI Tahun Anggaran 2024 dari 6,7 triliun menjadi 11 triliun sekian, guna meningkatkan kinerja dan peningkatan kinerja dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor ESDM, dengan rincian sebagai berikut.

Cukup ya, lanjut turun yang paling bawah, *nah* ini detailnya nanti tolong ditambahkan tapi saya pikir tidak perlu yang besar-besar, yang kecil-kecil itu *nggak* perlu. Jadi yang angka-angka penambahan yang besar-besar aja nanti di-detail-kan, yang terdiri dari sebagai berikut.

Oke, turun lagi.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Izin Pimpinan.

Untuk nomor 1 untuk usulan tambahan kami mengusulkan tambahan *multiyears* Pak, 1, 2, 3, 4 ya sudah.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Cuma saya minta ditambahkan lagi 1 poin, bahwa untuk yang di minerba itu kita alokasikan sekitar kurang lebih 150 sampai 200 miliar untuk peningkatan pembangunan sistem IT terintegrasi, itu tolong ditambahkan kata-katanya

kenapa? Karena gini *kan* total aset di minerba itu ada 3.000 triliun yang bergerak, tapi masa hanya di *cover* oleh sistem IT yang harga pembangunannya cuman sekitar 5-10 miliar, gimana *nggak* jebol itu dikerjain orang *gitu*.

Komisi VII DPR RI meminta Plt. Sekjen Kementerian ESDM RI untuk mengalokasikan, bukan meminta, menyetujui, menyetujui, iya bersepakat dengan Kementerian ESDM untuk mengalokasikan anggaran.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin Pimpinan, kalau menurut pemahaman kami kata menyetujui itu lebih pas karena *kan* beliau-beliau ini yang mengusulkan begitu.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh ya *oke*, menyetujui alokasi anggaran Direktorat Jenderal Minerba sebesar 150 hingga 200 miliar rupiah yang untuk dialokasikan kepada pembangunan sistem, sistem pelayanan perizinan terpadu, terpadu di sektor mineral dan batubara.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, sedikit.

Memang kalau 150 itu cukup anggarannya?

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya itu ini *kan* mereka lagi.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Nanti dia *nggak* masuk lagi, kedua pakai manual lagi *kan* harus kita.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya pikir anggarannya *nggak* usah dibilang 150 sampai 200 miliar ya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sistemnya itu berapa *sih*, anggarannya *gitu*. Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya pikir *nggak* usah angkanya dulu ya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Boleh aja tapi harus disebutkan sistemnya itu, ini *kan* izin batubara itu *nggak* pernah terkendala, di minerba itu terkendala, apa sih permasalahannya, yang penting itu Pimpinan, supaya kita tahu berapa angkanya di situ. Ini soalnya eselon di bawahnya yang lebih pinter dari eselon atasnya urusan kayak gini.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Begini, saya rasa karena begini Pak Nasir ini kan baru mengemuka pembahasannya dalam hari ini *gitu* ya. Artinya kalau kita masukkan angka saya pikir kita *nggak* usah masukkan angkanya aja dulu ya. Jadi kita *nggak* usah pakai angka.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Itu aja angka yang 600 miliar tadi diutamakan untuk membangun sistem untuk administrasi pengurusan izin-izin yang elektrik, elektronik di sini.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh begini aja, Komisi VII DPR RI menyetujui peningkatan alokasi anggaran di Dirjen Minerba yang digunakan untuk pembangunan sistem pelayanan dan perizinan terpadu, *gitu* aja Pak ya? *Oke*, sip, yang digunakan untuk pembangunan sistem pelayanan dan perizinan terpadu di sektor.

Jadi Komisi VII menyetujui peningkatan alokasi anggaran di Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI diprioritaskan ya, yang diprioritaskan untuk digunakan *gitu* aja, digunakan dalam pembangunan, *oke*, sip, *oke* ya?

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI (DADAN KUSDIANA):

Mohon maaf Pimpinan, boleh sedikit ke atas nomor 6-nya belum, saya belum baca tadi yang tabel, hanya memastikan Pak.

Terima kasih sudah lengkap.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Turun lagi ke bawah PJUTS udah ya, yang poin nomor 4 setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



Ya sip, lanjut nomor 5 habis, *oke*. Poin nomor 5 jawaban tertulis.

F-NASDEM (RICO SIA):

Pimpinan, pimpinan izin, sedikit aja di luar ini.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sebentar, kalau di luar ini nanti dulu, tuntaskan dulu ini. Ya tinggal tambahkan aja dulu jawaban tertulis.

Oke, cukup ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Iya terakhir Pak Rico Sia.

F-NASDEM (RICO SIA):

Seperti apa yang sudah disampaikan oleh rekan kita Pak Nasir tadi, mudah-mudahan Plt. Ini jadi sekjen ya karena kita lihat tadi 70 miliar itu dalam waktu singkat bisa dituntaskan, *tek, tek, tek*, kenapa *nggak* kita dorong aja sekalian Plt-nya jadi sekjen *gitu* karena yang lain saya yakin setuju, itu tadi *kan* keputusannya.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Kirain apa.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Pimpinan, sedikit aja.

Tadi *kan* kita mendorong ya artinya mengusulkan ada penambahan anggaran kurang lebih 4 sekian triliun dari yang sudah ada ya dan ini sumbernya rupiah murni atau direncanakan apa dari PNBK, itu juga perlu di.

**PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN
KUSDIANA):**

Paham Pak, kami mengusulkan Pimpinan untuk yang sifatnya infrastruktur itu dari rupiah murni, Pak.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Iya kita berharap memang yang hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat yang langsung kita menggunakan langsung menggunakan rupiah murni, kalau yang lain-lain boleh *lah* pakai PNBK ya Pak ya.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, silakan Pak Dadan, Pak Dadan kasih *closing statement*.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Munculkan dulu tadi mana yang terakhir tulisannya, dimunculkan dulu supaya itu divonis *gitu*, ini tadi yang terakhir kesimpulan yang terakhir, kesimpulan terakhir coba munculkan dulu.

Belum, belum, saya mau lihat yang kenaikan tadi, kenaikan, kenaikan, nah ini yang 4 itu, sudah ketok? Ya ketok lagi supaya lebih sah.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Yang penting Pak, Pak Dadan, saya minta di-*adjustment* tadi ada yang perubahan di DEN nya itu, nanti angka detailnya tadi sebelum nanti kita tanda tangan.

Silakan Pak Dadan, Pak Dadan.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Izin Pak Ketua, kayaknya ada tabel yang terakhir itu ada perubahan-perubahan mungkin tadi disesuaikan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Betul Pak, makanya tadi saya bilang perlu ada *adjustment* nanti sebelum kita tanda tangan tapi tidak merubah total anggaran, hanya dari DEN yang akan dicomot-comot dari beberapa itu.

Oke, sip silakan Pak Dadan, Pak Dadan.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/ DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Terima kasih Pimpinan.

Tapi ini belum *closing statement* Pak, masih ada dari bawah nih, dari belakang maksudnya. Mohon izin ke atas lagi, kami memastikan yang PLTMH Pak, itu pun termasuk *multiyears* tapi bukan PLTMH yang ini, bukan PLTMH yang usulan 30 juta eh 30 miliar, tapi PLTMH yang di atas, di mana maksudnya, izin ke atas, yang di mana.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Yang mana yang total, gini, gini, gini *sorry* saya jelaskan habis ini nanti masih ada sedikit perbaikan yang angka-angka detail itu, itu *nggak* usah lagi kita berdebatkan yang penting tidak merubah total. Jadi *monggo* nanti sebelum saya tanda tangan jangan dulu, pokoknya diubah dulu *gitu loh*.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak Dadan, Pak Dadan.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Tapi mohon maaf nih satu lagi yang tadi sama Pak Mukhtarudin, bahwa sebaiknya yang usulan tambahan ini berasal dari rupiah murni ini masuk didalam kesimpulan, Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Gimana, Bapak jelaskan sama kita biar temen-temen *clear*, apa *sih* bedanya rupiah murni sama rupiah palsu, rupiah *nggak* murni, rupiah apa itu *loh*.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Terima kasih Pimpinan.

Sebenarnya semua pendapatan negara itu basisnya juga tergantung pendapatan, tapi khusus kalau yang IPP PNBP memang benar-benar mengindeks terhadap berapa sebetulnya pendapatan pemerintah dari PNBP



tersebut. Jadi sebetulnya jumlahnya tidak pernah pasti Pak, mengikuti pendapatannya tapi kalau RM ya nanti bisa mengambil dari pajak, dari segala macam Pak, dari awal sudah *fix*.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bukannya kalau Bapak mau aman supaya *nggak* ganggu yang lain diambil dari PNBP, Pak.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Kalau PNBP *kan* tidak ada kepastian Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Kalau PNBP ini agak susah ya.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pacaran aja butuh kepastian ya Pak, apalagi urusan anggaran ya *nggak*.

Iya tambahkan poin ke-5, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Kementerian ESDM bahwa peningkatan anggaran, peningkatan anggaran. Peningkatan anggaran Kementerian ESDM yang telah disepakati diambil dari alokasi rupiah murni, bersumber dari rupiah murni, *oke cakep*.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin Pimpinan, ini *kan* tadi disampaikan kalau diutamakan itu yang kegiatan infrastruktur. Maksudnya kita coba *win-win solution gitu loh* Pimpinan, supaya APBN kita juga *nggak* terlalu pahit *gitu* maksudnya. Kalau memungkinkan saya mengusulkan ini masih ada koma, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat infrastruktur begitu.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Peningkatan anggaran Kementerian ESDM, yang telah disepakati bersumber dari rupiah murni terakhirnya ditambahkan, terutama, terutama program-program infrastruktur *gitu* Pak, cocok.

Oke, sip ketok ya, saya ketok ya, udah ya. Apa lagi Pak Rico?



**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Oke, lanjut silakan Pak Dadan *closing statement*, *nggak* usah ngoceh lagi Pak, *closing statement* aja.

PLT. SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI/DIRJEN EBTKE (DADAN KUSDIANA):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII.

Terima kasih atas dukungan terutama terkait dengan penambahan anggaran untuk, untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kinerja sektor ESDM.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, dengan demikian rapat pembahasan anggaran antara Komisi VII dengan Eselon 1 ESDM selesai dan resmi kita tutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.22 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.
NIP. 196903131990032002

